

SUPERLUHUT

DALAM KENDALI
LUHUT BINSAR
PANDJAITAN

LIMA MENTERI KERUYOK
PEMBANGUNAN
TANJUNG CARAT

YANG BIKIN
GEREGETAN DI
TENGAH PANDEMI



nfo indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN 1 HALAMAN

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL

RP 50.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

AGUSTUS

Sampailah kita di Agustus 2021. Bulan saat peringatan hari ulang tahun ke-76 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun, ini bukanlah Agustus yang normal. Dari sisi cuaca pun hujan masih turun saat Agustus yang normalnya berada di musim kemarau.

Betapapun bukan situasi normal, gelombang pemikiran tentang makna kehidupan yang perlu lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup sudah mengemuka di berbagai belahan dunia. Paling tidak, secara global sebagian besar negara-negara di dunia sepakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.

Salah satu pengertian perubahan iklim adalah kenaikan suhu dan perubahan pola cuaca akibat ulah manusia yang berlebihan mengeluarkan gas rumah kaca. Sumber gas rumah kaca terbesar adalah keluaran gas dari pembakaran bahan yang berasal dari fosil. Katakanlah bahan bakar minyak dan batubara. Padahal, selama ini, bahan bakar jenis itulah yang menunjang kehidupan manusia sejak munculnya revolusi industri di Eropa.

Nah, penyesuaian terhadap perubahan iklim itu kini tampak dalam bentuk kendaraan bertenaga listrik. Juga pembangkit listrik yang tak menggunakan bahan bakar fosil. Contoh lain, penggunaan pupuk kimia yang berasal dari bahan bakar fosil, juga mulai memiliki alternatif pupuk organik.

Lebih dari itu, penyesuaian terhadap perubahan iklim juga memerlukan perubahan perilaku di tingkat perorangan hingga negara. Ringkasnya, cara hidup kita mungkin berubah meski perlahan-lahan.

Yang paling mencolok memang terkait dengan pandemi Covid-19. Di tengah isu virus corona sebagai hasil laboratorium yang bocor, pada awalnya tetap saja virus itu berasal dari makhluk hidup lain, bagian dari ekosistem lingkungan hidup. Poinnya, perubahan iklim ternyata seiring dengan munculnya penyakit-penyakit yang mengancam kelangsungan hidup manusia.

Jadi, sudah selayaknya Indonesia yang memperingati HUT ke-76 proklamasi kemerdekaan, mulai lebih hirau terhadap perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara tak mungkin melepaskan diri dari pergaulan internasional, di samping nasionalisme yang tetap relevan.

Setiap bangsa memiliki masalahnya sendiri-sendiri memang. Tapi, mulai saja dengan menjawab pertanyaan: mengapa Indonesia yang lebih dulu merdeka pada 1945, tampak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang merdeka belakangan. Juga dalam menghadapi perubahan iklim dan implikasinya. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)
Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter : @1nfoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
AGUSTUS
2021



6 INFO UTAMA

Pentas politik Indonesia sudah mengenal beberapa menteri yang super, atau mendominasi kebijakan pemerintah. Katakanlah Widjojo Nitisastru dan Bacharuddin Jusuf Habibie. Apakah Luhut Binsar Pandjaitan juga seperti itu?



18 INFO SUMSEL

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengharapkan pemerintah pusat agar dapat memasukkan proyek pembangunan infrastruktur di Bumi Sriwijaya menjadi proyek super prioritas, utamanya dalam percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin.



28 INFO DAERAH

Pertanian menjadi salah satu sektor utama yang disusun Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Hal ini dilakukan demi menjadikan kabupaten tersebut sumber pangan atau kabohidrat baru di Bumi Etam

86

INFO SELEBRITI

Jihane Almira Chedid mengharumkan nama bangsa di ajang Miss Supranational 2021. Perempuan yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 4 Februari 2000 itu bahkan menyabet banyak penghargaan.





52 INFO EKONOMI

Cakupan penyertaan modal negara (PMN) atau suntikan dana baru untuk Badan Usaha Milik Negara untuk Tahun Anggaran 2022 sudah lebih jelas. Ada pula PMN untuk Badan Layanan Usaha. PMN 2021 juga ada tambahan.



64 INFO POLITIK

Gagasan amendemen terbatas UUD 1945 menjadi liar. Di awal diklaim hanya untuk mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, besar celahnya untuk disusupi agenda menambah masa jabatan presiden.



88 INFO KHUSUS

Imunisasi atau vaksinasi Covid-19, selain uji usap atau swab test PCR (Polymerase Chain Reaction, reaksi rantai polimer), adalah dua hal penting dalam pengendalian pandemi Covid-19. Namun, implikasinya sangat luas termasuk dalam aspek bisnis dan moralitas.

- 3 DARI REDAKSI
- 40 INFO NUSANTARA
- 44 INFO PROFIL
- 68 INFO ISTANA
- 72 INFO TEKNOLOGI
- 76 INFO SPORT
- 80 INFO WISATA
- 98 KAJI



DALAM KENDALI LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Pentas politik Indonesia sudah mengenal beberapa menteri yang super, atau mendominasi kebijakan pemerintah. Katakanlah Widjojo Nitisastro dan Bacharuddin Jusuf Habibie. Apakah Luhut Binsar Pandjaitan juga seperti itu?

Bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berperan sebagai super minister dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, memang bukan hal yang baru terdengar belakangan.

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi (2014-2019) yang berpasangan dengan Wapres HM Jusuf Kalla, misalnya, Emirza Adi Syailendra sebagai peneliti Program Indonesia di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapura, menulis bagaimana peran dan fungsi Luhut.

Syailendra menganalisis, tanpa jaringannya di lingkungan militer, dan tidak memiliki kekuasaan yang efektif atas partai politik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terkekang dalam manuver politiknya. Untuk mengatasi hal ini, Jokowi telah menempatkan purnawirawan jenderal ke pos-pos sipil penting sebagai menteri

koordinator, menteri pertahanan, dan kepala intelijen negara.

Masuknya sejumlah besar mantan perwira militer dalam pemerintahannya telah menjadi cara Jokowi untuk menyeimbangkan pengaruh oligarki yang mendukungnya selama kampanye kepresidenannya. "Bisa dibilang, salah satu penunjukan paling signifikan yang pernah dilakukan Jokowi adalah pengangkatan Luhut Binsar Pandjaitan, mantan jenderal bintang empat bintang empat era Suharto," ujarnya.

Menurut Syailendra, penunjukan Luhut penting bagi Jokowi karena beberapa alasan. Selain menyediakan saluran penting bagi militer, Luhut telah bertugas untuk menegakkan beberapa tindakan disiplin di Kabinet.

"Kehadirannya penting bagi Jokowi untuk membantunya mengkonsolidasikan kekuasaan. Beberapa menteri telah mengejek ketidakmampuan Jokowi untuk memerintah, yang menunjukkan kurangnya rasa hormat mereka terhadap presiden.

Dalam menyikapi inkoherensi politik di Kabinet Jokowi, Luhut mengatakan lembaga negara, menteri, atau lembaga dilarang bertentangan dengan presiden," kata Syailendra.

Luhut juga pernah menegaskan, menteri atau lembaga negara wajib memberi tahu presiden sebelum membuat pernyataan publik. Jokowi membenarkan disposisi ini sebagai cara untuk menyatukan suara dan kepentingan yang berbeda di dalam Kabinetnya.

Tambahan pula, kata Syailendra, Luhut penting juga untuk membantunya menyeimbangkan berbagai kepentingan oligarki.

Toh selain karena





Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan.

seluruhannya yang sering kontroversial, Luhut banyak mengurus berbagai hal dengan tupoksi yang beragam. Bahkan, ia lekat dengan julukan sebagai menteri segala urusan dengan wewenang seluas lautan.

Kerap memberikan tanggapan-tanggapan atas kritik kepada Jokowi, hingga menjadi Ketua Panitia pertemuan dengan IMF World Bank yang berlangsung di Bali pada 2018 lalu, membuat Luhut terlihat begitu sibuk menyelesaikan berbagai hal.

Dalam pandangan politisi Gerindra Ferry Juliantono, Luhut merupakan tangan kanan Jokowi. Ia menilai Luhut merupakan sosok atau aktor penting di balik setiap kebijakan Presiden Jokowi.

Menurut Ferry, Luhut sering melontarkan pernyataan yang berada di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Hal itu membuat banyak pihak juga menjuluki politisi senior Partai Golkar itu sebagai "super minister".

"Sejak periode pemerintahan Presiden Jokowi, banyak langkah yang dilakukan Pak Luhut di luar ranah kementerian.

Jadi memang orang melihat dia super minister atau berperan penting atau aktor penting di balik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Ferry.

Sedangkan dalam sebuah acara Q&A Metro TV, Luhut pernah menjawab soal sebutan tangan kanan Presiden Jokowi dan super minister yang ditujukan kepadanya. Luhut membantah bahwa dia merupakan super minister. "Saya enggak ngerasa super minister, saya kan jarang pergi dengan presiden," katanya.

Luhut kembali menegaskan terkait dengan sebutan tangan kanan presiden. "Saya enggak merasa begitu, beliau itu atasan saya. Saya kerja seperti tentara lah loyal pada atasan," kata Luhut.

Saat Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri pada 2014, nama Luhut disebut sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Luhut mulai menjabat 31 Desember 2014. Luhut menjabat sebagai KSP tak terlalu lama. Pada September 2015, Presiden Jokowi memutuskan untuk menggeser

Luhut ke posisi lain. Kemudian kursi KSP diberikan kepada Teten Masduki.

Perombakan kabinet yang terjadi pada 2015 membuat Luhut Binsar Pandjaitan digeser menjadi Menko Polhukam. Sebelumnya kursi Menko Polhukam diduduki oleh Tedjo Edhy Purdijatno. Namun Tedjo Edhy salah satu menteri yang diganti saat perombakan itu. Sambil berguyon, Tedjo menyebut sudah sejak awal Luhut menjadi Menko Polhukam dan dirinya hanya sekadar mengisi.

"Saya tahu sebetulnya Bapak Luhut sudah lama harusnya di sini, tapi karena sudah menjabat sebagai kepala staf Presiden maka saya sementara ditaruh di Menko Polhukam. Selamat bertugas Pak," ujar Tedjo yang disambut tawa pada undangan yang hadir.

Rupanya, posisi Menko Polhukam hanya sekitar satu tahun dijabat Luhut. Mantan Jenderal TNI ini kembali digeser Jokowi ke jabatan lain. Pada 2016, Presiden Jokowi kembali bongkar pasang kabinet. Salah satu menteri yang digeser adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Setelah menjabat sebagai

• INFO UTAMA

Menko Polhukam, Luhut dipindah menjadi Menko Kemaritiman. Jokowi percaya kementerian ini dipimpin oleh Luhut. Sebelumnya posisi ini ditempati oleh Indroyono Soesilo dan Rizal Ramli. Namun Luhut yang mampu bertahan hingga saat ini.

Di mata Syailendra pergeseran ini menjadi salah satu strategi yang menarik. Menteri Koordinator Bidang Ke-

diusulkan Kalla.

Rizal Ramli juga secara terbuka menyerang Sudirman Said, yang terkait erat dengan Kalla, atas kontroversi Freeport dan kontroversi ladang gas Masela.

Sudirman Said dan Rizal Ramli dihentikan dalam reshuffle, memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk mendatangkan seorang profesional,

si Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ke Golkar untuk pemilihan presiden berikutnya.

Setya sebelumnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi ia mengundurkan diri setelah kontroversi seputar pembaruan kontrak dengan afiliasi Freeport-McMoRan, perusahaan AS yang mengoperasikan tam-



HM Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan.

maritiman. Rizal Ramli memiliki reputasi sebagai kritikus kontroversial dan keputusan Jokowi untuk menempatkannya di kementerian yang sangat strategis dan pusat telah membuat banyak orang bertanya-tanya apakah itu strategi yang disengaja melawan oligarki.

Sejak menjabat, Rizal Ramli telah mencurahkan perhatian yang signifikan untuk mengkritik proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan beberapa oligarki. Perseteruan tingkat tinggi termasuk serangan publiknya terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Agustus 2015 atas proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt yang

Arcandra Tahar, untuk menggantikan Sudirman Said. Namun menteri baru itu sendiri dengan cepat diganti setelah ia diketahui memiliki paspor AS. Setelah itu, Jokowi mempercayakan Luhut untuk sementara menggantikan posisi Arcandra.

Itu semua berada pada bingkai dinamika internal kabinet Jokowi. Sedangkan dalam hubungannya dengan keseimbangan pengaruh partai-partai politik, Syailendra menulis, hubungan kuat Luhut dengan Setya Novanto, pemimpin Partai Golongan Karya (Golkar) saat itu, juga meningkatkan pengaruh bagi Jokowi karena ia memiliki opsi untuk beralih dari Partai Demokra-

bang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar ketiga. Setya terdengar dalam rekaman meminta bagian di pembangkit listrik di Papua sebagai imbalan atas perannya untuk membujuk Jokowi dan Luhut, penasihat kepercayaannya, untuk memperpanjang kontrak Freeport.

Terlepas dari semua konflik tingkat tinggi ini, Setya, dengan dukungan kuat dari Luhut, terpilih sebagai ketua salah satu partai politik paling terkemuka di Indonesia — Golkar — selama pemilihannya baru-baru ini. Meski proses pemilihan umum dalam konvensi Golkar disinyalir terperosok dalam politik uang, pemilihan Setya diapresiasi

oleh presiden. Sebagai imbalannya, Setya menjungkirbalikkan posisi netral Golkar menjadi salah satu pendukung koalisi Jokowi, menambah dorongan signifikan pada posisi Jokowi.

Toh peran kuat Luhut dalam pemerintahan Jokowi menandakan manfaat mendasar yang diperoleh presiden untuk memperkuat basis kekuatan politiknya. Namun hal itu juga menimbulkan

biasa yang dimiliki PDIP atas dirinya, Jokowi tidak meninggalkan hubungannya dengan partainya sendiri. Sebenarnya hubungan ini penting untuk menghalangi pengaruh Luhut yang semakin besar di kabinetnya.

Awalnya, Jokowi berniat menjadikan Luhut sebagai 'menteri super' dengan memberinya rangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan

dalam pemilihan berikutnya," kata Syailendra.

Alhasil, Jokowi selamat dan terpilih lagi untuk periode kedua pada Pilpres 2019. Toh di awal terpilihnya Jokowi menjabat kursi presiden selama 2019-2024 Luhut mengaku belum tahu apakah bakal kembali menjabat sebagai menteri.

"Saya nggak tahu apa yang terjadi,"



Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli.

kan pertanyaan tentang independensi politik Jokowi.

Menurut Syailendra, keputusan Jokowi memindahkan Luhut ke posisi yang tampaknya kurang bergengsi, sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, telah dilihat oleh banyak orang sebagai tanda meningkatnya kewaspadaan Jokowi terhadap pengaruh nyata Luhut di Kabinet. Hal ini dipandang sebagai tampilan kekuasaan Jokowi yang dirancang untuk menunjukkan bahwa dia masih menjadi orang yang bertanggung jawab atas pemerintahannya.

Meskipun penunjukan Luhut tampaknya telah melemahkan kendali luar

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun posisi Kepala Staf kemudian diberikan kepada Teten Masduki, seorang aktivis antikorupsi Indonesia, yang memiliki hubungan hangat dengan Megawati.

Di sisi lain, Jokowi menunjuk Pramono Anung, orang kepercayaan Megawati, sebagai Sekretaris Kabinet agar Anung bisa menjembatani komunikasi dengan partai. "Tindakan penyeimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun kehadiran Luhut sangat penting, penting bagi Jokowi untuk tetap setia kepada PDIP. Ini akan terus berlanjut selama pemerintahannya, kecuali ia mampu membentuk partainya sendiri

katanya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Ia menambahkan, "belum pernah dikasih tahu dulu kalau jadi menteri. Jadi saya ya sudahlah."

Mengenai keinginannya untuk kembali menduduki posisi Menko Maritim, Luhut hanya mengatakan, semuanya tergantung keputusan Jokowi. "Belum. Kan tiga kali saya jadi menteri, tidak pernah saya diberi tahu," ujarnya.

"Kalau kau presiden, saya jelasin mau saya apa saja. Saya enggak tahu yang terjadi. Biarkan waktu yang bicara," tandasnya.

Kisah pun berlanjut. Namun tak sampai di sini saja. •



FOTO-FOTO: REPRO

LUHUT DAN KONSTELASI MENJELANG PILPRES

Seiring dengan tebaran baliho bergambar tokoh-tokoh seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, muncul pula dukungan untuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi calon presiden. Masih pandemi Covid-19 padahal.

Ya, dukungan untuk Luhut datang dari kelompok bernama Pemuda Perubahan. Mereka menyebar poster dan bertekad mendeklarasikan dukungan untuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Presiden Indonesia pada 17 Agustus 2021. Secara virtual memang.

Dalam poster itu, Luhut dinarasikan sebagai sosok yang berkarakter tegas, cepat, dan mengerti masalah negara. "Pemuda Perubahan menginginkan sosok pemimpin yang tegas dan paham betul soal permasalahan bangsa ini. Paham betul soal urusan negara. Pemimpin yang tidak neko-neko," kata penanggung jawab deklarasi, Muhammad Sifran.

"Acara deklarasi melawan LBP for RI 1 dilatarbelakangi oleh semangat gen-

erasi muda dalam menyongsong HUT RI," ucapnya lagi.

Sifran, mengaku memang kelompoknya yang membuat dan menyebarkan poster bertajuk LBP For RI 1. Dia mengatakan poster tersebut bagian dari penggalangan dukungan bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjadi calon presiden atau Capres 2024.

"Kami berinisiatif menggalang dukungan mendorong Pak LBP ke RI 1 dengan beberapa alasan," kata Sifran, Minggu, 8 Agustus 2021. Alasannya, pertama, Sifran menilai Luhut sebagai tokoh dengan jiwa nasionalisme tinggi terhadap NKRI.

Alasan kedua, Luhut dianggap memiliki segudang pengalaman mulai



dari militer, pengusaha, duta besar, dan menteri. Sifran juga menyebut Luhut figur yang bersih dari korupsi. Ketiga, Sifran mengatakan hanya Luhut yang mampu mengeluarkan keputusan yang tegas dan cepat ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kebuntuan program, contohnya, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali yang dipimpin Luhut.

Keempat, Sifran menilai Luhut sebagai figur pejabat yang diterima oleh tokoh politik nasional dan internasional. "Orangnya nggak neko-neko dalam mengeluarkan kebijakan. Beliau tegas, tidak mau memberi harapan palsu untuk masyarakat," kata Sifran.

Sifran mengatakan kelompok Pemuda Perubahan sengaja dibentuk beberapa bulan lalu untuk menggalang dukungan bagi Luhut. Kendati begitu, dia mengklaim penggalangan dukungan ini bukan pesanan pihak mana pun, termasuk Luhut maupun lingkaran di sekitarnya.

"Tidak ada pesanan siapa-siapa. Ini murni inisiatif saya dan teman-teman,"

ujar Sifran.

Ia juga menegaskan, sudah saatnya Indonesia tak lagi terjebak pada ukuran primordial dalam memilih pemimpin. "Urusan pandangan-pandangan model kayak gitu, pandangan primordial kesukuan yang sering benturkan suku ini, agama ini, enggak ada urusan kalau bagi saya," kata Sifran.

Menurut dia, dukungan untuk Luhut sebagai Capres 2024 sudah selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi calon presiden. Selama negara ini berdasarkan pada konstitusi dan Pancasila, kata Sifran, semua punya hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, maupun bupati.

Dia juga menilai calon presiden tidak harus berasal dari latar belakang agama dan suku tertentu seperti yang selama ini terjadi. "Kenapa kita masih terjebak ukuran kesukuan dan primordial dan lain sebagainya, rasisme dan sebagainya. Kan acuan bernegara sudah ditetapkan," ujar Sifran, yang sebe-

lumnya aktif dalam kelompok Gerakan Pemuda Islam ini.

Belum sampai deklarasi LBP for RI 1 berlangsung, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menegaskan poster-poster dari Sifran dan kawan-kawan bukanlah berasal dari pihak Luhut. "Saya ingin menegaskan bahwa poster yang beredar tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Luhut. Dan itu bukan berasal dari kami. Kita kami mengetahui asal usul poster tersebut," ungkap Jodi secara virtual.

Jodi juga mengemukakan bahwa Luhut tidak berniat untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang. "Pak Luhut tidak ada niatan mencalonkan Presiden tahun 2024. Saat ini Pak Luhut fokus menangani PPKM Jawa Bali sebagaimana tugasnya oleh presiden kepada Pak Luhut," ujarnya.

Luhut sendiri sempat mengatakan bahwa dirinya berniat berhenti menjabat di pemerintahan pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Luhut kepada Deddy Corbuzier dalam acara *talk-show* yang diunggah kanal Youtube

• INFO UTAMA

Deddy Corbuzier pada 6 Juli 2021.

"Istri saya bilang, 'Pah kamu kalau sudah selesai jangan lagi jadi menteri-menteri ya capek,'" kata Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya bilang yes. (Pada) 2024 kita selesai nggak mau lagi," ucapnya menambahkan.

Selain itu, Luhut juga menyebutkan bahwa untuk mengabdikan pada negara tidak harus selalu jadi presiden. "Kita mesti tahu kapan waktunya berhenti.

kata Jodi, "Pak Luhut tidak akan dan tidak pernah pasang baliho atau menyebarkan selebaran sebagai Capres 2024 karena bisa mengukur diri."

Jodi menduga, ada oknum tertentu yang sengaja mendesain isu di tengah maraknya pemberitaan Covid-19. Meski begitu, dia enggan menjelaskan lebih jauh perihal oknum yang dimaksudkan.

"Pak Luhut tidak akan dan tidak pernah pasang baliho di seluruh In-

ini perkembangan wabah virus Corona malah bergerak ke luar Jawa-Bali, sedangkan problem di Jawa dan Bali masih pada angka kasus aktifnya yang begitu tinggi.

Namun, peran Luhut dalam PPKM Jawa-Bali justru dapat menjadi isu politik pula. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menduga penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, merupakan bentuk



Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.

Kan banyak pengabdian lain, ini orang semua ambisi harus jadi presiden baru bisa mengabdikan," kata Luhut.

"Ngapain kamu jadi presiden? (Kamu) bisa mengabdikan apa saja. Ini semua kalau gak jadi Presiden Indonesia (seolah) langsung mati," ujarnya.

Sedangkan Jodi mengungkapkan Luhut sudah memiliki rencananya tersendiri saat purna jabatan di pemerintahan. "Rencana setelah selesai bertugas sebagai menteri akan fokus ke keluarga dan yayasan pendidikannya,"

donesia atau menyebarkan selebaran sebagai capres 2024 karena bisa mengukur diri. Poster itu bukan dari pihak Pak Luhut, ataupun kita (tak) mengetahui asal usul poster tersebut. Sepertinya ada yang ingin memainkan isu," ujarnya.

Malah sepanjang Juli-Agustus Luhut masih sangat fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menko Marives sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Apalagi karena saat

lain dari tanda-tanda keretakan Jokowi dengan PDIP.

Dinamika internal PDI Perjuangan belakangan semakin menunjukkan keterbelahan antara kubu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dengan kubu Presiden Jokowi. Antara lain soal baliho Ketua DPR RI Puan Maharani, yang menghiasi sudut-sudut jalanan di banyak daerah. Tak terkecuali di Kota Solo.

Pemasangan baliho Puan Maharani tak dilarang oleh Walikota Solo, Gibran

Rakabuming Raka. Tapi seolah tak ambil pusing, putra sulung dari orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan asal perintah dari pemasangan baliho Puan Maharani tersebut.

"Iya. Itu ada instruksi dari partai," katanya usai meninjau Pasar Klewer bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 5 Agustus 2021.

Lantas muncul analisis Presiden Jokowi kurang harmonis dengan Megawati Soekarnoputri. Menyusul isu ketidakharmonisan Jokowi dengan Megawati yang menyinggung perihal komando pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 yaitu PPKM Darurat, yang sekarang sudah berubah nomenklaturnya menjadi PPKM Level 4.

"Saya lihat Jokowi lebih cenderung ke Golkar. Lantaran semua hal menyangkut penanganan Covid-19 diserahkan ke Luhut Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto," ujar Jerry, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Di samping itu, Jerry juga melihat kecenderungan sikap Jokowi menjelang Pilpres 2024. Gelagat atau tindak tanduk Jokowi, kata dia, malah kelihatan tidak mendukung sikap Megawati yang menginginkan putrinya, Puan Maharani, sebagai capres 2024 dari PDIP.

Tambahan pula, kata Jerry, Jokowi punya kedekatan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang beberapa waktu lalu ditemani Presiden Jokowi untuk memantau vaksinasi warga di Jawa Tengah. Padahal pada waktu bersamaan, ada acara penyerahan jabatan guru besar kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) kepada Megawati Soekarnoputri.

Jadi, ada yang memaknai munculnya dukungan dalam bentuk LBP for RI 1 merupakan dinamika politik dalam negeri yang terkait langsung dengan masa-masa pembentukan dukungan nyata dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa pihaknya tidak tidak berkeberatan, malah akan menambah semarak demokrasi. "Ini akan makin baik jika banyak calon yang muncul berkompetisi di Pilpres," ujar Viva.

Sedangkan Wakil Ketua Umum PPP,

Arsul Sani, juga tidak masalah dengan gerakan sekelompok orang yang ingin memajukan Luhut nyapres. Namun, dia mengingatkan, yang menentukan nasib seseorang di 2024 adalah partai politik. "Kalau ada yang menyuarakan pencalonan Pak LBP, ya itu hal wajar saja. Tapi, pilpres itu tergantung parpol

bangkan publik.

"Dalam catatan IPO, nama Luhut belum diperhitungkan, baik sebagai tokoh mandiri maupun kader partai," ungkap Dedi. Menurut dia, ada dua beban yang bakal dihadapi sekelompok orang apabila memajukan Luhut. Salah satunya terkait tren politik 2024

LBP FOR RI 1

LUHUT BINSAR PANJAITAN

Deklarasi 17 Agustus 2021 di Tugu Proklamasi - Jakarta

Indonesia Harus Mempunyai Pemimpin yang tegas, cepat dan mengerti tentang negara.

itu semua ada di sosok Bapak LUHUT BINSAR PANJAITAN

PEMUDA PERUBAHAN

Koordinator Relawan
Frans : +62 822 11641994

atau koalisi parpol," ungkapnya.

Sementara itu, PSI meminta gerakan-gerakan selain upaya penanganan pandemi dihentikan saja. "Akan lebih baik menahan diri," jelas Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantara.

Nah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurniasyah, menilai, Luhut belum punya potongan capres. Dia tidak dipertim-

yang mengarah pada tokoh baru.

"Selain usia muda, tokoh yang cenderung di 2024 adalah mereka yang belum masuk kategori politisi senior. Elektabilitas generasi baru ini jauh lebih unggul," ujarnya.

Namun sistem dan struktur politik Indonesia tetap mengakui peran pengaruh senioritas. Luhut masih menjadi faktor. •

MANUVER PARA SENIOR

Perbedaan kepentingan di antara elite politik memang sulit terelakkan. Bagaimana menjelang Pilpres 2024 yang mulai beriringan dengan wacana penundaan jadwal?

Perselisihan para elite politik senior mengemuka dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19. Semakin tegas saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung memimpin komando penanganan bencana. Namun, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan justru menegaskan Presiden Jokowi merupakan panglima tertinggi dalam penanganan Covid-19.

Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami Baguna DPP PDIP yang disiarkan virtual, Rabu, 4 Agustus 2021. "Jadi siapakah yang memberikan komando, nah ini saya

pernah tanya sama Pak Jokowi, siapakah kalau dalam keadaan yang saya sebut tanggap darurat, bukan tanggap normal, siapakah yang memberikan komando? Saya ndak tahu apakah dari bupati kah? Atau gubernur kah? Langsung bleg-bleg-bleg, begitu," kata Megawati.

Megawati mengatakan seharusnya Presiden Jokowi memegang komando langsung saat bencana melanda. "Ya saya bilang pada Pak Presiden bapak lah yang namanya kepala negara Presiden Republik Indonesia yang harus langsung, karena ini persoalannya extraordinary," ujar Megawati.

Ia juga menyinggung pemegang komando penanganan pandemi COVID-19. Megawati melihat saat ini Satgas



dibantu TNI-Polri dan BIN.

"Saya juga ini mulai pengen ngo-mong sama Pak Jokowi. Iki piye toh Pak, saya sendiri... tahu, siapakah yang harus pegang komando seperti sekarang kan, satgas pandemi, ada satgasnya. Seharusnya itu kan yang deg begitu, dibantu sama TNI-Polisi saya lihat loh ini sama BIN, itu gotong royong kita," ujar Megawati.

Mega pun merasa heran banyak pemangku kepentingan di daerah-daerah yang justru tak mengetahui siapa komando utama ketika menangani bencana. "Tapi ini kelemahan kita. Ketika kejadian [bencana] dak dak dak. Terjadi pelumpuhan. Seperti di Palu. Saya langsung ikutin terjun. Saya tanya siapa komandonya? Ga ada yg bisa jawab saat itu," kata Mega.

Toh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi dalam penanganan Covid-19. Luhut menyebut dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah.

Dalam konteks ini, Luhut adalah pengendali PPKM Jawa dan Bali. Se-

dangkan kendali wilayah Luar Jawa-Bali dipegang oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

"Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena presiden menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga," kata Luhut dalam konferensi pers pengumuman perpanjangan PPKM, Senin, 9 Agustus 2021.

Luhut menjelaskan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi. "Penanganan di luar Jawa-Bali tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan Jawa-Bali karena tantangan di luar Jawa-Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa-Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di

Indonesia," ujar Luhut.

Toh dalam pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, tampak bahwa sosok Luhut Binsar Pandjaitan dinilai lebih memiliki kendali atas Presiden Joko Widodo, dibandingkan Megawati Soekarnoputri yang sejatinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Yang terjadi, kata Dedi, Presiden Jokowi hingga saat ini justru belum mengambil alih penanganan pandemi. Sebagai orang nomor satu di Indonesia, dia malah mempercayakan Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat dan Level 4 untuk Jawa-Bali. "Melihat porsi kuasa Luhut dalam periode kedua ini, tidak berlebihan jika ada tafsir ia lebih berpengaruh dibanding Megawati," kata Dedi Kurnia, Jumat, 6 Agustus 2021.

Dedi mengungkapkan, pos-pos strategis penanganan Covid-19 di Indonesia kebanyakan juga diisi bukan berasal dari kader PDI Perjuangan. Makanya, hubungan antara Megawati dan Jokowi tampak semakin renggang. Oleh sebab itu tidak heran apabila Megawati memberi kritik cukup



keras terkait penanganan pandemi.

"Pilihan Jokowi pada Luhut atau Air-
langga berpeluang membuat hubung-
an Jokowi dengan PDIP merenggang,
dan Megawati berusaha untuk memi-
nimalkan peran Luhut," kata Dedi.

Sebelumnya, pengamat politik
Salim Said pernah mengemukakan
adanya usaha keras Presiden Jokowi
mempertahankan Luhut Binsar Pan-
djaitan di jajaran kabinetnya selama
dua periode. Padahal Megawati yang
partainya mendukung Jokowi dalam
Pilpres 2019 lalu, memiliki hubungan

lalu. Karena tidak disetujui Megawati,
dibikin akal lahirlah Kepala Staf Kepres-
idenan Republik Indonesia yang seka-
rang diduduki oleh Moeldoko," lanjut
Salim Said.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Uni-
versitas Pertahanan ini, Jokowi sangat
lihai memainkan strateginya dalam
mempertahankan Luhut di kursi kabi-
netnya. Dengan demikian, menanda-
kan bahwa di mata pemerintahan
Jokowi, sosok Luhut merupakan to-
koh penting yang sangat disegani.

"Itu taktiknya, makanya saya bilang

Maritim, Rizal Ramli, mengungkapkan,
ketegangan antara Luhut dengan
Megawati sudah terjalin lama, tepatnya
ketika Gus Dur menjabat sebagai pre-
siden.

Selain itu, ia menyebut bahwa Me-
gawati juga tak menyukai mantan
Menteri Badan Usaha Milik Negara,
Rini Suwandi. "Dari awal Mega itu san-
gat tidak suka dengan Rini Suwandi
dan Luhut Pandjaitan. Seperti Luhut
mau ketemu Megawati sejak zaman
akhir Gus Dur sampai hari ini tak per-
nah bisa," jelas Rizal Ramli.



buruk dengan sosok Luhut yang kini
menjabat sebagai Menko Marines.

"Tapi, satu hal yang tidak bisa di-
lakukan dan dipaksakan kepada
Jokowi adalah Luhut Pandjaitan,"
kata Salim Said dalam sebuah diskusi
online di saluran Youtube Hersubeno
bertajuk 'Negara ini Dikuasai Kumpu-
lan Oligarki'.

"Megawati tidak suka sama dia
(Luhut). Itu sebabnya, Jokowi punya
akal, tadinya kan mau dijadikan men-
teri pada kabinet pertama di masa

Jokowi itu lihai juga, perlahan-lahan
dia pindahkan Luhut menjadi Menko
(Menteri Koordinator Bidang Kemari-
tman) kemudian Menko lagi ditambah
lagi bebannya dengan investasi (Men-
teri Koordinator Bidang Kemaritman
dan Investasi Indonesia). Artinya ini
orang penting betul sehingga Jokowi
tidak mau melepaskan meskipun Ibu
Mega tidak senang dengan Luhut,"
ujarnya.

Senada dengan hal itu, pakar
ekonomi yang pernah menjadi Menko

Mantan menteri keuangan era
Gus Dur ini menceritakan bagaimana
Megawati kerap ikut campur terkait
hubungan Jokowi dengan kedua to-
koh tersebut. "Jadi ketika Megawati
katakan 'Jokowi ingat kamu tugas par-
tai', itu maksudnya jangan dengerin
Rini Suwandi, jangan dengerin Luhut
Pandjaitan. Sebetulnya maksudnya
itu," tuturnya.

Terlebih ketika Pemilihan Presiden
2019 silam, kata Rizal Ramli, kala itu
posisi wakil presiden hampir saja diisi

oleh Mahfud MD yang merupakan usulan dari Luhut. Namun karena menimbang kepentingan partai dan usulan dari Megawati, akhirnya terjadi pergantian calon wakil presiden menjadi Maruf Amin.

"Ketika Pak Mahfud mau jadi wakil presiden sponsor utamanya Pak Luhut. Dari kaca mata Megawati Luhut sudah berkuasa di kantung kanannya ada presiden, mau nambah wakil presiden gitu, makanya terjadilah pergeseran ini," ujarnya.

Nah, kini kompleksitas pandemi Covid-19 dan masa-masa menjelang Pilpres 2024 sangat boleh jadi akan meningkatkan suhu politik di antara

untuk menyejajarkan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Syarief lantas menanyakan sikap Presiden perihal itu.

"Kalau Presiden sendiri, saya tahu Pak Presiden sendiri tidak setuju, tapi itu kan beberapa tahun yang lalu, nah kalau sekarang bagaimana? Karena kan yang kami takutkan nanti melebar," ujarnya.

Menurut Syarief, Presiden Jokowi menyampaikan amandemen UUD 1945 merupakan domain MPR dan Presiden tak mencampuri hal tersebut. Secara implisit, ujarnya, Presiden mengamini ada kemungkinan agenda perubahan konstitusi melebar ke per-

kondisinya unpredictable sampai hari ini," kata Jazilul.

Ia mengatakan akan muncul masalah ketatanegaraan jika varian Delta kembali melonjak saat pilpres berlangsung. Sehingga harus dicari solusi jika kemungkinan itu terjadi.

"Oleh sebab itu tentu ada problem ketatanegaraan kalau ternyata misalkan pada jadwal yang ditentukan KPU itu kira-kira Februari 2024 ternyata varian Delta main lagi, otomatis semua ditutup termasuk TPS. Kalau kejadian seperti ini, maka politisi harus berkumpul mencari jalan," kata Wake-tum PKB ini.

Menurut dia, segala kemungkinan

“
Megawati menga-
takan seharusnya
Presiden Jokowi
memegang koman-
do langsung saat
bencana melanda.

para politisi senior yang masing-masing bermanuver. Presiden Jokowi tak mungkin lepas dari pusaran itu, sebagaimana terjadi dalam pertemuan sembilan pimpinan MPR dengan Presiden untuk membahas persiapan sidang tahunan MPR 16 Agustus 2021.

Dalam pertemuan rutin tahunan kali ini, Pimpinan MPR sempat menanyakan ihwal perpanjangan masa jabatan presiden. Salah satu yang melontarkan pertanyaan itu ialah Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan. Terlebih saat ini ada masukan untuk menempatkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) ini ke dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Syarief, jika amandemen itu dilakukan, MPR menyadari ada kemungkinan pembahasan akan melebar. Misalnya, kata dia, ada pandangan agar amandemen sekaligus mengubah masa jabatan presiden, periodisasi presiden, hingga usulan



soalan lainnya.

"Jadi Presiden setuju apa yang saya sampaikan bahwa kemungkinan ada yang melebar. Presiden kembalikan jangankan sampai melebar. "Kalau saya tidak, dari pemerintah tidak mencampuri hal itu. Itu domain MPR", kata Syarief.

Sedangkan Wakil Ketua MPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengungkapkan, pertanyaan itu relevan karena saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung dan dapat mengganggu jadwal Pemilu maupun Pilpres. "Nah ini yang jadi tanda tanya kita semua, termasuk Pak Syarief (Hasan). Jadi kalau keadaan seperti ini jangan TPS, masjid saja ditutup. Kondisinya seperti ini, ya, tentu

harus dipikirkan sejak saat ini termasuk penundaan jadwal Pilpres. Namun, ia berharap corona dapat selesai secepat mungkin agar jadwal berjalan sesuai rencana.

"Mulai sekarang dipikirkan namanya juga membuat arah ke depan. Kita berharap sekuat tenaga kita semua mudah-mudahan selesai di tahun 2021. Dulu bilangnyanya, kan, Juli [selesai], ternyata Juli malah nanjak. Kita hanya mencari jalan saja semoga segera berlalu," tandasnya.

Dari berbagai kemungkinan-kemungkinan itulah muncul manuver para politisi senior. Implikasinya, pentas politik justru akan semakin ramai jika Covid-19 belum selesai. ●



FOTO-FOTO: REPRO

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, saat melakukan rapat koordinasi dengan lima menteri Kabinet Indonesia Maju di Command Center Kantor Gubernur.

LIMA MENTERI KERoyok PEMBANGUNAN TANJUNG CARAT

► HD Minta Dijadikan Proyek Super Prioritas

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengharapkan pemerintah pusat agar dapat memasukkan proyek pembangunan infrastruktur di Bumi Sriwijaya menjadi proyek super prioritas, utamanya dalam percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin.

Harapan tersebut diungkapkan Herman saat mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Sumsel bersama lima menteri Kabinet Indonesia Maju secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, Senin (9/8/2021).

Rakor itu sendiri dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Empat menteri lain yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri

Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Selain itu, juga dihadiri bupati dan wali kota di Sumsel.

"Provinsi Sumselingin ada super prioritas dan prioritas utamanya dalam percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat agar selesai tepat waktu," ungkap pria yang biasa disapa HD ini.

Selain menyampaikan harapan

di depan menteri, HD juga meminta agar Komisi IV dan Komisi V DPR terus mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang merupakan program pembangunan super prioritas Sumsel.

"Pemindahan Pelabuhan Boom Baru ke Pelabuhan Tanjung Carat beserta pernak-perniknya itu merupakan program super prioritas Sumsel. Keberadaan pelabuhan ini akan berdampak besar bagi komoditas hasil Sumsel, baik sektor minerba maupun



pertanian dan perkebunan. Untuk itu, saya minta anggota DPR ini mendorong hal itu," kata HD dalam rapat kerja bersama Komisi V dan Komisi IV DPR di ruang rapat Gubernur, Selasa (10/8/2021).

Dia mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan setelah beberapa kali melakukan rapat dengan kementerian terkait, groundbreaking pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat rencananya akan dilakukan pada November 2021 mendatang.

"Kami terus ulas soal Tanjung Carat ini dalam beberapa kali kesempatan. Rencananya akan dimulai November 2021. Pembangunan ini harus on schedule," tuturnya.

HD menyebut, pemerintah telah merencanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Tanjung Api-Api beberapa tahun yang lalu. Tentunya, KEK tersebut harus didukung dengan ada pelabuhan laut.

"Rencana KEK ini disambut gembara dunia industri. Namun, seberapa jauh pun KEK ini juga harus didukung adanya pelabuhan laut, sehingga kegiatan ekspor impor akan semakin maksimal," paparnya.

HD mengaku pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tersebut tidak akan menemui titik terang tanpa adanya dukungan dari Anggota Komisi V dan Komisi IV DPR. Sejak awal, rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tersebut, Komisi V dan Komisi IV terus menyuarakan dukungannya.

"Baik secara spontan maupun khusus, Komisi V dan Komisi IV DPR terus mendukung pembangunan Tanjung Carat ini, karena pelabuhan ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat," terangnya.

Selain membahas pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, HD juga meminta agar Komisi V dan Komisi IV DPR mendorong Kementerian Perhubungan agar menyediakan kantong parkir di kawasan stasiun LRT di Palembang. Hal itu agar keberadaan LRT dimanfaatkan masyarakat sekaligus mengurangi

kemacetan di Palembang.

HD juga meminta agar Dana Alokasi Khusus (DAK) Perkantoran kembali dialokasikan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar perkantoran yang ada di kabupaten pemekaran di Sumsel bisa berkembang. Selain itu, juga memberikan status di 13 ribu kilometer jalan warisan transmigrasi di sejumlah desa di Sumsel agar dapat dikembangkan.

Proyek infrastruktur lain yang disampaikan di depan anggota dewan adalah penataan kawasan Sungai Musi, pembangunan flyover jalur kereta api di Muara Enim dan Kota Martapura Kabupaten OKU Timur, rencana pembangunan kolam retensi di Jalan Soekarno Hatta Palembang, dan mangkraknya pembangunan tol Palembang Betung yang kini baru sekitar 18 persen. Padahal, tol tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2023 mendatang.

Anggota Komisi V DPR, Eddy Santa Putra, mengatakan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat memang merupakan prioritas pihaknya. Karena itu, berbagai upaya dilakukan agar impian itu dapat terealisasi.

"Saya sebagai putra daerah tentu

sangat mendukung. Ini akan meningkatkan ekonomi Sumsel. Sejak awal kami terus menyuarakan program pembangunan infrastruktur di Sumsel ini," kata Eddy.

Dia juga menegaskan, pembangunan tersebut akan dilakukan pada November 2021 mendatang.

"Ini tentu hal yang menggembirakan. Mudah-mudahan pembangunan ini berjalan sesuai rencana," tuturnya.

Dia menyatakan, jika nanti dalam pembangunannya terjadi kendala keuangan, maka hal itu dapat diatasi dengan melakukan penawaran bersama pihak swasta.

"Kita gunakan APBN dalam pembangunannya. Jika nantinya ada hambatan, kita juga dapat kerja sama dengan swasta," bebernya.

Tidak hanya itu, dia juga akan kembali mendorong pembangunan jalan tol Tanjung Api-Api sebagai akses menuju pelabuhan tersebut.

"Sebelumnya memang ada rencana pembangunan tol tersebut. Ini akan kami dorong kembali sehingga keberadaan pelabuhan ini maksimal," ujarnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menuturkan, persetujuan dari Kementerian Keuangan atas permohonan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat.

"Lokasi Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat terletak di Desa Margasungang, Sungsang 1 dan Sungsang 2. Telah ditunjuk konsultan penyusun Basic Design Pelabuhan New Palembang," tegas Menhub.

Dalam rakor tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan ada lima pembahasan dalam Rakor tersebut, antara lain jalan tol, konektivitas, migas, sumber daya alam dan pengembangan ekonomi kawasan.





Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan



Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian



Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono



Anggota Komisi V DPR Eddy Santana Putra

Pengamat Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang, Sulbahri Madjir, sebelumnya mengatakan, jika Pelabuhan Tanjung Carat terealisasi tentu akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel. l

"Sangat bagus kalau Sumsel punya pelabuhan sendiri. Selama ini kan lewat Lampung. Dengan adanya pelabuhan sendiri nanti akan memudahkan arus ekspor dan impor barang dari Sumsel," ujar Sulbahri dikutip dari infosumsel.id, kemarin.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang ini, menyarankan untuk menyambut Pelabuhan Tanjung Carat agar pemerintah

daerah menyiapkan hilirisasi industri, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dari Sumsel sebelum di ekspor melalui pelabuhan tersebut.

"Pelabuhan ini kan untuk arus keluar masuk barang, nah sebaiknya ada hilirisasi industri, sehingga barang yang diekspor itu ada nilai tambahnya, karena itu pentingnya hilirisasi industri. Kita tidak bisa ekspor bahan baku saja," ujarnya. l

Dengan banyaknya komoditas andalan di Sumsel, dia menilai sudah seharusnya hilirisasi industri dijalankan. Selain untuk menambah nilai ekspor, hilirisasi industri komoditas Sumsel juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Sumsel.

"Contohnya karet. Di Muba itu kan

jadi aspal karet, hilirisasi industri seperti ini yang harus diperhatikan. Karena Sumsel ini kan banyak komoditas yang harus diolah sebelum diekspor ke luar negeri," tukasnya.

Sulbahri mengatakan, dengan adanya Pelabuhan Tanjung Carat diyakininya iklim investasi di Sumsel akan membaik. Pelabuhan Tanjung Carat sebagai faktor pendukung investor untuk berinvestasi di Sumsel. Tinggal bagaimana pemerintah daerah memudahkan para investor untuk berinvestasi.

"Faktor pendukungnya sudah ada pelabuhan, tinggal faktor penariknya, jangan sampai birokrasi yang ribet dan berbelit-belit, sehingga membuat investor enggan berinvestasi," pungkasnya. ●

IZIN DIPERMUDAH, EKONOMI MAKIN BERGAIRAH

Kementerian Investasi terus berinovasi untuk mempermudah investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Salah satu yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau OSS Risk Based Management (RBA).

OSS RBA ini merupakan portal satu pintu perizinan investasi, sehingga investor tidak perlu repot-repot lagi mengajukan perizinan ke banyak pihak.

Peluncuran OSS RBA ini dihadiri langsung Presiden Joko Widodo di Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi, Kementerian Investasi. Presiden berharap hadirnya OSS RBA tersebut akan memudahkan para investor untuk menjalankan usahanya di Indonesia.

"Hari ini kita meluncurkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko," ujar Presiden.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengatakan, OSS RBA merupakan aplikasi satu pintu perizinan yang mencakup perizinan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga (K/L), dan Kementerian Investasi.

"Satu aplikasi lingkup kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga, aplikasi pusat Kementerian Investasi sebagai terminal yang akan menghubungkan, hardware kita pasang," kata Bahlil.

Bahlil menerangkan, OSS Berbasis Risiko membagi tingkat perizinan menjadi tiga level, yakni rendah, sedang dan tinggi. Karena itu, setiap level mempunyai syarat yang berbeda-beda.

Khusus untuk usaha berisiko tinggi akan mengacu pada pedoman Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur teknis perizinan. Dalam hal ini, Bahlil mengatakan, OSS RBA memberikan waktu paling lama 20 hari.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, menyambut baik diluncurkannya OSS RBA sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor.

"Kepastian hukum bidang perizinan paku geliat ekonomi masyarakat. Sebaliknya, menahan izin sama dengan menahan penciptaan lapangan pekerjaan, menahan izin sama dengan menahan kemudahan berusaha kita," kata Mawardi saat menghadiri peluncuran OSS RBA secara virtual di Ruang Command Center Kantor Gubernur, Senin (9/8/2021).

Yusuf Sop-
Nusantara,
dialog
den-

ian dari CV Inti Sarana
Karawang, yang ber-
langsung
g a n

Presiden Jokowi terkait kemudahan perizinan dengan OSS RBA ini, mengaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukannya.

"Yang pasti ini mempermudah kami bagi para pelaku UMKM, di mana perizinan-perizinan itu lebih sederhana, tidak harus pakai perantara," ujar Yusuf Sopian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, pertumbuhan ekonomi di Bumi Sriwijaya pada kuartal II/2021 tercatat tumbuh 5,71 persen disbanding periode yang sama tahun lalu.

Kepala BPS Sumsel, Zulkipli, mengatakan, terdapat dua faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Sumsel pada periode tersebut ada di angka positif.

"Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini, di samping adanya perbaikan ekonomi, juga karena memang kondisi pada kuartal II/2020 kontraksinya cukup tinggi," katanya, Kamis (5/8/2021).

Sumsel pada kuartal II/2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,58 persen. Angka minus tersebut merupakan yang paling dalam sepanjang tiga tahun terakhir lantaran pandemi COVID-19.

Zulkipli mengatakan, perbaikan ekonomi juga terjadi jika dibandingkan dengan kuartal I/2021, di mana tercatat masih minus 0,40 persen.

"Jika dibandingkan triwulan I/2021, pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 4,35 persen," katanya.

Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2021 tersebut juga membuat Sumsel keluar dari resesi setelah empat periode berturut-turut terkontraksi.

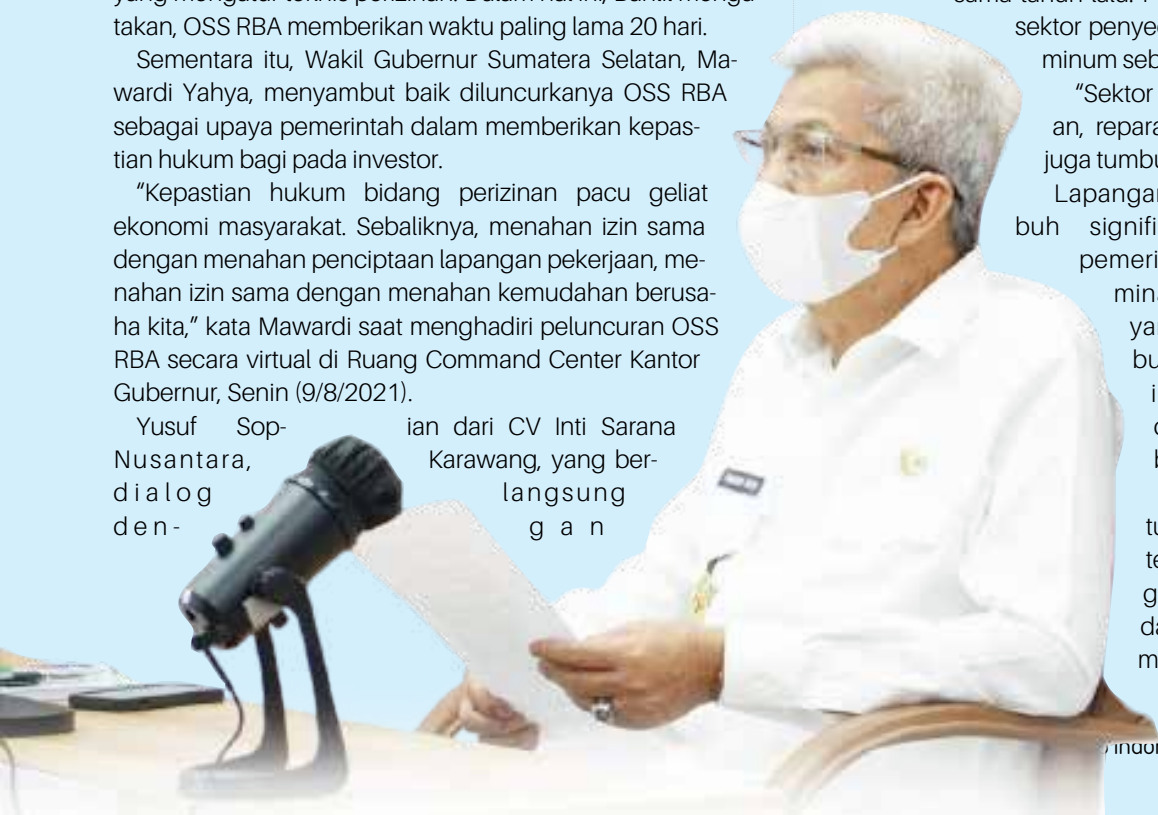
Zulkipli menjelaskan, perbaikan ekonomi Sumsel pada kuartal II/2021 tercatat didukung oleh moncernya kinerja hampir semua lapangan usaha dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tertinggi dialami sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 19,40 persen.

"Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga tumbuh 12,75 persen," terangnya.

Lapangan usaha lainnya yang tumbuh signifikan adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sementara yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Sumsel tertinggi kuartal I/2021 masih dipegang sektor pertambangan dan penggalian.

Zulkipli mengatakan, pertumbuhan lapangan usaha tersebut juga sejalan dengan komponen pengeluaran dalam struktur pendapatan domestik regional bruto (PDRB)

Sumsel yang meningkat. •





HERMAN DERU LEPAS KEBERANGKATAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN SENILAI RP138 MILIAR KE 11 NEGARA

► Hadiri Pelepasan Ekspor Komoditas Pertanian Oleh Presiden

Sebagai salah satu daerah pertanian di Indonesia, provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ambil bagian melakukan ekspor produk-produk hasil pertanian ke sejumlah negara dalam program Merdeka Ekspor yang digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dimana Sumsel, melakukan ekspor produk pertanian senilai Rp138 milyar ke 11 negara di dunia melalui pelabuhan Boom Baru Palembang, Sabtu (14/8).

"Yang kita ekspor bukan produk pertanian yang masih mentah, tapi produk pertanian yang sudah dibuat produk turunannya dalam bentuk jadi dan bisa dijadikan bahan baku untuk pembuatan produk lainnya. Seperti karet, sawit, kopi dan lainnya yang kita ekspor," kata Herman Deru.

Dia mengungkapkan, perkembangan komoditas pertanian tersebut tak lepas dari peran para petani yang terus

semangat kendati di tengah pandemi covid-19 saat ini.

"Tentu kita apresiasi juga bupati dan walikota yang telah menumbuhkan kebangkitan semangat para petani karena di saat pandemi ini, kerja kolaborasi ini membuat ekonomi Sumsel tetap bisa tumbuh. Hal ini karena sektor pertanian ini," terangnya.

Bahkan, dia menyebut, ekonomi di Sumsel saat ini tumbuh di atas rata-rata provinsi lainnya.

"Ini karena kita tetap produktif. Komoditas pertanian di Sumsel ini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Dia meminta, semua pihak termasuk

para petani, untuk terus semangat dan menjadikan ekspor tersebut sebagai acuan untuk mengembangkan komoditas pertanian.

"Kita tidak boleh langsung merasa puas. Komoditas pertanian ini harus terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga pertanian ini menjadi icon Sumsel," ujarnya.

Termasuk dalam menghadapi permasalahan di sektor pertanian. Dimana persoalan teknologi menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi para petani.

"Beri pendampingan kepada para petani, sehingga teknologi yang ada dapat dimanfaatkan untuk mengem-



bangkam hasil pertanian," imbuhnya.

Tidak hanya itu, dia juga mendorong tumbuhnya komoditas pertanian yang saat ini tengah diminati seperti porang.

"Porang juga bisa dikembangkan. Kabupaten Banyuasin salah satu daerah yang saat ini tengah serius mengembangkannya. Beri kepercayaan kepada para petani. Petani ini akan semakin semangat jika produk pertanian yang mereka tanam ada pasarnya," tuturnya.

Selain itu, agar komoditas hasil pertanian di Sumsel dapat langsung di ekspor ke negara luar dia meminta kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan pelabuhan laut Tanjung Carat.

"Saat ini, komoditas yang kita ekspor transit di Belawan. Sebab itu, saya terus meminta agar pembangunan pelabuhan laut Tanjung Carat segera dilakukan. Janji pemerintah pusat, groundbreaking akan dilakukan pada November 2021 nanti," bebernya.

Dia menargetkan, dengan keberadaan pelabuhan Tanjung Carat tersebut, makan Sumsel dapat memiliki gerbang ekspor untuk komoditas pertaniannya.

"Persoalan sudah tidak ada lagi, tinggal pembangunannya saja. Target kita, ekspor pertanian di Sumsel, gerbangnya ada di Sumsel. Termasuk untuk

ekspor kopi yang memang jadi andalan kita," paparnya.

Diketahui, dalam program Merdeka Ekspor ini, Presiden RI Joko Widodo melepas ekspor produk-produk pertanian senilai Rp 7,29 triliun dari 17 pintu pelabuhan dan bandara di 17 provinsi di Indonesia secara virtual.

Dia juga mengapresiasi para petani, peternak, pekebun, pelaku usaha agribisnis, dan pemaku kepentingan

pertanian yang selama masa pandemi telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan berhasil meningkatkan ekspor produk-produk pertanian di dalam negeri.

"Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi. Ekspor pertanian di tahun 2020 mencapai Rp 451,8 triliun naik 15,79% dibandingkan tahun 2019 yang angkanya Rp 390,16 triliun. ●



WAGUB MAWARDI YAHYA : PERUBAHAN RPJMD PERCEPAT TERWUJUDNYA SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

► Pemprov Sumsel Gelar Musrenbang RPJMD Tahun 2019-2023

Wakil Gubernur Sumsel Ir. H. Mawardi Yahya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel tahun 2019-2023 secara virtual di Command Center Kantor Gubernur.

Dalam sambutannya, Mawardi mengatakan, pembangunan Sumsel harus direncanakan dan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi, tepat sasaran dan tepat lokasi.

"Pembangunan Sumsel bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat," ujarnya.

Karena itu pihaknya memerlukan masukan dari seluruh stakeholder, baik yang hadir saat ini maupun yang belum berkesempatan hadir, untuk lebih sempurnanya RPJMD Provinsi Sumsel.

"Perubahan RPJMD ini untuk mempercepat terwujudnya cita-cita Sumsel Maju untuk Semua," tambahnya.

Mawardi menilai, Musrenbang Perubahan RPJMD ini sangat penting, karena pada saat ini lah bisa merumuskan kembali strategi pasca pandemi Covid-19.

"Dengan cara melakukan penyesuaian makro ekonomi dan keuangan daerah, program strategis daerah dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumsel tahun 2019 - 2023," ucapnya.

Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terpenuhinya beberapa syarat. Pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri.

Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.





Ketiga, terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

"Perjalanan pembangunan di Provinsi Sumsel beberapa tahun terakhir sangatlah dinamis disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya pandemi Covid-19 dan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan terbaru yang dikeluarkan pemerintah," ucapnya.

Dia menambahkan, berbagai perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan secara nasional sehingga turut melatarbelakangi perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumsel tahun 2019-2023.

"Rancangan Perubahan RPJMD yang kita bahas dalam Musrenbang ini telah memperhatikan beberapa poin penting, seperti menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah," terangnya.

Serta turut memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi dalam dua tahun terakhir sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan.

"Memberikan perhatian lebih terha-

dap pemerataan pembangunan di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel dan memperhatikan beberapa regulasi terbaru," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr Hari Nur Cahaya Murni, M.Si mengatakan, Musrenbang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal perubahan RPJMD.

"Perubahan rancangan RPJMD di-

laksanakan dalam rangka menyepakati tujuan sasaran, strategi arah kebijakan, dan program pembangunan daerah," ungkap Dr Hari Nur Cahaya Murni secara virtual dalam sambutannya.

Turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Dr Ir H Firmansyah, M.Sc dan para Kepala Bappeda Kabupaten/kota di se-Sumsel, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan instansi vertikal, BUMN, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat. ●





SEMANGAT HARI KEMERDEKAAN MENJADI MOTIVASI BANGKITNYA SUMSEL DARI PANDEMI

► Gubernur Herman Deru Irup Upacara HUT RI Ke 76

Meski masih dalam suasana pandemi Covid 19, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-76 tahun 2021 di lingkungan Pemprov Sumsel berlangsung khidmat dan lancar. Dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat peringatan detik-detik proklamasi yang dipusatkan di Griya Agung Palembang, Selasa (17/8) dipimpin Gubernur Sumsel H. Herman Deru sebagai Inspektur Upacara.

Peringatan HUT Proklamasi itu dimulai dengan pengibaran sang saka merah putih oleh pasukan pengibar bendera Provinsi Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati.

Adapun yang bertindak selaku Komandan Upacara adalah Letnan Kolonel Infanteri Andi Irawan, S.H. Lahir di Jakarta pada 26 Januari 1980

dengan jabatan sehari-hari sebagai Komandan Batalyon Infanteri Raider 200/Bhakti Negara Kodam II Sriwijaya.

Sementara itu petugas pengibar bendera masing-masing yakni I Nyoman Ananta Sumanta pelajar asal SMAN 1 Belitang, M. Ally Rega pelajar asal SMAN 2 OKU, serta Itto Bayhaqi asal SMAN 3 Kota Pagaralam. Sedangkan pembawa baki adalah Ghefira Nur Fatimah asal SMAN 2 OKU.

Usai upacara peringatan hari Ke-

merdeka RI ke-76, Gubernur Sumsel H. Herman Deru melalui Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya (HDMY) mengatakan, semangat hari kemerdekaan ini hendaknya menjadi motivasi bersama untuk segera bangkit dan lepas dari Pandemi Covid.

“Untuk itu mari kita bersama menjalankan apa yang menjadi arahan pemerintah yakni menjalankan PPKM dengan sebaik-baiknya. Serta menjaga kedisiplinan dalam menerapkan

proses,” ujar Mawardi.

Menurut Mawardi motivasi ini perlu digerakkan secara bersama dengan kekompakan. Sehingga Sumsel bisa segera lepas dari Covid dan beraktivitas seperti sediakala.

Untuk itu ia mengajak semua masyarakat mentaati anjuran Presiden untuk menjalankan PPKM serta mengubah beberapa kebiasaan untuk kepentingan bersama. Seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan dan selalu disiplin mengenakan masker.

“Ini adalah tahun kedua kita memperingati HUT Kemerdekaan dalam suasana pandemi. Semoga semangat ini menjadikan kita lebih kuat dan tangguh,” tambah Mawardi.

Dalam kesempatan itu Mawardi juga tak lupa mengapresiasi pasukan pengibar bendera Provinsi Sumsel yang sukses melaksanakan tugasnya.

“Selamat kepada adik-adik, meski dalam suasana pandemi mereka tetap semangat menjalankan tugasnya dengan baik. Ini luar biasa sekali,” ujar Mawardi.

Usai digelar upacara di halaman Griya Agung, sekitar pukul 10.00 Wib Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya dan Forkopimda Sumsel

menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-76 tahun 2021 yang digelar di istana negara Jakarta secara virtual dengan irup Presiden RI Joko Widodo.

“Upacara yang kita lakukan ini baik secara langsung maupun virtual berjalan dengan baik. Meski di tengah pandemi covid-19 ini, kita masih tetap bisa melaksanakannya,” kata Mawardi, usai upacara tersebut.

Hadir dalam kesempatan tersebut

Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Kajati Sumsel Drs M Rum, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Dr. H. Kresna Menon SH. M.Hum, Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji S.I.P., S.Sos. Danlanal Palembang

Kolonel Laut (P) Filda Malari, Danlanud SMH Palembang Kolonel Pnb Hermawan Widhiyanto, S.E., M.M, Plh Sekda Provinsi Sumsel Dr. H. Akhmad Najib, SH, M.Hum dan sejumlah kepala instansi lainnya serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. •





SUMBER KABOHIDRAT IBU KOTA NEGARA

► Momen Kemerdekaan, Kukar Siapkan 7.600 Hektare Lahan Pertanian Modern

Pertanian menjadi salah satu sektor utama yang disusun Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Hal ini dilakukan demi menjadikan kabupaten tersebut sumber pangan atau kabohidrat baru di Bumi Etam

RPJMD 2021-2026 telah disampaikan kepada DPRD Kukar, pada Senin (16/8/2021). Rencana program prioritas itu pun telah disetujui, bersama empat sektor lainnya, yakni kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan pembangunan infrastruktur.

"Itu yang menjadi titik prioritas kita," jelas Edi saat diwawancarai awak media.

Ia pun berharap, agar seluruh jajaran di Pemkab Kukar, dan seluruh masyarakat, turut mengawal rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh DPRD.

"Nanti teman-teman silakan kawal sama-sama, karena itu akan dimulai pada tahun 2022," pesan Edi kepada para wartawan.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan, berdasarkan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan berbahagia, ada 23 dedikasi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Lima di antara, menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Sebagai komitmen

mengembangkan pertanian sebagai program prioritas, dalam momen Kemerdekaan RI ke-76 ini, Pemkab Kukar juga telah menyiapkan lahan seluas 7.600 hektare untuk diolah oleh masyarakat untuk pertanian.

"Target Kukar 7.600 hektare merdeka lahan pangan," ucap Edi Damansyah.

Edi mengatakan, program pembukaan ribuan lahan tersebut sejalan dengan program budidaya dan kerja sama pembelian jagung pipil kering.

"Kita memulai dari jagung Heprida (pipil). Jagung di Kukar perlakuannya mudah dan spesifikasi. Ibaratnya, di-hambur saja tumbuh, karena tanah subur. Selain itu pasarnya jelas. Ini juga bagian dari program pengen-

tan. Dan juga peningkatan pekerjaan ya dalam j e -
n a n .
program lapangan khusus-pertanian,"
lasnya.

E d i



Bupati Kukar, Edi Damansyah memperlihatkan hasil jagung yang ditanam di Kabupaten Kukar.



Bupati Kukar, Edi Damansyah (tiga kiri) didampingi Wakil Bupati, Rendi Solihin (tiga kanan) sewaktu panen raya padi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa pada 16 Maret 2021.

berharap dengan dibukanya lahan, akan menjadikan Kukar sebagai sumber pangan untuk menyokong Ibu Kota Negara (IKN) nantinya. Untuk itu, dia berharap agar anak muda, terutama petani milenial dapat terlibat banyak.

“Mengajak generasi milenial untuk dapat terlibat pada pertanian. Generasi milenial kami harap berada di depan, saat ini 13 persen usia petani banyak yang berusia lanjut,” ujarnya.

Edi menjelaskan, jika pertanian saat ini sudah mulai berkembang tidak seperti dulu. Saat ini telah menggunakan bermacam teknologi modern.

“Pertanian sekarang sudah identik dengan teknologi dan manajemen. Kami akan ajak generasi milenial untuk terlibat di dalam pertanian.”

Dengan adanya perencanaan yang cukup matang tersebut. Edi sangat

“
Mengajak generasi milenial untuk dapat terlibat pada pertanian. Generasi milenial kami harap berada di depan, saat ini 13 persen usia petani banyak yang berusia lanjut.

optimis bahwa dalam dua tahun mendatang dirinya bersama stakeholder terkait mampu menyelesaikan program tersebut.

“Optimasi dengan konsep yang sistematis dan terukur. Karena saya telah mengunjungi kampung-kampung. Target kami selama dua tahun akan terealisasi,” jelas Bupati Kukar yang memberikan keterangan dengan optimis.

Angkat Derajat Petani

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menegaskan, pihaknya akan mendorong sekuat tenaga agar Kukar menjadi pusat pertanian di Kaltim yang maju dan modern. Terutama meningkatkan petani lebih bermartabat.

“Sebab, sejak bangun tidur, hampir segala sesuatu kebutuhan kita itu yang

produksi petani,” kata Muhammad Samsun kepada Info Indonesia.

Bagi anggota legislatif dari dapil Kukar tersebut, peran petani harus sejalan dengan dukungan dari pemerintah. Baik tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.

Untuk itu, selama menjadi wakil rakyat, skala prioritas yang didorong adalah pertanian di Bumi Etam, khususnya di Kukar. “Tidak sewajarnya ada petani kita yang melarat,” ucap dia.

Untuk itu, sejumlah program yang dapat menunjang kesejahteraan petani, terus ia gaungkan. Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, tantangan ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Sehingga generasi muda tertarik dan meregenerasi usia petani.

Serta langkah pemerintah untuk menjaga produktivitas dari sektor pertanian.

“
Pertanian Indonesia
maju, mandiri dan
modern telah me-
masuk era 4.0 yang
ditandai dengan
modernisasi alsin-
tan

Hingga saat ini, kata Samsun, yang ia perjuangkan adalah memberikan stimulus terhadap para petani Kutai Kartanegara. Baik sarana dan prasarana dan fasilitas pertanian. Seperti irigasi, dan jalan usaha tani, yang men-

ingkatkan produksi pertanian.

Samsun juga berencana bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, atau lembaga yang berkomitmen untuk mendukung dan mendorong adanya pelaksanaan program yang dapat menjauhkan petani dari ancaman, dan dapat membantu dan membuat petani semakin sejahtera.

Sokongan Pusat

Modernitas tentu harus sejalan, dengan komitmen. Tanpa terkecuali gerak dari pemerintah pusat. Apalagi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo telah memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada Pemkab Kukar. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di sana.

Menteri yang diakrab disapa SYL tersebut menerangkan, alsintan tak sekadar untuk meningkatkan produk-



Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menunjukkan alsintan yang digunakan untuk pertanian di Indonesia semakin modern.

tivitas saja. Sekaligus mendorong menuju pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern.

"Pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern telah memasuki era 4.0 yang ditandai dengan modernisasi alsintan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil meyakini bahwa kehadiran alsintan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sebab, menurutnya, berbagai macam jenis dan kegunaan alsintan sangat bermanfaat dalam membantu proses budi daya pertanian.

"Misalnya dalam mengolah lahan, alsintan mampu menghemat waktu dan biaya produksi. Sementara saat panen raya, alsintan mampu meningkatkan produktivitas budi daya petani," kata Ali.

Oleh karena itu, Ali berharap, bantuan alsintan dapat dikelola, dimanfaatkan dan dirawat para petani dengan baik. Ali meminta petani mengoptimalkan dan memaksimalkan penggunaan alsintan dengan baik. Sebab, dengan penerapan mekanisasi pertanian, produksi dan produktivitas pertanian ikut meningkat.

"Pengelolaan dan pemanfaatan alsintan dengan baik juga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan petani," ujarnya.

Meningkatnya pendapatan petani, kata dia, diharapkan dapat berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan.

"Tidak kalah penting adalah perawatan dan pemeliharaan alsintan. Perawatan sangat penting, karena dapat membuat alsintan berumur panjang dan kinerjanya lebih maksimal," ujar Ali.

Untuk itu, ia menegaskan, optimalisasi alsintan diperlukan sebagai lang-

kah awal dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian Indonesia.

Utamanya, kata dia, untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pasalnya, mekanisasi pertanian modern mampu meningkatkan produksi padi pada tahun-tahun mendatang.

"Saya berharap, adanya teknologi tidak akan menurunkan produksi. Gunakanlah alat canggih yang ada supaya produksi bisa meningkat. Hal ini sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan ekspor," ucap Ali.

Sementara itu, Direktur Alsintan Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan, alsintan dapat membantu percepatan proses budi daya pertanian.

"Baik itu percepatan olah tanah, percepatan tanam, hingga percepatan panen. Dengan begitu, petani pun bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)," jelasnya. •



Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhamad Samsun (kanan) berbincang dengan petani di Kukar.



PAMAN BIRIN MULAI PIMPIN KALIMANTAN SELATAN

Kotabaru gunungnya bamega
Gubernur baru dilantik di Istana Negara

Pantun kilat yang sampiran-nya berasal dari lirik lagu Paris Barantai, lagu rakyat Kalimantan Selatan, sekaligus memberikan provinsi ini sudah memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik pasangan Sahbirin Noor yang ber juluk Paman Birin dan Muhiddin masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih masa jabatan tahun 2021-2024.

Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 25 Agustus 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih terlebih dahulu menerima petikan Surat Keputusan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya kemudian melakukan prosesi kirab menuju Istana Negara bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Rangkaian acara pelantikan kali ini

juga merupakan tindak lanjut putusan final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi yang mengadili perselisihan hasil pemungutan suara Pilkada di provinsi yang beribu kota di Banjarmasin itu. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima permohonan sengketa hasil Pilkada Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Denny Indrayana (Haji Denny) dan Difriadi.

Sidang putusan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dibacakan dan disiarkan secara daring, Jumat, 30 Juli 2021 lalu. "Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar.

Majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Denny-Difri tidak beralasan menurut hukum ataupun tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh sebab itu, dengan adanya putusan ini MK Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan MK Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021.

Putusan MK juga memerintahkan permohonan yakni KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020. Sebelumnya, MK menggelar sidang perselisihan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel yang diajukan Denny-Difri pada Rabu, 21 Juli 2021.

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon, yakni Bambang Widjojanto, mengungkapkan, proses dan tahapan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan paslon nomor urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin. Pelanggaran tersebut, menurut dia, mencederai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta demokratis.

"Paslon satu melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif di tujuh kecamatan yang melaksanakan PSU," sebagaimana dimuat di laman web resmi MK.

Bambang mengatakan, perolehan

suara yang diperoleh Sahbirin-Muhidin jelas didapatkan dengan mengesampingkan prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta demokratis. Ia menduga tindakan tersebut dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan, KPU Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah setempat.

putan paksa kepada pemilih untuk hadir dan mencoblos paslon 1 di tempat pemungutan suara (TPS). Bambang menambahkan, Bawaslu Kalimantan Selatan juga turut berkontribusi atas tumbuh suburnya tindakan politik uang.

Menurut dia, dalam beberapa pernyataan di media Bawaslu Kalimantan Selatan menyatakan secara terbuka bahwa



Bambang mengatakan, politik uang yang diduga dilakukan oleh Sahbirin-Muhidin bekerja sama dengan oknum kepala desa, Ketua Rukun Tetangga (RT) serta preman. Kepala desa dan RT, kata dia, mendapatkan politik uang berupa gaji bulanan dan menjadi bagian utama strategi politik uang dan kecurangan pada kemenangan Sahbirin-Muhidin.

Paslon 1 melalui timnya juga diduga melakukan ancaman bahkan penjem-

paslon boleh menyebar zakat di wilayah PSU. Ia juga menduga KPU Kalimantan Selatan berpihak kepada Sahbirin-Muhidin dengan mengulur waktu pelantikan KPPS dan masih menggunakan KPPS yang lama.

Selain itu, KPU juga disebut menerbitkan surat edaran syarat memilih yang melanggar UU Pilkada dan menggunakan Sahbirin-Muhidin yang telah melakukan mobilisasi pemilih. Namun,

• INFO DAERAH

dalam putusannya, majelis hakim MK menyatakan perkara Nomor 146/PHP/GUB-XIX/2021 untuk Pilgub Kalsel tidak memiliki kedudukan hukum.

“Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman.

MK juga menyatakan sah Keputusan KPU Provinsi Kalsel Nomor 37/PL02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Pasca Putusan

buah-buahan, barang dagangan dan uang yang dilakukan pihak terkait ke masyarakat secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dapat signifikan menentukan kemenangan pasangan calon petahana nomor urut 1 Pilgub Kalsel.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan sejumlah dalil dari pihak pemohon tidak beralasan secara hukum. Seperti terkait politik uang, MK menilai bukti yang diajukan oleh pemohon tidak memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa pembagian sembako, ikan, sayuran,

han suara pemohon atau pihak terkait secara TSM. “Tidak beralasan menurut hukum,” kata mahkamah.

Selain itu, dalil lainnya seperti Bawaslu Kalsel tidak netral dalam PSU dinilai tidak beralasan secara hukum. Mahkamah menilai Bawaslu Kalsel telah berperan aktif melakukan pengawasan dalam PSU.

Meski begitu, Mahkamah memang menemukan adanya ketidakefektifan Bawaslu Kalsel dalam melakukan pengawasan PSU. “Tetapi itu tidak serta



MK, bertanggal 17 Juni 2021. “Memerintahkan Termohon (KPU Kalsel) menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020,” ucapnya.

Putusan MK ini sesuai pula dengan pemberian keterangan oleh Bawaslu Kalsel terkait tidak cukup pembuktian pembagian sembako, ikan, sayuran,

buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) yang secara signifikan menentukan kemenangan pihak terkait dalam PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Mahkamah menilai walaupun ada pemberian, hal tersebut bersifat sporadis sehingga tidak mempengaruhi perole-

merta menjadi bukti bahwa jajaran Bawaslu telah bertindak tidak netral dan berpihak,” kata mahkamah.

Dalil lainnya, yakni adanya penambahan jumlah pemilih yang dimanfaatkan KPU Kalsel untuk memenangkan Sahbirin-Muhidin dipandang oleh MK hanya sebatas asumsi belaka tanpa didukung bukti-bukti yang terang.

Pertimbangan MK terkait selisih suara

menyatakan, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 persen x 1.702.301 suara total sah sama dengan 25.535 suara. Sementara, perolehan suara pemohon adalah 831.178 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 871.123 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 39.945 suara atau 2,35 persen atau lebih dari 25.535.

Dengan demikian, mahkamah menilai gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur undang-undang. "Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 oleh karena itu menurut mahkamah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo," ucap mahkamah.

Atas sejumlah pertimbangan tersebut, mahkamah menyatakan gugatan PSU yang diajukan oleh Haji Denny tidak diterima. Toh Haji Denny buka suara terkait dengan putusan MK tersebut.

Ia mengemukakan, bahwa benar salah satu pertimbangan MK yakni selisih suara yang diajukan tidak sesuai dengan syarat maksimal yang diatur undang-undang. Sehingga dianggap tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun demikian, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan dalam persidangan tersebut. "Ada hal janggal yang disoroti oleh Tim Hukum H2D tentang bagaimana Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa PSU Pilgub Kalsel," kata Haji Denny dalam keterangannya, Jumat, 30 Juli 2021.

Ia mengatakan, MK memutus pemeriksaan sengketa PSU ini tanpa adanya agenda pembuktian. Padahal, kata dia, agenda ini sangat krusial untuk membuktikan adanya kecurangan. "Sangat krusial untuk memeriksa saksi-saksi yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung kecurangan-kecurangan yang terjadi. Yang menjadi sangat aneh, MK menyatakan benar adanya keterlibatan birokrasi dan ketidakefektifan Bawaslu Kalsel," kata dia.

Haji Denny mempertanyakan bagaima-

mana MK bisa menilai TSM atau tidak tanpa menjalani sidang pembuktian. "Pada pengalaman sengketa Jilid I pun, berbagai kecurangan justru terungkap pada agenda sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi, sehingga MK memutus PSU. Sangat disayangkan pada sengketa Jilid II, agenda tersebut dilewatkan," kata dia.

Namun, Haji Denny juga memohonan maaf dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan, partai pendukung, simpatisan, serta hampir separuh warga Kalimantan Selatan yang telah memilih H2D. "Sejarah akan merekam bahwa masyarakat Kalimantan Selatan pernah melakukan perjuangan politik dengan gigih dan penuh integritas (tanpa politik uang) demi menyelamatkan

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ucap Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan terbatas. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Sahbirin Noor yang berjudul Paman Birin mengungkapkan rasa syukurnya sete-



kan tanah kelahirannya dari kehancuran alam," kata dia.

Akhirnya Haji Denny yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menegaskan, "Kita tidak pernah kalah, kita akan terus melangkah dengan kepala tegak. Karena pemenang sesungguhnya adalah mereka yang mampu bertahan dengan integritas dan kejujuran dalam segala sendi kehidupan, termasuk politik."

Apapun, kini Sahbirin Noor dan Muhiddin secara resmi mengemban tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan setelah diambil sumpah jabatan oleh Kepala Negara. "Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan

lah dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Selatan. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera menjalankan program-program skala prioritas untuk kepentingan rakyat, utamanya dalam menangani pandemi Covid-19.

"Langkah-langkah yang akan kami ambil setelah pelantikan ini tentu saja adalah konsolidasi organisasi, kemudian menjalankan segala program yang sudah ada, dan menyinergikan dengan pemerintah pusat, provinsi tentunya dan kabupaten/kota terlebih khusus di dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Sahbirin Noor.

*Hari hujan bakayuh jukung
Jukung takait di pohon para
Jangan supan jangan tanggung
Pabila kita mambangun nagara.* •



PULIHKAN PESONA PULAU DEWATA

Pulau Dewata menjadi daerah yang paling terpukul akibat pagebluk Corona. Sebelum pandemi, di musim-musim libur panas seperti sekarang ini, biasanya ramai oleh turis. Namun kini sepi, hingga membuat roda perekonomian pun lumpuh.

Bahkan menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pertumbuhan ekonomi terkontraksi sampai minus 12,32 persen pada kuartal III-2020. Walaupun pada kuartal II lalu, mulai membaik mencapai 2,83 persen.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pun mengapresiasi keterlibatan sejumlah pihak untuk memulihkan daerahnya akibat dampak

dari pandemi pandemi COVID-19.

"Terkait upaya penguatan peran akademisi, kami menyambut baik riset kebencanaan dan KKN Tematik yang diselenggarakan BNPB ini," kata Wagub Bali dalam Rakor Penguatan Sistem dan Strategi Percepatan Penanganan COVID-19, di Denpasar, 19 Agustus 2021.

Pihaknya berharap, riset para peneliti dapat menghasilkan masukan dan solusi yang implementatif bagi Bali. Dalam

rakor yang digelar dengan pola hybrid itu, diikuti oleh unsur peneliti dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, BPBD provinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh-tokoh adat.

Mengawali sambutan, Wagub yang biasa disapa Cok Ace itu menyampaikan dalam beberapa hari terakhir telah terjadi tren penurunan penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dari sebelumnya di atas 1.000 kasus per



hari, telah turun menjadi di bawah 1.000 orang.

"Capaian itu tak terlepas dari sinergi yang dibangun pemerintah pusat, BNPB, pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang didukung berbagai elemen masyarakat. Semuanya bahu membahu, bekerja keras dengan semangat tinggi dalam mengendalikan penyebaran COVID-19," ucapnya.

Oleh karena itu, diharapkan tren penurunan kasus COVID-19 ini bisa terus berlanjut sehingga perekonomian Bali bisa segera pulih. "Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, namun juga memorakporandakan perekonomian Bali. Kami berharap border pariwisata bisa dibuka dengan menetapkan skema tertentu yang tak mengabaikan faktor kesehatan," ucap pria yang juga Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Bali itu.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ga-

nip Warsito mengaku sangat memahami situasi yang dihadapi Pulau Dewata. Sebagai daerah yang sebagian besar ekonominya bertumpu pada sektor pariwisata, Bali mengalami dampak ekonomi yang sangat signifikan.

Ganip menambahkan, upaya percepatan penanganan COVID-19 bisa berjalan optimal dengan pendekatan kearifan lokal, sehingga salah satu langkah yang ditempuh BNPB adalah menggandeng akademisi dalam riset kebencanaan dan KKN tematik.

Riset kebencanaan melibatkan 49 peneliti dari 23 perguruan tinggi dan terbanyak dari Provinsi Bali. "Sedangkan KKN tematik diikuti 5.000 mahasiswa. Mereka langsung diterjunkan menjadi agen perubahan dalam penanganan masalah sosial di masyarakat," ujarnya.

Dengan road map pengendalian COVID-19 yang telah dirancang pemerintah, Ganip yakin Bali secepatnya bisa bangkit. Terlebih, pemerintah sangat

berkepentingan dengan pulihnya Bali karena pada Tahun 2022 akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan GPDRR.

Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) merupakan forum dua tahunan yang dibentuk United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), yang bertujuan meninjau kemajuan berbagai pengetahuan, mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam penanganan kebencanaan.

Forum tersebut rencananya akan dihadiri 193 negara dengan 5.000-7.000 peserta. "Itu sebabnya, kami sangat berkepentingan dengan upaya pemulihan Bali. Ini juga kesempatan yang sangat baik untuk mengangkat citra kita," katanya.

Belajar dari Pandemi

Sementara itu, pelaku pariwisata yang juga anggota Asita Bali, Putu Ayu Astiti Saraswati berpandangan pengembangan desa wisata dan wisata edukasi dapat

• INFO DAERAH

menjadi alternatif yang dapat dilirik untuk membangkitkan pariwisata di Pulau Dewata setelah masa pandemi COVID-19.

"Setelah pandemi, tentu akan terjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari yakni perubahan," kata Ayu Saraswati.

Menurut wanita yang juga CEO Toya Yatra Tour and Travel itu, pandemi COV-

dalam pemilihan Ketua Asita Bali itu.

Meskipun sejauh ini belum jelas kapan "border" pariwisata Bali akan dibuka, pihaknya mengajak para pelaku pariwisata untuk tetap senantiasa optimistis karena industri pariwisata Bali selama ini sudah teruji ketangguhannya.

"Dalam kondisi saat ini, waktu yang

tah dan tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Pihaknya juga mengajak seluruh "stakeholder" atau pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk bersatu dan bekerja sama yang kuat, tidak hanya antara pelaku biro perjalanan wisata saja, dan yang tidak kalah penting



ID-19 telah memberikan pelajaran dan perubahan kebiasaan dalam berwisata.

"Wisatawan akan cenderung menghindari tempat keramaian dan memilih tempat-tempat wisata alam. Demikian juga akan lebih mengutamakan teknologi dan transaksi nirsentuh," ucap pengusaha muda yang juga akan berkompetisi

tepat untuk kita berbenah. Termasuk juga biro perjalanan wisata juga harus bekerja sama dengan desa wisata-desa wisata yang ada dan kita akan mengandalkan pasar domestik terlebih dahulu," ujarnya.

Di Bali setidaknya terdapat 179 desa wisata yang sudah ditetapkan pemerin-

membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah.

"Daerah-daerah wisata, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri tentu sedang melakukan pembenahan sehingga ketika 'border' sudah dibuka, benar-benar sudah siap menerima kunjungan wisatawan dengan berbagai ke-

unggulan yang ditawarkan” ucap Ayu Saraswati.

Sementara itu, akademisi dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, I Nyoman Sukma Arida berpendapat, pariwisata Bali pasca-pandemi COVID-19 memang tidak bisa lagi hanya mende-



wan mancanegara.

“Saatnya kita untuk lebih pro pada pariwisata kerakyatan atau desa wisata karena memang wisatawan nantinya tentu akan menghindari tempat-tempat wisata yang menawarkan keramaian,” ucapnya.

Wisatawan di masa mendatang, lanjut

Sukma, akan lebih memilih yang tempat yang menawarkan karakter edukasi dan lingkungan yang lebih baik, maupun destinasi yang menerapkan protokol kesehatan.

Pada 2019, kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali mencapai 6,2 juta jiwa, yang didominasi wisatawan dari Australia dan China.

“Sebelum pandemi, kita cenderung pada wisata massal, belum lagi soal praktik-praktik eksploitasi wisatawan untuk mendapatkan komisi dari pelaku usaha yang berada di jalur wisata, hingga marginalisasi desa wisata dan pendapatan pariwisata yang bocor ke pusat,”



katanya.

Sukma Arida mengusulkan yang tidak kalah penting untuk membangkitkan ekonomi Bali tidak hanya dari sektor pariwisata, namun juga memperkuat sektor pertanian dan UMKM.

“Untuk di desa wisata, mari kita pandang kunjungan wisatawan sebagai bonus. Bukan karena mengembangkan desa wisata, kemudian lantas berhenti menjadi petani karena pariwisata itu sangat rentan,” ucapnya.

Dibuka Pelan-pelan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pun meminta agar pelaku wisata lebih bersabar menghadapi pandemi ini. Agar tidak membuka tempat usaha lebih dulu, menyusul belum menyusutnya angka penularan

COVID-19.

Kemenparekraf kini masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi pengusaha.

Koordinasi dilakukan untuk membuka kembali usaha pariwisata secara bertahap, termasuk tempat wisata yang telah mendapatkan sertifikat CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety and Environment Sustainability).

Pembukaan tempat usaha pariwisata tersebut nantinya akan berbasis aplikasi Peduli Lindungi untuk memindai pen-

gunjung hingga pekerja di destinasi wisata.

“Mereka yang minimal tervaksinasi satu kali, tergantung protokol kesehatan yang disepakati oleh masing-masing pengusaha dan tidak ada riwayat kontak erat dengan penderita COVID-19 diperbolehkan masuk, sepanjang kapasitas masih mencukupi,” jelas Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, upaya tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir penularan COVID-19 di tempat wisata. Sebab, pemulihan sektor parekraf sejalan dengan suksesnya penanganan COVID-19.

“Kemenparekraf terus mendorong masyarakat untuk segera divaksin dan mengimplementasikan protokol kesehatan 5M yang ketat selama berada di tempat umum,” tutupnya. ●



MENENGOK PERSIAPAN PESTA OLAAHRAHA DI BUMI CENDERAWASIH

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang digelar 2-15 Oktober mendatang di Papua tampaknya tidak mengalami hambatan. Pemerintah bahkan sudah memberi lampu hijau untuk menggelar pesta olahraga di Tanah Air tersebut dilaksanakan di Bumi Cenderawasih.

Presiden Joko Widodo bahkan hendak mengunjungi Papua untuk melihat langsung persiapan venue, serta kesiapan menggelar pergelaran yang bisa dikatakan paling besar di saat pandemi. "Dalam rangka cek kesiapan venue un-

tuk PON XX Papua 2021. Sekaligus cek kegiatan vaksinasi di Provinsi Papua," kata Kabid Humas Poda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).

Untuk menyambut Kepala Negara, Poda Papua bersama Pemprov Papua

telah berkoordinasi secara intens dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dia menerangkan, terkait gelaran PON XX harus dapat diatasi meski di saat pandemi.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali mengatakan, bahwa PON XX



tetap digelar dengan perhitungan serta persiapan yang sangat matang. Mengingat situasi pandemi COVID-19 saat ini.

"Presiden meminta PON tetap lanjut, karena laporan dari menteri, gubernur dan Ketua KONI memang kita masih bisa jalan kecuali suatu saat nanti ada situasi yang lebih dari yang kita perkirakan sebelumnya," kata Zainudin usai rapat terbatas (Ratas) pada Selasa (13/7/2021).

Meskipun demikian, pembangunan arena di sejumlah tempat masih bermasalah. Polisi mencatat, ada empat lokasi yang masih berproses di bawah 50 persen jelang penyelenggaraan PON Papua pada Oktober nanti.

Disebutkan bahwa permasalahan itu berkaitan karena pembayaran hak ulayat dan masalah pembangunan jalan alternatif yang kemudian membuat masyarakat setempat melakukan pemalangan.

"Saat ini Polda Papua telah membentuk Tim penegak hukum untuk menyele-

saikan permasalahan pada venue yang belum tuntas dan melakukan asistensi tuntutan oleh masyarakat," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal, pada 16 Agustus lalu.

Gubernur Papua, Lukas Enembe pun menjelaskan, meski sedang diterpa pagebluk pandemi COVID-19, namun pihaknya bersama pemerintah pusat terus mempersiapkan PON, apapun hambatan. Terkait persiapan venue pun hampir rampung, dan segera dapat dipertandingkan. Apalagi perhelatan akan dilakukan di empat wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Sebelum dihelat, Pemprov Papua pun sedang bekerja keras menurunkan wilayahnya dari penyebaran COVID-19, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di masyarakat.

"Semua fokus menjaga proke COVID-19 secara baik. Sehingga kita bisa

menyaksikan semua pertandingan olahraga di PON nanti, dapat dihadiri penonton," ujar Juru Bicara Gubernur, Muhammad Rifai Darus.

Gubernur, menurut Rifai Darus, juga telah meminta instansi terkait, untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. "Lebih khusus bagi masyarakat yang berada di kota atau kabupaten penyelenggara PON," sambungnya.

Sehingga dapat terbentuk kekebalan komunal, sebelum pelaksanaan PON dan Peparas. Agar pesta olahraga yang pertama di Bumi Cenderawasih dapat berjalan sukses.

"Di mana ada sekitar 600 ribu orang di empat klaster penyelenggaraan PON Papua yang menjadi target untuk divaksinasi," ujar Rifai Darus.

"Tentunya kita meminta peran serta masyarakat agar dapat dengan sukarela melakukan vaksinasi guna mencapai herd immunity sebagaimana yang diharapkan pemerintah," pinta dia.



Namun, sebelum menggelar PON, ada urusan internal yang harus dibereskan oleh Lukas Enembe. Yakni terkait dualisme yang terjadi di dalam tubuh Pemprov Papua, serta sejumlah persoalan lainnya.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan, kepada PB PON dan PB Peparnas XIV agar menggunakan anggaran secara terukur dan berhati-hati, ini tentunya harus dibarengi dengan kinerja aparatur tata kelola pemerintahan yang kuat, bersinergi.

"Pak Gubernur minta agar semua berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan terukur hingga selesai PON dan Peparnas tidak ada permasalahan Hukum kami setuju," ungkap Jan Arebo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (21/8/2021). Namun, lanjut Jan, antara pikiran dan perbuatan harus sejalan. Perintah dan aturan harus sejalan apalagi Sekda selaku sekretaris gubernur sangat berperan sentral. Saat ini tugas pelak-

sana tugas Sekda Papua sangat terbatas dalam aspek anggaran keuangan. Dasar pengangkatan Plt Sekda melalui SK Gubernur lemah.

"Kalau SK Gubernur ganti Kepala OPD tidak masalah, itu hak gubernur tetapi keppres tidak bisa dan lemah dimata hukum sekalipun secara politis boleh dianggap kuat karena kepentingan sesaat dan kekuasaan tetap ingat proses hukum tunggu menunggu," jelas Jan Arebo.

Selain itu, Jan menilai, tidak ada sikap tegas dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dan jajarannya selama hampir satu bulan berjalan pas-capelantikan Pelaksana Tugas Sekda Papua oleh Gubernur Lukas Enembe 14 Juli 2021 lalu di Jayapura. "Pelaksanaan PON Peparnas XVI sejak 2016 hingga saat ini menghabiskan anggaran Rp4 triliun dari penerimaan APBN dan APBD Papua sejak 2016-2021, ini sesuai masterplan Bappeda Provinsi Papua. Hingga

saat ini dana PON menunggu pencairan tahap akhir dari Kemenpora RI bersumber dari APBN sekitar Rp1,5 triliun untuk PON XX dan Peparnas XVI," ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk realisasi anggaran harus ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I atau Sekda Definitif, dan Kementerian Lembaga sangat ketat dalam pengelolaan keuangan, penggunaan sampai kepada pertanggung jawaban, apalagi diawasi langsung oleh BPK, kejaksaan dan kepolisian.

"Oleh sebab itu kami minta Bapak Presiden ambil langkah tegas memanggil pembantunya Menteri Dalam Negeri RI, dan Gubernur Papua adalah wakil pemerintah pusat di daerah untuk menghormati keputusan presiden soal jabatan Sekretaris Daerah Definitif agar kerja normal kembali. Jangan sampai selesai semua baku lapor rame di daerah maupun pusat. Kasus-kasus proyek PON di Palembang lalu sudah menyeret menpora-menpora sebelumnya, jangan



kita ulang di Papua,” tegasnya. Sebagai kontrol sosial, pihaknya merasa penting memberikan masukan. Gubernur Papua juga diminta waspada terhadap pembisik-pembisiknya yang memanfaatkan dan tidak memberikan masukan yang benar. “Menjelang pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI diantar dengan dua persoalan Dualisme Sekda Papua defenitif dan Plt Sekda Papua. Proses calon Wakil Gubernur Papua yang terjadi deadlock sampe batas waktu yang tidak ditentukan. Ini konflik kebijakan dalam teori ilmu administrasi dan berdampak pada persiapan PON XX dan Peparnas XIV di dalamnya wibawa negara dan bangsa, dan Tanah Papua dipertaruhkan apalagi presiden menaruh perhatian serius dengan menerbitkan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2021 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021,” tutur Jan.

Dalam inpres ini, menurut Jan, Jokowi

secara tegas meminta sejumlah kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan sosial dan keamanan. Dan permasalahan dualisme sekda salah satu persoalan akibat konflik kebijakan.

“Pemerintahan di Provinsi Papua hari ini berjalan pincang. Itu sebabnya kami

mintu Presiden RI Bapak Jokowi menyelesaikan persoalan tersebut jangan sampai menghambat pelaksanaan PON XX yang tersisa hitungan 60 an hari, selain itu kami pun sepakat dan juga DPRP Papua harus memainkan peran dan fungsi legislasi secara benar atas persoalan sekda ini,” pungkasnya. ●





Menlu Retno Marsudi

PEREMPUAN DI BALIK KEDATANGAN PULUHAN JUTAAN VAKSIN

Di balik pengadaan vaksin Covid-19 untuk Indonesia, ada perempuan hebat yang tak banyak bercerita. Dialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sejak awal 2021, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berkecimpung langsung dalam mengupayakan vaksin dalam konteks kerja sama internasional. Rekam jejak menunjukkan, Retno terpilih menjadi salah satu ketua bersama (co-chair) untuk program COVAX AMC Engagement Group yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Aliansi Vaksin (GAVI).

Selain Menlu RI, dua perempuan lain menjadi ketua yang sama yakni Menteri Kesehatan Ethiopia Lia Tadesse dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Karina Gould. Ketiga co-chair ini bertugas mengawal program pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 bagi 92 negara yang tergabung dalam COVAX AMC.

Pemilihan ketua melalui online voting di Jenewa, Swiss pada 12 Januari 2021 dengan Retno mengumpulkan suara



terbanyak yakni 41 persen dari total suara yang masuk. Dengan rendah hati, ia menyebut terpilihnya perwakilan Indonesia perlu dimaknai sebagai wujud kepercayaan dunia.

"Merupakan tanggung jawab besar Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara melalui jalur multilateral. Tanggung jawab besar ini kita upayakan untuk ditunaikan sebaik mungkin," ujar Retno.

COVAX AMC Engagement Group merupakan forum antar negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi

dilakukan secara bertahap karena masih terbatasnya vaksin yang tersedia bagi semua negara," kata Retno.

Meskipun mengakui bahwa target pengadaan vaksin oleh COVAX tidak mudah dijalankan karena sumber daya yang terbatas dan kesiapan semua negara dalam menerima vaksin COVID-19, Retno meyakini bahwa kerja sama erat oleh semua negara dapat membantu tercapainya target tersebut. Guna menindaklanjuti peran barunya dalam memimpin COVAX AMC Engagement Group, Menlu RI melalui PTRI Jenewa akan segera melakukan komunikasi

Berdasarkan laporan Reuters dari dokumen internal WHO yang mereka peroleh, program tersebut mengalami berbagai hambatan seperti penggalangan dana, risiko pasokan dan pengaturan kontrak yang rumit yang membuat tujuan sulit tercapai. "Risiko kegagalan sangat tinggi untuk membangun fasilitas COVAX," ungkap laporan internal WHO kepada dewan Gavi pada akhir 2020 lalu.

Salah satu hambatan dari fasilitas ini yakni kesediaan dana. Untuk memenuhi target vaksinasi setidaknya 20 persen orang di negara-negara miskin tahun depan, COVAX membutuhkan US\$ 4,9



negara AMC. Melalui forum kerja sama tersebut, 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang bergabung dalam Fasilitas COVAX, akan memperoleh akses ke vaksin COVID-19 yang aman dan efektif dengan bantuan negara donor.

Fasilitas COVAX sendiri memiliki target pengadaan vaksin bagi 20 persen dari populasi setiap negara AMC, dan mendukung kesiapan negara AMC untuk melakukan rencana vaksinasi nasional. "Tentunya pengadaan akan

intensif dengan GAVI, yang bemarkas di Swiss. "Saya juga menghubungi dua ketua lain untuk mulai menjalin komunikasi," ujar Retno.

WHO sejak akhir 2020 menjalankan program COVAX dengan target memberikan sekitar dua miliar dosis vaksin corona pada akhir 2021. Tujuannya menjaring 20 persen dari orang yang paling rentan di 91 negara miskin dan berpenghasilan menengah yang berlokasi sebagian besar di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

miliar atau sekitar Rp 69,3 triliun di luar dana yang telah dikumpulkan US\$ 2,1 miliar atau setara sekitar Rp 29,6 triliun.

Langsung maupun tidak langsung, Menlu Retno menjawab tantangan dan tantangan itu. Pada Juni 2021 lalu, misalnya, ia menegaskan perempuan turut memiliki peran penting dalam upaya mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Peran penting perempuan itu antara lain ditunjukkan dengan proporsi tenaga kesehatan global yang mayoritas adalah perempuan dan

• INFO PROFIL

peran perempuan dalam mengelola usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan.

"Perempuan sekarang memimpin kampanye global untuk mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin karena seluruh co-chair COVAX AMC Engagement Group adalah perempuan," kata Menlu Retno pada pertemuan digital tingkat tinggi bertema "Building Forward: Women Political Leaders Determining the New Normal" yang diseleng-

pekerjaan, menanggung beban domestik, dan mengalami kekerasan.

Studi juga menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memiliki keraguan terhadap vaksin karena terbatasnya mobilitas dan kurangnya akses informasi tentang kesehatan. "Oleh sebab itu, perempuan harus menjadi perhatian utama dalam upaya pemulihan dari pandemi," ujar Retno.

Secara jangka pendek, kata dia, perempuan perlu memainkan peran lebih besar dalam mengatasi persoalan kera-

ciptaan lingkungan yang mendukung untuk kesempatan yang setara bagi perempuan.

"Indonesia berkomitmen untuk terus memajukan agenda perempuan, termasuk dalam Presidensi Indonesia pada G-20. Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk membangun dunia pascapandemi yang berkelanjutan, tangguh, adil, dan inklusif," kata Retno.

Toh Menlu Retno bukan sekadar bicara sana-sini, melainkan menunjukkan bukti bahwa vaksin melalui jalur COVAX-



garakan oleh Women Political Leaders Network di Brussels, Belgia pada Senin, 21 Juni 2021.

Women Political Leaders merupakan jaringan global politisi dan pemimpin perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh dan jumlah perempuan dalam posisi pemimpin. Retno tampil di forum itu setelah enam bulan terpilih sebagai salah satu co chair COVAX AMC Engagement Group.

Dalam kesempatan itu Retno mengemukakan, dampak pandemi lebih dirasakan oleh perempuan dibanding laki-laki. Perempuan lebih rentan kehilangan

guan terhadap vaksin dan kelelahan masyarakat terhadap Covid-19. Untuk itu, Menlu Retno menekankan bahwa suara perempuan harus didengar dan mereka harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.

Secara jangka panjang, pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas dalam upaya pemulihan dari pandemi. Hal itu dilakukan antara lain melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan dalam ekonomi, perbaikan akses terhadap teknologi digital, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender, dan pen-

GAVI memang benar-benar ada dan datang hingga sampai di Indonesia. "In-syaallah dengan terus berdatangan vaksin dari berbagai sumber ke Indonesia, kita dapat mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan penyebaran virus Covid-19 dan menekan angka kematian," ujar Menlu dalam keterangan pers ketibaan vaksin tahap ke-32 melalui konferensi video pada Minggu, 1 Agustus 2021.

Retno mengatakan bahwa pada Agustus 2021 akan ada serangkaian ketibaan vaksin di Indonesia yang akan menam-

bah stok vaksin bagi masyarakat. Melalui jalur Covax Facility sendiri, Kementerian Luar Negeri mencatat Indonesia telah menerima 19,7 juta dosis vaksin jadi.

"Jadi kita pilah lagi dari sisi sumbernya maka dari Covax Facility saat ini Indonesia telah menerima pengiriman sebesar 19.704.960 dosis vaksin secara gratis dan semuanya merupakan vaksin yang sudah jadi," lanjutnya.

Retno menuturkan, kesenjangan vaksinasi di tingkat global yang cukup lebar antarkawasan di dunia masih menjadi perhatian Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Misalnya, vaksinasi di kawasan Eropa dan Amerika Utara telah mencapai angka 80 persen dari total populasi. Sedangkan di kawasan Afrika baru mencapai 4,6 persen dan kawasan ASEAN mencapai 21,7 persen.

"Untuk Indonesia sendiri saat ini Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 67 juta dosis vaksin Covid-19 tepatnya 67.761.337 dosis atau sekitar 24,49 persen dari total populasi Indonesia," tuturnya.

Di samping itu, kenaikan kasus Covid-19 yang cukup signifikan secara global akibat varian delta juga menjadi perhatian WHO. Selama bulan Juli, Dirjen WHO mencatat kenaikan kasus global meningkat hingga 80 persen akibat varian delta.

Selain itu, angka kematian juga mengalami kenaikan sebesar 10 persen. "Pada periode 19 sampai 25 Juli 2021, WHO juga mencatat jumlah kematian sebesar 69 ribu orang atau naik 21 persen dibanding minggu sebelumnya," tambah Retno.

Dengan kenaikan angka tersebut, Menlu mengingatkan kepada semua pihak untuk bekerja keras menekan laju penyebaran virus korona dan menurunkan angka kematian khususnya di Indonesia. "Insyaallah teman-teman dengan bekerja keras, disiplin, bersatu seraya juga terus berdoa, kita bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ini," ujarnya.

Sementara terus berupaya melalui jalur COVAX yang bersifat multilateral, Menlu Retno juga mengupayakan vaksin melalui jalur bilateral antara Indonesia dengan negara donatur. Antara lain vaksin AstraZeneca yang merupakan hasil kerja sama bilateral Indonesia dengan

pemerintah Belanda.

"Kami menerima 450 ribu dosis vaksin AstraZeneca yang merupakan dose sharing dari pemerintah Belanda. Kedatangan vaksin AstraZeneca adalah pengiriman tahap pertama dari komitmen pemerintah Belanda untuk memberikan dukungan tiga juta dosis vaksin bagi Indonesia melalui mekanisme kerja sama bilateral dose sharing mechanism," ujar



Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual, Kamis, 19 Agustus 2021.

Kiriman vaksin dari Belanda itu merupakan hasil pertemuan antara Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Sigrid Kaag dan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte di Den Haag, 1 Juli 2021.

Lebih dari itu, Menlu Retno menegaskan akan terus mengupayakan pengadaan vaksin melalui jalur diplomasi. "Tentunya, diplomasi Indonesia bekerja 'day and night' untuk mengamankan vaksin bagi rakyat Indonesia, baik melalui jalur bilateral maupun jalur multilateral,"

ujar Retno dalam Congress of Indonesian Diaspora, Sabtu, 14 Agustus 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat vaksinasi serta memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat guna menanggulangi pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Terkait percepatan vaksinasi, Menlu

menyebutkan bahwa hingga saat ini Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 80 juta dosis vaksin, atau setara dengan pemberian vaksin terhadap 28,6 persen dari total populasi di Indonesia. "Indonesia tercatat sebagai negara terbesar ke-10 yang telah menyuntikkan lebih dari 80 juta dosis vaksin," ungkap Menlu Retno.

Nah, di balik pengadaan vaksin yang semuanya berasal dari luar negeri itu, ada perempuan Menlu yang menunjukkan kinerja luar biasa. Menyesuaikan diri dengan perubahan fokus diplomasi politik menjadi diplomasi kesehatan. •



Percha Leanpuri

MENINGGALKAN KENANGAN ABADI

Kepergian Percha Leanpuri adalah kehilangan besar bagi banyak kalangan. Perempuan berusia relatif muda, selain berperan sebagai istri dan ibu, ia juga salah satu politisi yang berpotensi menapak pentas nasional setelah teruji handal di tengah konstituen Sumatera Selatan, daerah asalnya.

Pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah termuda hasil Pemilu 2009, Hajjah Percha Leanpuri B Bus, MBA, kelahiran Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, 24 Juni 1986, kini tinggal kenangan. Yang Maha Kuasa memanggilnya di usia relatif muda pada Kamis, 19 Agustus 2021 petang.

Almarhumah Percha Leanpuri masih tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang terpilih dari Dapil Sumsel II itu wafat di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang setelah menjalani perawatan sekitar dua pekan sejak akan melahirkan. Percha tutup usia beberapa hari setelah melahirkan bayi kembar yang



selamat.

Suasana duka dan pilu pun menyebar viral di berbagai media sosial. Antara lain dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel, Hendri Zainuddin.

Melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 20/8/2021, Hendri menulis: "Melati putih itu telah gugur, setelah berjuang melahirkan dua anak kembarnya. Dia Meninggalkan banyak kenangan manis, bertabur kebaikan. Selamat jalan Bu @perchahd damai dan tenanglah di sana. Alfatihah," tulis Hendri pada caption.

Akun Instagram @perchahd memang milik Percha. HD merupakan singkatan nama sang ayah, Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan saat ini. Percha memang putri sulung Pak Gubernur.

Pemakaman jenazah Percha Leanpuri berlangsung di pemakaman keluarga di Jalan Sungailacak, Kecamatan Gandus, Palembang itu., Jumat, 20 Agustus 2021 pagi dengan penerapan Prokes yang ketat. Yang bisa masuk ke sekitar area pemakaman hanya keluarga inti. Sedangkan pelayat lainnya dipersilahkan menyaksikan dari kejauhan.

Jenazah putri sulung Gubernur Herman Deru itu tiba di pemakaman sekitar pukul 10.00 WIB dengan diiringi ribuan pelayat mulai dari para pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama seperti Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Wali Kota Palembang Harnojoyo, Bupati OKU Timur H Lanosin Hamzah, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar dan Wakilnya Ardani, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan Wakilnya Yulius Maulana, Ustad H Solihin Hasibuan, H Abdul Hali Ali atau H Halim, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Termasuk juga kerabat dan sanak saudara serta masyarakat.

Kedatangan jenazah Percha Leanpuri di pemakaman keluarga itupun semakin membuat suasana kian haru. Gubernur Herman Deru didampingi sang istri Hj Febrita Lustia keluarga lainnya tampak berusaha tegar saat menyaksikan jenazah akan masuk ke liang lahat.

Di pemakaman, suasana duka dan haru tetap menyelimuti prosesi pemakaman putri sulung Gubernur Sumsel, Herman Deru ke tempat peristirahatannya terakhir itu. Herman Deru, ayah Percha, mengaku ikhlas melepas kepergian putri sulungnya untuk selamanya.

Saat menyampaikan kata sambutan mewakili keluarga, suasana mendadak hening. Semua orang diam sambil mendengarkan Herman Deru menyampaikan sambutan.

dari kami, Percha dipanggil. Tapi jujur kami merasakan terlalu cepat. Namun kami ikhlas," kata Deru. Ia berharap sang anak mendapat tempat terbaik di sisi Allah.

Tidak lupa Deru memohon maaf kepada para sahabat, rekan Percha jika anaknya itu pernah melakukan salah, untuk mohon dimaafkan. "Jika ada kesalahan yang dilakukan anak kami, kami akan bertanggung jawab. Sampai kepada kami jika ada yang belum diikhhlaskan," kata Deru.



Suara orang nomor satu di Sumsel ini serak, matanya berkaca-kaca saat melepas sang putri tercinta. "35 tahun 55 hari Allah titipkan dia (Percha) pada kami," kata Deru mengawali sambutan.

"Percha dititipkan Allah kepada dirinya tanpa cacat, dan begitu sempurna di mata keluarga. Tidak ada penyesalan

la juga mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan dari RSMH, RS Siti Fatimah dan Tim Harapan Kita, sejak tanggal 3 Agustus 2021 membantu perawatan Percha. "Kami ucapkan terima kasih. Hanya Allah lah yang dapat membalasnya," kata dia.

Deru memohon doa kepada para pelayat yang hadir, untuk mendoakan

Percha. Karena dia (Percha) meninggalkan suami dan tiga anak. "Mudah-mudahan anak-anak bisa mengantikan sifat baik ibunya. Kami semua sayang kamu. maafkan Papa, Nak. Terima kasih," tutup Deru.

Kehilangan Percha juga terasa bagi suami dan tiga anaknya. Suami Percha,

menyaksikan jenazah almarhumah untuk yang terakhir kalinya sebelum dimakamkan.

Bahkan, dia pun langsung memeluk anak sulungnya M. Mandala Sultan Persya yang merupakan buah cinta dari pernikahan dengan almarhumah. Tak hanya ikut mengantarkan, Danis

adek. Danis tiba-tiba mintanya, karena selama ini nggak pernah pengen adek," ceritanya.

Selama ini Percha dan suami juga belum terpikir untuk menambah anak lagi. "Sebab sudah banyak kesibukan yang dijalani. Alhamdulillah juga udah punya Danis," ungkapnya.

Namun, dalam suatu perjalanan saat di kapal dari Jakarta ke Palembang Danis sambil tiduran di paha ibundanya bilang, "Mami kapan di perutnya mami ada adek?"

"Sampai bilang begitu, jadi sampai saya meneteskan air mata pada saat itu. Ternyata saya dan suami saja belum ada kepikiran itu, tapi Danis yang baru umur 7 tahun uda berpikir kesitu," katanya. Dari situ akhirnya tergeraklah hati Percha dan Koko (panggilan suaminya) untuk program anak kedua.

Takdir menentukan lain. Percha berpulang setelah memenuhi harapan putranya. Tapi, tak hanya anak, suami dan keluarga besarnya yang kehilangan sosok perempuan yang luar biasa ini.

Di beberapa ruas jalan utama Kota Palembang, untaian krans duka cita terpampang begitu banyak. Karangan bunga ucapan duka cita itu terlihat antara lain di ruas Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Angkatan 45, Jalan Bukit, dan di kediaman pribadi Gubernur H Herman Deru.

Menurut beberapa warga, baru saat meninggalnya Hj Percha Leanpuri inilah mereka melihat karangan bunga sedemikian banyak. "Luar biasa karangan bunga ucapan duka cita atas wafatnya Bu Percha ini di Kota Palembang," kata Waiman, 51, driver taksi online yang mengaku dirinya juga memasang ucapan turut berdukacita di akun Facebook dan Instagramnya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan Septriandi S Permana mengatakan, sebelum meninggal, kondisi kesehatan politisi Partai Nasdem itu terus mengalami penurunan usai melahirkan bayi kembarnya yaitu seorang perempuan dan laki-laki. "Bukan karena Covid-19. Pihak rumah sakit juga sudah membantahnya kabar Almarhumah meninggal karena Covid-19. Kedua anaknya selamat," kata Septriandi.



dr Syamsuddin Isaac Suryamanggala, meski merasa sangat terpukul, mencoba tetap tegar dan langsung turun ke liang lahat untuk menyambut jenazah sang istri. Namun, Syamsuddin akhirnya tak dapat membendung air matanya yang seketika pecah usai mengizinkan sang istri di liang lahat sekaligus

--sapaan akrab putra sulung Percha, juga menaburi bunga dan air dalam bejana perunggu di atas pusara. Sampai-sampai Dani pun mencium nisan sang ibunda seusai dimakamkan.

Dalam sebuah wawancara, Percha pernah mengemukakan, "Sebenarnya sudah dari akhir tahun lalu, Danis minta

la menjelaskan, sepekan sebelumnya Percha melahirkan secara operasi caesar. "Setelah melahirkan, kondisinya lemah dan masih dirawat intensif hingga Jumat sore tadi meninggal pukul 17.45 WIB," tambahnya.

Sedangkan Wali Kota Palembang H Harnojoyo mengemukakan kenangan khususnya terhadap Percha. Hadir di pemakaman Harnojoyo mengungkapkan kedekatannya pada sosok Percha Leanpuri.

Sebagai sesama yang aktif di politik dan pemerintahan, Wali Kota Harnojoyo mengungkapkan Percha Leanpuri memang dekat dengannya bagaikan paman dan seorang keponakan. "Percha itu salah satu tokoh wanita yang bekerja dengan hati. Biasanya, itu menyapa saya dengan sebutan oom. Sudah seperti kepokanan sendiri," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, Harnojoyo menegaskan Percha sebagai politisi yang santun. "Kalau diingat, dia itu sempat beberapa kali ngobrol sama saya duduk di tempat saya. Panggil om, dekat dan santun sekali," ungkapnya.

Sebagai pribadi politisi, nama Percha Leanpuri merupakan akronim dari Percampuran Lematang, Ogan, Way Umpu, Komerling. Penyingkatan nama ini menjadi tradisi dari keluarga pihak ayah sebagaimana nama Herman Deru yang merupakan akronim Lahir di Zaman Orde Baru.

Bukan kebetulan jika Percha menjadi politisi. Ia berasal dari keluarga yang berlatar belakan politik yang kental. Banyak kerabatnya dan generasi di atasnya juga berlatar belakang politisi. Kakek dari pihak ayahnya adalah seorang pesirah (kepala desa) di Belitang. Sedangkan kakek dari ibunya adalah mantan Wali Kota Palembang yang menjabat selama dua periode, Drs H Husni MM.

Saat Herman Deru maju sebagai calon gubernur Sumsel, Percha adalah salah satu orang yang selalu mendampingi ayahnya. Sampai akhirnya Herman Deru terpilih sebagai orang nomor satu di Sumsel.

Sedangkan karir politik Percha mulai menonjol saat terpilih sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata ia menjadi Anggota DPD RI termuda periode 2009-2014 yang ter-

pilih dalam usia 23 tahun.

Terpilih lagi sebagai anggota DPR periode 2014-2019, Percha melepas jabatan karena maju menjadi calon bupati dalam Pilkada OKU Timur pada 2015. Pada periode kedua, berpasangan dengan Nasir Agun.

Namun, Percha yang saat itu baru berusia 29 tahun, gagal memenangi pemilihan. Toh kegagalan itu justru menjadi ujian. Ia memilih terus melaju

dalam karir politik di Pemilu legislatif 2019. Alhasil, Percha terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem mewakili konstituen di daerah pemilihan Sumsel II.

Kini semua tinggal kenangan. Namun, doa tak akan henti-hetinya menyertai kepergian Percha. Allahumagh-firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha, wa akrimnaa bil firdausil a'la minal jannah. •





DARI HAMPIR RP72,45 JADI RP86,4 T

Cakupan penyertaan modal negara (PMN) atau suntikan dana baru untuk Badan Usaha Milik Negara untuk Tahun Anggaran 2022 sudah lebih jelas. Ada pula PMN untuk Badan Layanan Usaha. PMN 2021 juga ada tambahan.

Lebih jelas setelah Presiden menyampaikannya: Pidato mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR RI. Seiring dengan sidang tahunan MPR pada

Senin, 16 Agustus 2021.

Terungkap bahwa Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur senilai Rp 86,4 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk Penyertaan Modal

Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan alokasi pembiayaan investasi untuk klaster infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan pembangunan. "Untuk



kluster infrastruktur itu Rp 86,4 triliun itu dalam berbagai bentuk PMN baik kepada PT PLN, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, Perum Perumnas, maupun untuk PT PPI, SMF, dan LMAN yang merupakan institusi BLU yang mendukung pengadaan tanah untuk PSN (proyek strategis nasional)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Senin, 16 Agustus 2021

Secara rinci, PMN kepada PLN digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa. Selanjutnya, PMN kepada Hutama Karya untuk penyelesaian konstruksi delapan ruas Jalan Tol Trans Sumatera dengan tambahan sepanjang 162 kilometer (km). Selanjutnya PMN kepada Waskita Karya untuk penyelesaian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Be-

tung dan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Kemudian, PMN kepada Adhi Karya digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta-Bawen dan SPAM Karian-Serpong. Perum Perumnas juga mendapatkan alokasi PMN untuk memperbaiki struktur permodalan guna melanjutkan program pengadaan Satu Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain kepada perusahaan pelat merah, pemerintah juga akan memberikan PMN kepada BLU yakni PT PII, LMAN, dan SMF. Selanjutnya, PMN kepada PT PII digunakan untuk mendorong gearing ratio ke batas optimal sebesar 7,5 kali untuk penjaminan proyek infrastruktur.

Selanjutnya, dukungan PMN kepada SMF bertujuan untuk mendukung program KPR FLPP dengan target

200.000 rumah MBR. Sedangkan, suntikan dana kepada LMAN untuk mendanai pengadaan tanah termasuk uang ganti rugi pengadaan lahan proyek pembangunan infrastruktur PSN.

Untuk periode tahun 2016 sampai semester I 2021, alokasi investasi kepada BLU LMAN untuk mendanai pengadaan tanah pada 51 proyek jalan tol, 48 proyek infrastruktur sumber daya air (41 proyek bendungan, enam proyek irigasi dan satu proyek sarana dan prasarana air baku). Kemudian 10 proyek jalur kereta api, satu proyek pelabuhan dan satu proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Namun progres realisasi pendanaan atas alokasi tersebut tergantung pada percepatan pembebasan lahan di lapangan. "Jadi, kelihatan di sini untuk kluster infrastruktur selain heavy di energi dan konstruksi terutama untuk

jalan raya dan perumahan,” katanya.

Apapun, dana PMN ini jelas lebih tinggi dari kesepakatan awal antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Komisi VI DPR RI. Namun, cakupan BUMN yang menerima PMN pun memang lebih banyak.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis, 15 Juli 2021, tercapai persetujuan untuk menyuntikan PMN pada 2022 senilai 72,449 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran PMN pada 2022 itu untuk 12 BUMN. Di samping itu Erick juga

digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi. “Seperti yang disampaikan penugasan 80 persen, restrukturisasi 6,9 persen. Jadi kalau kita kumulatifkan 87 persen tidak bisa terelakkan, seperti HK sendiri ini akan ada PMN sangat besar untuk penugasan,” kata Erick.

Toh ia mengakui, dividen BUMN pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp 43 triliun. Sedangkan tahun ini ditargetkan mencapai Rp 30 triliun atau Rp 35 triliun dari target semula Rp 40 triliun.

2021. Peningkatan ini telah memperhitungkan kinerja BUMN pada 2021 dan perbaikan portofolio BUMN melalui restrukturisasi korporasi,” demikian disampaikan Jokowi dalam Nota Keuangan, dikutip Rabu 18 Agustus.

Proyeksi itu diambil dari perkiraan pendapatan dari dividen BUMN pada 2021 yang sebesar Rp30 triliun, alias turun 32,73 persen dibanding realisasi dividen BUMN pada 2020 yang senilai Rp44,6 triliun. Padahal sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019, dividen BUMN bisa menembus angka Rp50,6 triliun.



mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai sebesar Rp 2,6 triliun bagi klaster pangan dan Rp 809 miliar bagi klaster industri pertahanan kepada Komisi VI DPR RI.

Menteri BUMN menyampaikan penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Erick menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi BUMN kepada negara.

Menurut dia, suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN.

Sejauh ini, sebagian besar PMN

“Tahun ini insya Allah peningkatan Rp 30-35 triliun. Ini belum fix, tapi kita upayakan dan kami berupaya sekuat tenaga, tentu dengan kondisi pandemi tetap kita akan berikan dividen tahun depan paling tidak sama dengan target tahun sebelumnya, yaitu Rp 40 triliun,” ujar Erick.

Sedangkan untuk 2022, pemerintah menargetkan dividen BUMN dapat mencapai Rp35,6 triliun. Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, angka Rp35,6 triliun tersebut terdiri atas bagian pemerintah atas laba BUMN Perbankan Rp19,63 triliun dan bagian pemerintah atas laba BUMN nonperbankan sebesar Rp15,97 triliun.

“Pendapatan KND ini tumbuh 18,6 persen dibandingkan outlook pada

Kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2022 yakni melalui penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN seperti restrukturisasi, merger, holding, atau aksi-aksi korporasi/pemegang saham lainnya. Selain itu, penentuan besaran dividen akan mempertimbangkan profitabilitas BUMN, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan.

Toh, kata Erick, sumbangan BUMN bukan hanya dari dividen belaka. Menteri BUMN menyebut peran penting BUMN dalam kontribusi kepada ne-

gara selain dividen. Antara lain, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan nilai PMN yang diberikan, kata dia, jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.

"Kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp 3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp 1.872 triliun, PNBP sebesar Rp 1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp 388 triliun. Kita bandingkan dengan PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp 147 triliun dari 2011-2020," kata Erick.

Menurut Erick, suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Erick mengatakan, hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi.

"Yang terpenting pada 2017-2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50:50," kata Erick.

Erick mengakui pengembangan infrastruktur tetap menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan PMN "Tetapi kami harus menyelesaikan sesuai dengan amanah dari arti penugasan ini, dan tentu kita ingin menjadi bagian yang peduli bagaimana infrastruktur ini bisa berjalan dengan baik, dan tentu menjadi pondasi bagaimana pembangunan ekonomi kita ke depan," ujarnya.

Dengan alasan itu, selain PMN untuk 2022, ada pula tambahan PMN untuk tahun ini. Dari penjelasan Erick, dimaklumi jika yang mendapat PMN tambahan paling besar kali ini adalah BUMN PT Hutama Karya. BUMN ini telah mendapatkan PMN sekitar Rp 6 triliun pada awal 2021. Kemudian, PMN tambahan di paruh kedua tahun 2021 sebesar 19 triliun, sehingga total sepanjang 2021 mencapai Rp 25 triliun.

Pada 2022, Hutama Karya juga akan kembali mendapatkan PMN. DPR sudah menyetujui suntikan untuk Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun pada APBN 2022. Total 2021-2022 PMN un-

tuk Hutama Karya akan mencapai Rp 56 triliun.

Berikut daftar tiga BUMN penerima PMN tambahan 2021:

- ▶ PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp7,9 triliun.
- ▶ PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk Rp7 triliun.
- ▶ PT Hutama Karya (Persero) Rp19 triliun.

Sedangkan 12 BUMN calon penerima PMN pada APBN 2022:

- ▶ PT Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun untuk penugasan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera.
- ▶ PT Aviassi Pariwisata Indonesia senilai Rp 9,31 triliun guna penguatan

ka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.

- ▶ PT Waskita Karya (WSKT) sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
- ▶ PT BPUI sebesar Rp 2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021.
- ▶ PT Adhi Karya senilai Rp 2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian.
- ▶ PT Perumnas sebesar Rp 2 triliun guna program perumahan rakyat



permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviassi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

- ▶ PT PLN sebesar Rp 8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.
- ▶ PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 7 triliun untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).
- ▶ PT KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rang-

Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBK).

- ▶ PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebesar Rp 2 triliun guna penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.
- ▶ PT RNI sebesar Rp 1,2 triliun sebagai penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- ▶ PT Damri sebesar Rp 250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan.

Namun, dari penjelasan Menkeu Sri Mulyani, muncul beberapa nama baru seperti PT PPI, SMF, dan LMAN yang merupakan institusi BLU pendukung pengadaan tanah untuk PSN. Alhasil, angka 72,445 triliun pun meningkat menjadi 86,4 triliun. ●



Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

FOTO-FOTO: REPRO

APA KABAR NIKEL INDONESIA?

Prospek memang jelas. Namun, hambatan tak kurang juga.

Di acara hari ulang tahun ke-43 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengulas prospek industri mineral nikel Indonesia. Inilah pandangan optimistik yang mengimbangi kabar negatif tentang nikel Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam konteks teknologi, Menko Luhut mengungkapkan Indonesia tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Sebanyak 21 orang dari Indonesia belajar pengolahan nikel ke China. "Berkali-kali saya sampaikan kita kirim anak-anak kita dari sini, ada 21 orang pergi ke China untuk melihat teknologinya ini. Sudah satu tahun, sehingga riset lithium battery dia akan terli-



Pertambangan Nikel.

bat di sini," ujarnya di acara peringatan HUT yang berlangsung secara virtual, Senin, 23 Agustus 2021.

Menko Luhut menegaskan, industri nikel di Indonesia memiliki potensi sangat menjanjikan, setelah sejak 2014 dipandang sebelah mata. Pada 2014, saat nikel belum dihilirisasi, kata dia, eksportnya cuma 1,1 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp 15,8 triliun. Namun, saat Indonesia menerapkan larangan ekspor nikel mentah dan melakukan hilirisasi, sambungnya, nilai eksportnya mencapai US\$ 10 miliar lebih atau sekitar Rp 144 triliun.

Nah, di sinilah muncul masalah dengan Uni Eropa (UE). Komisi Perdagangan UE mengajukan pengaduan ke WTO pada November 2019. UE menuduh larangan Indonesia terhadap ekspor bijih nikel melanggar aturan perdagangan bebas.

UE beranggapan larangan tersebut

membantu Indonesia meningkatkan produksi baja di dalam wilayahnya sendiri melalui keuntungan yang tidak adil bagi industri nikel dalam negerinya. Harap maklum, Nikel paling sering digunakan dalam produksi baja tahan karat (stainless steel) dan semakin banyak digunakan dalam baterai yang menggerakkan kendaraan listrik modern.

"Produsen baja UE berada di bawah banyak tekanan, menderita akibat kelebihan kapasitas global dan pembatasan perdagangan sepihak. Langkah-langkah yang diberlakukan oleh Indonesia meningkatkan kerusakan, menempatkan pekerjaan di industri baja UE dalam risiko," kata komisaris perdagangan UE Cecilia Malmstrom dalam sebuah pernyataan.

Ini tak lepas dari kekuatan ekonomi Tiongkok yang menjadi pasar besar nikel global. Sebagian besar bijih nikel

dan turunannya dari Indonesia diekspor ke sana.

Menurut firma riset energi Wood Mackenzie, Indonesia menyumbang sekitar 40 persen dari total impor bijih nikel Tiongkok. Namun, dengan kebijakan larangan ekspor nikel mentahan, sebenarnya produksi nikel Tiongkok juga akan terdampak dan menurun pada 2020.

Sedangkan asosiasi baja Eropa Eurofer, menuduh larangan tersebut menggembosi harga di beberapa kawasan dan menggelembungkannya di wilayah lain. Eurofer menuduh Indonesia menahan pasokan bijihnya – yang terbesar di dunia – untuk menaikkan harga nikel, komponen penting dalam baja tahan karat, sementara memungkinkan produsen dalam negeri Indonesia mengenakan harga di bawah pasar.

"Karena nikel (dalam berbagai ben-

tuknya) merupakan bagian besar dari biaya baja tahan karat, hal ini memberi keunggulan kompetitif yang signifikan eksportir baja nirkarat Indonesia namun tidak adil agar bisa masuk ke pasar ekspor,” kata Charles de Lusignan, juru bicara Eurofer.

Sebelumnya, Indonesia juga melarang ekspor bijih nikel pada 2014, dengan mendorong pengembangan smelter domestik yang dapat memproses nikel, menurut Olivier Masson, analis senior di Roskill, sebuah perusahaan riset komoditas. Pada 2017, kebijakan itu dilonggarkan untuk diterapkan hanya pada bijih bermutu tinggi.

Komisi tersebut mempertimbangkan untuk mengenakan tarif terhadap impor produk nikel, tetapi larangan ekspor Indonesia datang lebih cepat dari yang diperkirakan, karena awalnya baru akan diterapkan untuk 2022.

Memang, mulai 1 Januari 2020, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang ekspor nikel dengan kadar kurang dari 1,7 persen. Bijih nikel dengan konsentrasi lebih rendah dari 1,7 persen hanya dapat diekspor dengan ketentuan pemegang izin produksi telah menggunakan nikel dengan konsentrasi tersebut paling sedikit 30 persen dari total kapasitas input di fasilitas

dengan sengketa nomor DS592.

Langkah tersebut melingkupi konsolidasi, penunjukan firma hukum, penyusunan pernyataan bersama terkait gugatan, penyiapan data terkait gugatan serta membentuk tim untuk menyampaikan pembelaan di sidang. “Untuk menghadapi gugatan DS592 tersebut telah dilakukan sejumlah langkah-langkah,” ujar Arifin dalam paparannya di Komisi VII, DPR, Senin, 22 Maret 2021.

Arifin menjelaskan konsolidasi terkait dilakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

“Pemerintah ingin menggunakan bijih nikel kadar rendah untuk memasok industri baterai,” kata Masson kepada Al Jazeera tentang larangan ekspor 2020. “Waktu akan menunjukkan apakah Indonesia akan berhasil menarik pabrik baterai nikel seperti dalam memicu pengembangan smelter,” katanya.

Pada awal 2019, Komisi Perdagangan UE membuka penyelidikan atas tuduhan bahwa Indonesia melakukan dumping harga nikel, taktik yang digunakan untuk melemahkan pesaing.

itas pemurnian; dan telah membangun atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.

Sengketa Indonesia yang diadakan UE ke WTO pun bergulir. Toh Indonesia meladeninya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan telah melakukan lima langkah untuk menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel. Gugatan itu terdaftar

yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemko Marinvest). Kemudian, firma hukum yang telah ditunjuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa adalah law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaldi (JWK) di Jakarta.

“Kami juga menyusun statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592. Sehingga seluruh pernyataan

dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia," imbuhnya.

Selanjutnya, Kementerian ESDM pun menyiapkan data/informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO. "Terakhir, pemerintah sedang menyiapkan Tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang," tandasnya.

Sebelumnya, UE menyampaikan permohonan kepada DSB WTO untuk menggelar agenda konsultasi dengan Indonesia tanggal 22 November 2019 terkait lima hal. Pertama, larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel. Kedua, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri. Ketiga, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Keempat, persyaratan perizinan ekspor, dan terakhir, skema pemberian subsidi yang dilarang.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE pada 30-31 Januari 2020 dan selanjutnya UE secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari 2021 yang disusul dengan pembentukan panel kedua pada 22 Februari 2021. Toh hal yang dipermasalahkan dalam panel tersebut hanya mencakup dua isu (dari semula lima isu) yakni pelarangan ekspor bijih nikel serta persyaratan pemrosesan dalam negeri karena melanggar Pasal XI (1) dari GATT 1994.

Kemudian, pada 8 Maret 2021, Indonesia menyusun dan mengajukan kriteria pemilihan panel pada tanggal dalam agenda preference meeting dan selanjutnya Indonesia menunggu penetapan anggota panel oleh Sekretariat DSB WTO. Panel DSB WTO sudah terbentuk pada akhir April 2021 lalu.

Diketahui oleh Leora Blumberg dengan anggota Gonzalo DLC Salinas dan Sanji S Monageng, panel DSB WTO itu juga menyertakan sejumlah negara sebagai pihak ketiga yang terkait dengan proses sengketa ini. Negara-negara itu adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, Brasil, India, Inggris, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Singapura, Taiwan, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok.

WTO masih akan menentukan jadwal proses persidangannya.

Selain sengketa dengan UE, tak kurang produsen mobil listrik dari AS, Tesla, seperti memukul Indonesia dengan keputusannya akan membeli bahan baku baterai mobil listrik berupa nikel dari BHP Australia melalui penandatanganan perjanjian pada 22 Juli 2021. Sedangkan Indonesia sudah mengajukan peninjauan bisnis dengan Tesla untuk urusan ini.

Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar pernah menganalisis bahwa salah satu alasan Tesla membeli nikel dari perusahaan Australia itu adalah masalah konservasi lingkungan. Menurut dia, BHP lebih peduli dengan lingkungan dan berhasil menjadi penambang nikel dengan emisi CO2 terkecil. "Mereka punya komitmen untuk mengelola tambang yang ramah lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan," tutur Arcandra.

Toh sejauh ini Indonesia jalan terus dengan industri nikel termasuk kebijakan larangan ekspor bijih mentahnya. Menko Luhut menegaskan, nikel mampu memberikan keuntungan bagi negara bila diekspor.

Syaratnya, nikel tidak boleh diekspor mentah harus ada hilirisasi.

"Saya masuk ke industri nikel, mungkin dari 2014 tidak dipandang mata. Ini karena ekspornya cuma US\$ 1,1 miliar. Pada saat jadi downstream (hilirisasi) ekspornya tahun lalu mencapai US\$ 10,9 miliar," ungkap Luhut.

Untuk tahun ini, Luhut mengungkapkan, nilai ekspor komoditas mineral ini hingga Juli sudah 10,4 miliar dolar AS. "Ini akan bisa US\$ 19 miliar (untuk 2021)," tambahnya.

Jumlah itu menurut dia dapat membantu Indonesia menyeimbangkan neraca dagang. "Itu jelas akan bisa tolong ekonomi kita, ini membantu current account deficit kita," ungkapnya.

Luhut memproyeksikan pada 2024 keuntungan hilirisasi nikel diprediksi akan meningkat. Hal itu terjadi karena Indonesia diharapkan sudah bisa memproduksi baterai lithium yang berbahan dasar bijih nikel. "Dari 2024, dari nickel ore dan sampai ke lithium baterai membuat kita mudah untuk ekspor US\$ 35-45 miliar," tandasnya.

Semoga saja semua persoalan nikel Indonesia teratasi dan proyeksi-proyeksinya menjadi kenyataan. •



Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar

GELONTORAN PERHATIAN DAN KREDIT UNTUK UMKM

Dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga, penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia relatif kalah banyak. Padahal, sebagian besar usaha yang berkembang justru di segmen ini. Jadi, pemerintah mulai menggelontorkan perhatian dan pinjaman yang lebih banyak untuk UMKM.

Sekadar perbandingan, kisaran kredit untuk UMKM di Indonesia hanya sekitar 18-20 persen dari total pinjaman yang disalurkan lembaga keuangan. Dari situ, pemerintah mau mendongkrak porsi kredit untuk UMKM hingga 30 persen.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengakui,

porsi 30 persen itu pun masih kalah dibandingkan dengan angka di negara lainnya. Ia menyebut, rasio penyaluran kredit UMKM di Singapura sudah mencapai 39 persen, Malaysia 51 persen, Thailand 50 persen, Jepang 66 persen dan Korea Selatan di angka 81 persen.

Jadi, pemerintah, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Teten bakal meningkatkan porsi penyaluran kredit ke UMKM pada tahun depan. "Arahan presiden meningkatkan porsi kredit 20 persen [terhadap UMKM] menjadi di atas 30 persen pada 2022," katanya, dalam webinar bertajuk 'Holding BUMN Ultra Mikro, Upaya Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional' yang berlangsung pada Jumat, 20



Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

FOTO-FOTO: REPRO

Agustus 2021.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang mengemukakan perhatian khusus pemerintah pada usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyampaikan harapan besar agar UMKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok global.

Jokowi mengatakan pentingnya berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan tersebut. "Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global," ujarnya.

Presiden juga menekankan peningkatan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Hingga Agustus 2021, sudah lebih dari 14 juta UMKM

yang bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

"Pemerintah terus mendorong ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi

“
Presiden juga me-
nekankan pening-
katan daya saing
produk lokal dalam
kompetisi global.

perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah,” tambah Jokowi.

Selanjutnya, Menteri Koordinator

(Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan porsi kredit sektor UMKM mencapai Rp2.400 triliun pada 2024. "Untuk mendorong UMKM, pemerintah targetkan porsi kredit sektor UMKM sampai 2024 dinaikkan, dari saat ini yang tercatat rata-rata 18 persen menjadi 30 persen atau sekitar Rp2.400 triliun," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

Ia mengatakan sektor UMKM memang sangat membantu perekonomian nasional selama Covid-19. Jadi, kata dia, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan terus digiatkan yang realisasinya sejak awal Januari 2021 sampai tanggal 2 Agustus 2021 telah mencapai Rp148,08 triliun atau 58,53 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp253 triliun.

Menurut Airlangga, realisasi KUR tersebut diberikan kepada 3,99 juta



Pameran UMKM.

• INFO EKONOMI

debitur, sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 tercatat sebesar Rp272,81 triliun dengan rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) sebesar 1,02 persen. Sedangkan target penyaluran KUR dari tahun 2015 sampai dengan 2021 terus meningkat dari Rp30 triliun menjadi Rp253 triliun.

Penyaluran KUR pada masa pandemi memang menurun tajam dari sebesar

tanpa agunan juga akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta dan meningkatkan plafon KUR maksimal dari sebelumnya hanya Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar. "Ini bisa menjadi shift capital, UMKM bisa memperbesar kapasitas usahanya, terutama UMKM yang memiliki inovasi bisnis yang baik," imbuhnya.

Teten menjelaskan, saat ini ruang

erti perbankan, gadai, group lending, BPR dan fintech. Kemudian sebanyak lima juta melalui rentenir dan tujuh juta melalui kerabat.

Eks Kepala Staf Kepresidenan ini menambahkan, saat ini produk pembiayaan di sektor UMKM sudah banyak, namun masih belum fokus, tidak terintegrasi dan menyasar objek yang sama. "Pada 10 tahun terakhir, postur UMKM tidak mengalami perubahan, masih didominasi usaha mikro dengan omzet Rp 2 miliar setahun angkanya 99,6 persen," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Teten berharap, nantinya dengan terbentuknya holding ultra mikro BUMN akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapat akses pendanaan dengan tingkat bunga yang kompetitif, pendampingan maupun pengembangan usaha.

Dengan berbagai upaya itu, Teten juga membawa kabar baik bahwa nasib UMKM di tengah pandemi hanya menggerus sekitar 500 ribu dari 64 juta unit UMKM. "Dulu ADB (Bank Pembangunan Asia) memprediksi separuh UMKM akan gulung tikar. Jumlah UMKM itu 64 juta, 50 persen lebih ada di sektor pertanian, tapi ternyata prediksi meleset. Survei BPS Terakhir hanya 500 ribuan yang gulung tikar, terutama yang terkait dengan usaha sekolah, pariwisata, dan perkantoran," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Menurut dia daya tahan UMKM itu disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dinilai cukup tepat. Beberapa program telah mampu menyelamatkan pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Program yang pertama adalah restrukturisasi pinjaman karena banyak UMKM yang selama pandemi pendapatan mereka turun, tidak mampu membayar bunga dan penundaan cicilan.

Selain itu program kredit usaha rakyat (KUR) yang dinilai Teten cukup membantu. Program itu menurutnya memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku usaha. "KUR tahun lalu Bahkan bisa sampai nol persen, tahun ini total sampai akhir tahun hanya 3 persen saya kira pelaku usaha masih bisa," jelasnya.

Pemerintah juga mengarahkan ang-



Ekspor UMKM.



Direktur Utama BRI Sunarso.

Rp18,99 triliun per Maret 2020 menjadi hanya sebesar Rp4,76 triliun pada Mei 2020. Namun, penyaluran KUR pada 2021 meningkat kembali, dengan penyaluran Rp25,47 triliun per Maret 2021 dan Rp16,83 triliun di Mei 2021.

Sedangkan Teten menegaskan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

penyaluran kredit masih sangat terbuka. Alasannya, masih terdapat 30 juta pelaku usaha mikro yang belum mengakses layanan pembiayaan formal dari total 57 juta pelaku Umi di seluruh Indonesia.

Perinciannya, sebanyak 15 juta telah terlayani melalui keuangan formal sep-

garan belanja pemerintah 40 persen untuk membeli produk UMKM. Hal itu sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha. "Untuk nilai anggaran itu 446 triliun, dari LKPP saya dapat laporan sekarang sudah penyerapan 27 persen. BUMN juga bikin pasar digital untuk menyerap produk UMKM dan itu sekitar 30 triliun," jelasnya

Ia meyakini pendekatan dari hulu sampai hilir yang telah dilakukan dapat menyelamatkan bisa menyelamatkan UMKM. "Dua pendekatan ini bisa menyelamatkan lah," tuturnya.

Selanjutnya Teten juga menyinggung soal kinerja sektor pertanian. Menurutnya, di tengah turunnya pertumbuhan ekonomi nasional akibat pandemi, sektor pertanian mengalami pertumbuhan "Sektor pertanian di tengah pandemi tumbuh 12 persen ketika ekonomi nasional turun ini (pertanian) tumbuh," kata Teten

Teten bilang, kendala yang dihadapi petani adalah kurangnya permodalan. Selain itu petani juga kerap kali mengalami kendala pada pemasaran produk pertanian.

"Di sektor pertanian di Indonesia ini rata-rata petani kecil, perorangan berlahan sempit. Cukup sulit untuk menjamin suplai kepada pasar baik kuantitas maupun standard produk, karena itu perbankan ga mau masuk membiayai, penyerapan KUR kurang dari 20 persen yang masuk ke sektor pertanian," katanya

Menurut dia solusi yang diperlukan adalah adanya bisnis model pertanian. Tujuannya agar petani di Indonesia secara ekonomi dapat meningkat dan lebih sejahtera. "Bisnis model yang bagus untuk sektor pertanian yang kecil dan berlahan sempit dikonsolidasi lewat koperasi. Nanti koperasi yang membeli produk petani, ada kepastian harga kepastian penyerapan produk," ujarnya.

Teten juga mengemukakan koperasi nantinya diharapkan dapat menghubungkan petani dengan pasar, baik dalam negeri maupun ekspor. "Karena itu kami akan memperkuat pembiayaan untuk koperasi, supaya koperasi bisa membeli produk petani. Kalau model ini sudah terbangun maka Bank mau membiayai di hulunya. Dipastikan

Bisnis model ini hulu dan hilir nya terhubung," jelasnya

Ia menilai saat ini model pemberian bantuan subsidi bibit atau pupuk kurang relevan. Inovasi harus lebih menyeluruh agar ke depan bisnis model di sektor pertanian dapat dirasakan oleh petani. "Kami berkomitmen akan mengembangkan model bisnis ini, kami akan bekerjasama dengan local hero yang sudah mulai membangun bisnis model sektor pertanian untuk kita gedein," tandasnya.

Nah, bagaimana cara memperoleh fasilitas untuk UMKM itu? Pemerintah melalui bank BUMN menyediakan fasilitas itu, termasuk KUR tanpa agunan. Dalam hal ini, bank yang paling banyak menjangkau UMKM adalah Bank BRI yang menyalurkan hingga 80,6 persen

"Porsi kredit UMKM BRI tersebut akan terus ditingkatkan dan BRI menargetkan angka ini akan tembus mencapai 85 persen pada 2025," ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu, 15 Agustus 2021.

Per Mei 2021, BRI berhasil menyalurkan kredit kepada segmen UMKM senilai Rp723 triliun, sementara nilai total kredit UMKM perbankan nasional sebesar Rp1.024,40 triliun. Pencapaian ini menjadikan BRI sebagai bank UMKM terbesar di Indonesia dengan market share mencapai 70,66 persen. Sunarso mengungkapkan pihaknya akan terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui dua cara, yakni yang pertama menaikkan kelas pelaku UMKM dan yang kedua mencari sumber pertumbuhan baru melalui segmen Ultra Mikro.



Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki,

kreditnya untuk UMKM..

Hingga akhir Juni 2021, penyaluran kredit BRI secara konsolidasian mencapai Rp929,40 triliun, tumbuh positif dibandingkan dengan penyaluran kredit pada akhir kuartal II 2020 sebesar Rp 922,97 triliun. Apabila dirinci, kredit UMKM BRI telah mencapai Rp749,33 triliun atau meningkat jika dibandingkan periode Juni 2020 yang sebesar Rp725,27 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut membuat porsi kredit UMKM BRI naik menjadi 80,62 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 78,58 persen.

"Jadi, sering orang bilang bahwa UMKM itu harus diadvokasi. Saya bilang, tidak. Saya bilang, UMKM itu harus diedukasi. Lebih penting mengedukasi daripada mengadvokasi. Kenapa demikian?"

"Kalau mengadvokasi kita itu menempatkan UMKM di bawah dan kemudian bank, lembaga keuangan, itu di atas. Maka kemudian diadvokasi ke atas. Sesungguhnya kalau kita bisa edukasi, mereka bisa sejajar dengan bank atau lembaga pembiayaan. Maka sekarang kita fokus saja pada edukasi UMKM," imbuh Sunarso.

Nah, sudah mendapat KUR tanpa agunan, juga beroleh pendidikan. •



Presiden RI Joko Widodo.

FOTO-FOTO: REPRO

Bola Liar Amendemen UUD 1945

PELUANG 100 PERSEN JOKOWI 3 PERIODE

Gagasan amendemen terbatas UUD 1945 menjadi liar. Di awal diklaim hanya untuk mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, besar celahnya untuk disusupi agenda menambah masa jabatan presiden.

Dalam Pasal 37 UUD 1945 disebutkan bahwa pengajuan perubahan pasal-pasal baru konstitusi dapat diadakan bila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Untuk mengubah pasal-pasal sidang harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan putusan untuk mengubah pasal-pasal hanya dapat dilakukan den-

gan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari seluruh anggota MPR.

Perlu diingat bahwa gagasan amendemen terbatas UUD 1945 berasal dari MPR RI masa jabatan 2014-2019 yang merekomendasikannya kepada MPR RI periode 2019-2024.

Namun, pada 21 November 2019, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, meng-

akui ada masukan dari DPR RI tentang penambahan masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode. Ketika disinggung soal urgensi perubahan masa jabatan presiden, Arsul menyebut usul tersebut datang dari Fraksi NasDem di DPR.

Pernyataan Arsul kala itu disambut baik oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan menyatakan bahwa terbuka ke-



Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

ungkinan wacana itu dikaji oleh Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan.

Selasa 26 November 2019, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengutarakan bahwa gagasan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode datang dari masyarakat. Hal itu dikatakan Bambang di tengah kunjungannya ke DPP PKS Jakarta untuk membahas wacana amendemen UUD 1945.

Pengamat politik yang juga dosen ilmu politik di UIN Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, amendemen UUD 1945 bisa saja terwujud. Apalagi, mayoritas partai politik (parpol) parlemen saat ini adalah rekan koalisi pemerintah. Ia khawatir parpol koalisi pemerintah tidak mempunyai sikap jelas terhadap isu amendemen ini.

"Jadi, kalau parpol koalisi sudah berkehendak, kun fayakun, jadi tuh barang (amendemen UUD 1945). Berbeda ceritanya kalau yang mengusulkan amendemen itu partai oposisi, pasti susah," kata Adi kepada Info Indonesia, Minggu (22/8/2021).

Apabila rencana amendemen disetujui maka peluang perpanjangan jabatan presiden atau perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bisa dipastikan cukup besar. Bahkan peluangnya 100 persen lolos karena pertama kali diwacanakan oleh parpol koalisi pemerintah.

"Kalau bicara peluang, 100 persen berpeluang disetujui oleh mereka (jabatan presiden tiga periode). Itu sangat menyebarkan," kata dia.

Namun, dalam pandangan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, rakyat tidak membutuhkan amendemen konstitusi. Kata Adi, yang dibutuhkan rakyat adalah kecukupan makan, lapangan pekerjaan, dan kemudahan ekonomi lainnya.

Dia menegaskan bahwa rencana amendemen UUD 1945 hanya untuk kepentingan segelintir elite politik. Para penggagasnya sama sekali tak berhak mengatasnamakan rakyat.

"Rakyat itu tidak tahu dengan isu amendemen. Rakyat itu maunya bisa

makan, bisa kerja, dan ekonomi mereka tumbuh, serta pandemi COVID-19 bisa segera selesai," kata dia.

Selain itu, Adi meminta agar seluruh parpol yang berada dalam koalisi segera menyikapi ramainya isu amendemen UUD 1945 dengan membuat pernyataan politik.

"Segera hentikan, ini isu konyol yang membawa kembali ke zaman kegelapan atau orde baru," tegasnya.

Sependapat dengan Adi, Pakar Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo, menilai, realisasi amendemen UUD 1945 harus mempertimbangkan moral rakyat. Bukan sekadar didasari kepentingan politik praktis semata.

"Sebenarnya agenda itu (penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode) dimungkinkan, hanya saja akan munculkan resistensi dari masyarakat," kata Wasisto.

Perlu Konsensus

Sementara itu, pengamat politik dari

Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Haryadi, menilai, secara normatif amendemen ke-5 dimungkinkan dilakukan sepanjang diusulkan oleh 1/3 anggota MPR merujuk pada pasal 37 UUD 1945 dan rekomendasi Panitia Ad Hoc II BP MPR periode 2019-2024.

Ketentuan jumlah pengusul 1/3 jumlah anggota MPR ini berpotensi memun-

lah kelompok yang mengusung perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kemudian, kelompok yang kemungkinan menolak amendemen ke-5 seperti yang dihembuskan Partai NasDem maupun Partai Demokrat.

Polarisasi isu tersebut menunjukkan bahwa belum ada konsensus politik yang kuat di antara faksi-faksi di MPR.

“Dengan begitu, amendemen terbatas hanya akan bersandar pada konsensus politik yang dapat saja berubah dalam prosesnya dan bisa meluas seperti membuka kotak pandora politik,” kata Ade.

Dalam pandangannya, isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, termasuk isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sampai 2027 merupakan wacana dari luar MPR. Jika isu tersebut mendapat dukungan masyarakat luas maka bisa menjadi daya tarik bagi fraksi-fraksi di MPR.

Tapi, bila benar menjadi agenda amendemen makan bisa berarti kemunduran bagi demokratisasi yang sedang dibangun, merusak kaderisasi kepemimpinan nasional yang selama ini telah berlangsung, serta bangunan ketatanegaraan kita.

Kata Ade, rasionalitas pembatasan periode jabatan presiden adalah untuk mencegah terjadi penumpukan kekuasaan di tangan presiden dan potensi presiden tergelincir dalam perilaku otoritarian akibat kekuasaan yang terlalu lama. Dengan demikian, isu jabatan presiden tiga periode perlu dikritisi, terlebih saat ini terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, ada dua opsi yang dapat dipilih dalam menyikapi isu amendemen ke-5. Pertama, fraksi-fraksi di MPR perlu membuat konsensus tentang perubahan yang dilakukan dan menggelar uji publik secara terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga lebih matang, tidak sekedar agenda kekuasaan yang elitis.

Kedua, isu amendemen ke-5 ditunda atau dibatalkan hingga menemukan waktu yang lebih tepat. “Hal ini dengan pertimbangan urgensi politik dimana semua komponen perlu fokus pada masalah penanganan pandemi dan memberi ruang bagi publik untuk terlibat secara aktif,” katanya.

PPHN Tidak Relevan

Dari kalangan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengkomodir PPHN tidaklah tepat. PPHN disebutkan sudah tidak kompatibel dengan kondisi demokrasi saat ini.



Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti.



Pengamat politik yang juga dosen ilmu politik di UIN Jakarta, Adi Prayitno.

culkan dua kekuatan di dalam MPR. Pertama kelompok yang dimotori oleh DPD dengan isu memperkuat kewenangan DPD. Kedua, kelompok yang dimotori oleh PDIP, Golkar dan Gerindra dengan isu PPHN dan menambah kewenangan MPR.

Sementara itu, kelompok potensial lainnya yang belum terkonsolidasi ada-

Hal ini merupakan titik rawan yang dapat memicu terjadinya gejolak politik.

Karena itulah perlu konsensus politik yang kuat sebagai koridor bersama tentang substansi amendemen. Apalagi, Pasal 37 UUD 1945 hanya mengatur perubahan tidak bisa dilakukan pada pasal tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata dia, saat ini Indonesia sudah memiliki UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan tersebut mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP).

Apabila masih terdapat kritik terhadap pembangunan, kekeliruan bukan pada aturannya melainkan pada pelaksanaan

MPR untuk memiliki kontrol terhadap presiden tidak sesuai dengan penyelenggaraan negara yang modern. Di sisi lain, ia khawatir amendemen UUD 1945 akan ditunggangi kepentingan politik lain.

Terlebih, MPR dan DPR memiliki kepentingan yang berbeda-beda. DPR memiliki keinginan untuk memperkuat DPD, sementara MPR ingin memperkuat posisi lembaganya.

masuk ke dalam amendemen UUD 1945. Alasannya, agar setiap presiden terpilih bisa menjalankan kesinambungan dalam visi dan misi.

Ia lalu membandingkan dengan situasi kala Indonesia masih menggunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), di mana visi dan misi pemimpin negara terjaga dengan baik karena keberadaan GBHN. Sementara, presiden saat ini memiliki visi dan misi dengan



Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani.

di lapangan. PPHN tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan terkini karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan situasi zaman sebelum reformasi 98, presiden dipilih oleh MPR.

Dalam kondisi sekarang, PPHN tidak akan memberikan implikasi tata hukum negara dan MPR tak bisa menjatuhkan presiden apabila terdapat program yang tidak dijalankan.

"MPR tidak bisa berbuat apa-apa karena presiden bukan dipilih MPR. Kalau mau menjatuhkan presiden, harus melalui pemakzulan," ujar Bivitri.

Selain itu, Bivitri menilai, keinginan

"Sangat mungkin Pasal 37 UUD 1945 menghasilkan agenda baru, bisa muncul keterkaitan argumen satu pasal dan satu pasal lain," katanya.

Untuk itu, amendemen UUD 1945 perlu dicegah sejak awal agar tak menjadi bola liar, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Jangan sampai jadi agenda karena pasti bisa lolos, seperti UU Cipta Kerja dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegasnya.

Berbeda dengan Bivitri, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai PPHN perlu di-

fokus yang berbeda.

"Misalnya di masa SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), tidak terlihat konteks infrastruktur. Sedangkan Jokowi ada kecenderungan infrastruktur," katanya.

Dia berharap amendemen UUD 1945 tidak melebar ke agenda lain. Presiden tetap perlu dipilih langsung oleh rakyat serta fokus menjalankan PPHN. Untuk itu, amendemen UUD 1945 perlu diawasi oleh tim ahli ketatanegaraan yang diisi oleh pakar independen.

"Termasuk penyusun UUD dulu, seperti Amien Rais, Hamdan Zoelva, dan lainnya," terang Suparji. •



PERINGATAN HUT KE-76 RI TETAP MERIAH DI TENGAH PANDEMI

Sudah lebih tiga perempat abad Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Peringatan hari ulang tahun proklamasi ke-76 tahun ini tetap berlangsung meriah dan khidmat dalam situasi pandemi.

Tentu saja Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana Merdeka, pada Selasa, 17 Agustus 2021. Kepala Negara hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin.

Peringatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI kali ini mengusung tema "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh". Tema

ini mencerminkan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik.

Bertindak selaku komandan upacara pada kesempatan kali ini yaitu Kolonel Pnb. Putu Sucahyadi, S.AP., M.Sc., M.M.S. Pria kelahiran Denpasar, 9 Oktober 1977, ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999 yang saat ini menjabat sebagai Asops Kosekhanudnas II Makassar.

Laporan komandan upacara dan

dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali yang menggelegar dari arah Taman Monumen Nasional dengan disertai bunyi sirene panjang menandai dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, membacakan naskah proklamasi yang pada 76 tahun lalu dikumandangkan proklamator, Ir. Soekarno, sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka dari belenggu penjajahan.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo



selaku inspektur upacara memimpin para peserta upacara baik yang hadir secara terbatas di lokasi maupun yang mengikuti secara virtual untuk mengheningkan cipta. Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, kemudian memandu pembacaan doa.

Berbeda dengan Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bersama Istri Wury Estu Handayani mengenakan pakaian adat asal Sukabumi, Jawa Barat. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani yang turut hadir dalam upacara Kemerdekaan juga mengenakan pakaian tradisional Bundo Kandang, asal Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Dalam upacara kali ini, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tergabung dalam Tim Indonesia Tangguh mengemban amanat mengibarkan bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota Paskibraka Ardelia Muthia

Zahwa, perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih. Ardelia, yang lahir di Tebing Tinggi, pada 6 Desember 2004, saat ini menempuh pendidikan di SMA Harapan I Medan.

Tiga lainnya dari Kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Aditya Yogi Susanto sebagai Komandan Kelompok 8 (Provinsi Gorontalo), Dika Ambiya Rahman sebagai pembentang bendera (Provinsi Jawa Barat), dan Ridho Hadfizar Armadhani sebagai pengerek bendera (Provinsi Lampung).

Pengibaran bendera Merah Putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya pun berlangsung khidmat oleh para Paskibraka. Sang Merah Putih tampak gagah berkibar di halaman Istana Merdeka.

Bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka ialah Kapten Infanteri Suryadi Nataatmaja. Lulusan Akademi Militer tahun 2012 ini bertugas sebagai

Danki Pandu Udara Denpandutaikam Brigif Para Raider 18/2 Kostrad.

Sedangkan Perwira Upacara adalah Brigadir Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya. Novi yang lahir di Bangkalan, Madura pada 10 November 1971, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993.

Paskibraka 2021 yang anggotanya berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia sebelumnya telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 12 Agustus 2021 di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Sebanyak 68 pemuda telah mengucapkan Ikrar Putra Indonesia dan siap untuk menjalankan tugasnya.

Aksi para prajurit TNI AU yang melakukan fly pass pesawat tempur turut memeriahkan upacara kali ini. Sesaat sebelum melintas di langit Istana Merdeka, salah satu pilot pesawat tempur tersebut memberikan ucapan selamat HUT ke-76 Kemerdekaan RI.

Dengan menerbangkan pesawat Tempur F-16 Garuda Flight peringatan hari kemerdekaan kali ini menjadi bergemuruh dan tetap meriah.

Dari siaran langsung yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, tampak formasi pesawat tempur TNI AU itu disebut sebagai "Garuda Flight" yang terdiri dari delapan pesawat F-16 Fighting Falcon. Garuda Flight membentuk formasi arrowhead yang dipimpin oleh Letkol Penerbang Agus Dwi Aryanto sebagai flight leader.

Tepat pukul 10.37 WIB, formasi

1.000 kaki mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 Kemerdekaan RI 2021 Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh. Salam Swa Bhuwana Paksa," kata dia.

Setelah itu, masyarakat dan para undangan disuguhi persembahan lagu "Syukur" dan "Maju Tak Gentar" oleh Gita Bahana Nusantara yang ditayangkan secara virtual.

Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa rangkaian Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai dilakukan menjadi penutup

serta masyarakat dari berbagai wilayah baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara dan menteri hadir secara langsung dalam upacara peringatan tersebut, yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Kerika Ketua DPR Puan Maharani bertugas membacakan naskah proklamasi, naskah tulisan tangan Soekarno pun ditampilkan. Naskah tersebut merupakan naskah asli yang ditulis oleh Presiden RI pertama Soekarno setelah dirumuskan dan sebelum dibuat salinannya dalam bentuk ketikan oleh Sayuti Melik.



Sementara itu, para Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terdahulu mengikuti jalannya upacara secara virtual dari kediaman masing-masing. Harap maklum, upacara peringatan proklamasi kemerdekaan kali ini berlangsung dengan sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Oleh sebab itu, mantan presiden dan mantan wakil presiden Indonesia hanya menyampaikan pesan kemerdekaan melalui video yang ditayangkan oleh YouTube Sekretariat Presiden. Mereka adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, dan



Garuda Flight melintas di atas Istana Merdeka dan melakukan manuver bomb burst pada ketinggian 1.000 kaki di atas permukaan laut. Dari ketinggian itu pula Letkol Agus mengucapkan selamat HUT ke-76 RI.

"Kami elang-elang Angkatan Udara penjaga Tanah Air, dari ketinggian

rangkainya upacara. Meski digelar secara terbatas dengan menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi, upacara peringatan pada 17 Agustus 2021 ini tetap berlangsung khidmat.

Jalannya prosesi upacara turut diikuti secara virtual oleh tamu undangan

Wakil Presiden RI ke-11.

O ya, Nusantara flight juga ikut memeriahkan HUT ke 76 RI. Nusantara flight terdiri dari enam helikopter milik TNI Angkatan Udara yang membawa Bendera Merah Putih raksasa ukuran 20 x 30 meter. Parade helikopter pembawa bendera Merah Putih ini pertama kali dalam sejarah Kemerdekaan NKRI.

Enam helikopter yang membawa dua bendera berukuran 20 x 30 meter melintas dari arah kiri podium dan disambut tepuk tangan para hadirin. Tim atraksi helikopter itu bernama Nusantara Flight dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Mauludin Mulyono. Dia adalah alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Ia merupakan alumni akademi angkatan udara tahun 2002.

"Keseluruhan rangkaian formasi helikopter ini merupakan bukti nyata sinergitas Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu 76 Kemerdekaan RI tahun 2021, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh," ujar pembawa acara.

Tak mengherankan jika Presiden Jokowi menyempatkan diri menemui dan berfoto bersama para penerbang Garuda Flight dan Nusantara Flight di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Kamis, 19 Agustus 2021. Acara berlangsung sebelum Presiden kembali ke Jakarta selepas kunjungan kerja di Kabupaten Madiun, tetangga Magetan.

Para penerbang Garuda Flight dan Nusantara Flight itulah yang melakukan atraksi flypass dan terbang membawa bendera raksasa Merah Putih, di atas Istana Merdeka, Jakarta, pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, Selasa, 17 Agustus 2021 lalu.

Selain berdialog singkat, Presiden juga berfoto bersama dengan para penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, Helikopter NAS-332 Super Puma, dan Helikopter EC-725 Caracal TNI AU. Presiden menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para penerbang Garuda Flight dan Nusantara Flight. "Terima kasih telah melakukan atraksi pada Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala Sekretariat Pres-

iden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Pangkoopsau II Marsda TNI Minggit Tribowo, Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Untung Suropati, dan Kadispenau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan bahwa kehadiran Presiden di Lanud Iswahjudi akan makin memotivasi

melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," kata Marsma Indan.

Dalam foto bersama tersebut tampak antara lain, Danskadron Udara 3 Letkol Pnb. Agus Dwi Ariyanto sebagai flight leader Garuda Flight, Danskadron Udara 6 Letkol Pnb. Akhmad Mulyono sebagai flight leader Nusantara Flight, Danskadron Udara 8, Danskadron Udara 46, dan para penerbang dari skadron udara 3, 16, 6, 8, dan 45.



para prajurit TNI AU, khususnya para penerbang F-16 dan helikopter. "Kami bangga dengan kehadiran langsung Bapak Presiden di Pangkalan TNI AU Iswahjudi. Tentunya apresiasi yang diberikan Bapak Presiden makin memotivasi segenap prajurit TNI AU dalam

Dirgahayu HUT ke-76 proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga upacara kali ini akan memotivasi kita semua berbuat lebih baik lagi dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Sampai jumpa di acara peringatan 77 tahun proklamasi RI tahun depan. •



Ladang Energi Surya

TAK MINDER DENGAN SINGAPURA

Singapura baru saja menuntaskan proyek ladang energi surya terbesarnya. Rupanya Batam akan menyusul membuka ladang serupa. Apa kabar ladang energi surya Cirata?

Negeri yang sangat mafhum keterbatasan lahannya, Singapura, dengan sekitar enam juta penduduk, meresmikan salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di dunia pada pertengahan Juli 2021 lalu. Proyek ini mencakup area setara dengan 45 lapangan sepak bola! Secara total, ada 122.000 panel surya yang mengapung di permukaan air.

Terletak di reservoir (waduk resapan) di bagian barat Singapura, pengembang proyek pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (PV) 60

megawatt itu adalah anak perusahaan Sembcorp Industries (SCIL.SI). Keterangan resmi Sembcorp menyebutkan, ladang panel surya terapung dapat membantu mengurangi emisi karbon sekitar 32 kiloton per tahun, sebanding dengan menghilangkan 7.000 mobil dari jalan.

Menurut pernyataan bersama dari pengembang dan Badan Utilitas Air Publik Singapura (PUB), panel surya terapung memiliki kelebihan tersendiri. Berbeda dengan panel surya atap konvensional, yang terapung dapat berkinerja antara 5-15 persen lebih

baik karena efek pendinginan air, dan tidak terpengaruh oleh naungan dari bangunan lain.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong meresmikan upacara peluncuran ladang energi surya Sembcorp Tengeh Floating Solar Farm itu pada Rabu, 14 Juli 2021. Terungkap pula pemerintah Singapura menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya akan meningkat empat kali lipat pada 2025 mendatang.

Nah, beberapa hari saja setelah pengumuman tuntasnya proyek Sembcorp, muncul kabar ladang en-



ergi surya serupa akan dibangun pula di kawasan Batam, Kepulauan Riau. Singapura dan Batam hanya perlu waktu tempuh sekitar 30 menit dengan speed boat.

Adalah Sunseap Group yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung, yang mungkin menjadi terbesar di dunia. Sunseap Group adalah pengembang, pemilik, dan operator sistem energi surya di Singapura, dengan lebih dari 2000 megawatt (daya puncak) untuk proyek energi surya di seluruh Asia.

Frank Phuan, salah satu pendiri dan kepala eksekutif Sunseap mengatakan kepada Reuters, perusahaannya berencana membangun ladang surya terapung terbesar di dunia di dekat kota Batam, sekitar 50 kilometer tenggara Singapura. Sistem fotovoltaik (FV) terapung di Batam itu diperkirakan memiliki kapasitas 2,2 gigawatt (daya puncak).

Proyek ini akan mencakup 1600 hektar (4000 acre) dari Waduk Duri-angkang di Pulau Batam. Pengembangan proyek energi surya di Batam akan menelan biaya sekitar dua juta dolar AS.

Kesepakatan antara Sunseap dan

otoritas zona bebas Batam Indonesia (BP Batam) untuk melanjutkan proyek tersebut ditandatangani pada 19 Juli 2021 lalu. "Proyek tunggal ini akan menggandakan seluruh portofolio kami. Yang lebih penting lagi, membangun kemampuan kami menuju proyek penyimpanan energi dan surya skala besar. Ladang energi surya terapung akan sangat membantu mengatasi kendala lahan yang dihadapi bagian perkotaan di Asia Tenggara dalam memanfaatkan energi terbarukan," kata Phuan.

Pembangunan proyek, yang akan dibiayai melalui utang bank dan modal Sunseap, akan dimulai pada 2022. Perusahaan ini menargetkan proyeknya tuntas pada 2024.

Penempatan ladang energi surya terapung di reservoir akan memiliki manfaat tambahan untuk mengurangi penguapan. Pada saat yang sama, kedekatan dengan air akan memungkinkan pembangkit listrik tenaga surya beroperasi pada suhu yang lebih rendah, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Frank Phuan juga mengatakan proyek "skala besar" dapat membuka jalan bagi proyek energi bersih skala

serupa di Asia Tenggara. "Proyek skala besar ini merupakan tonggak penting bagi Sunseap segera setelah kami menyelesaikan pembangkit listrik tenaga surya terapung lepas pantai pertama di Singapura di sepanjang Selat Johor," katanya.

Perluasan proyek ladang energi surya terapung ini menimbulkan perlombaan untuk memenuhi permintaan pasokan listrik nol-emisi untuk Singapura. Alasannya, niat Sunseap memasok listrik ke Singapura juga menjadi target konsorsium Sun Cable Australia.

Proyek Sun Cable – didukung oleh miliarder Mike Cannon-Brookes dan Andrew Forrest – ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya 10GW (terbesar di dunia) di Northern Territory dan baterai raksasa hingga 30 GWh untuk memasok Singapura dengan listrik terbarukan melalui kabel bawah laut.

Dikenal sebagai Australia-ASEAN Power Link, proyek Sun Cable akan membutuhkan 3.750 km hubungan bawah laut. Bandingkan saja proyek Pulau Batam yang akan berlokasi hanya 50 km dari Singapura.

Sunseap juga merancang proyek

energi surya akan menghasilkan pembangkit yang memasok energi non-intermiten sepanjang waktu. Itu berarti penyimpanan baterai akan menjadi bagian dari proyek. Sebagian dari listrik yang dihasilkan akan diserap di Batam, sementara selebihnya dapat diekspor ke Singapura melalui kabel bawah laut.

Saat ini, Batam memiliki total kapasitas pembangkit listrik sebesar 540 MW dari pembangkit gas, uap, dan diesel.

energi berkelanjutan.

Untuk menghilangkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari proyek semacam itu, PUB mengadakan penilaian dilakukan sebelum memasang panel surya untuk memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap satwa liar atau kualitas air. "Itu dirancang dengan hati-hati untuk meningkatkan aliran udara dan memungkinkan sinar matahari melewati air (untuk mencapai kehidupan akuaria-"

berapa inovasi dalam proses konstruksi. Jig yang dibuat khusus meningkatkan tingkat perakitan panel hingga 50 persen, dan pencitraan elektroluminesensi drone canggih menunjukkan panel yang rusak untuk diganti, memastikan sistem berjalan secara optimal.

Sukses dengan proyek Tengeh, PUB mengidentifikasi dua waduk lagi, Seletar Bawah dan Pandan, untuk pengembangan ladang energi surya



"Investasi Sunseap ini akan menjadi dorongan tepat waktu bagi industri Batam karena mereka berusaha mengurangi jejak karbon dari operasi mereka," kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

Dengan proyek di wilayahnya sendiri dan akan bertambah di Batam, Singapura akan menjadi negara terkemuka di bidang energi terbarukan untuk menghadapi perubahan iklim. Proyek Sembcorp saja Singapura juga menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia dengan sistem pengolahan air yang sepenuhnya ditenagai oleh

tik)," kata Jen Tan, kepala regional di Sembcorp Industries.

Celah antara panel surya membantu aliran udara dan membiarkan sinar matahari mencapai kehidupan akuatik. Aerator tambahan dipasang untuk menjaga kadar oksigen.

Pelampung dibuat dengan high-density polyethylene (HDPE), bahan food grade bersertifikat yang dapat didaur ulang, tahan UV dan korosi. PUB dan Sembcorp akan memantau reservoir dengan cermat selama operasi pembangkit.

Sembcorp juga menerapkan be-

berikutnya. Tender proyek ini kabarnya akan berlangsung pada November 2021. Termasuk untuk mempelajari kelayakan ladang tenaga surya, dengan pekerjaan yang memakan waktu sekitar dua tahun untuk diselesaikan.

PUB menyatakan sistem PV surya yang diusulkan akan mengambil kurang dari 20 persen dari luas permukaan di kedua waduk, yang juga menjadi tuan rumah kegiatan rekreasi memancing dan olahraga air. Rancangan rencana untuk kedua lokasi termasuk ruang untuk olahraga air rekreasi untuk melanjutkan, dengan jalur kompetitif

untuk dayung yang akan disisihkan di Waduk Pandan.

Dr Ngin Hoon Tong dari Energy Research Institute di Nanyang Technological University (ERI@N) mengatakan bahwa selain tidak memakan lahan, pembangkit listrik tenaga surya terapung mungkin memiliki hasil energi yang lebih tinggi daripada yang berbasis lahan. Air akan membantu mendinginkan modul surya, sehingga kinerjanya lebih baik. Ia menambah-

Di Indonesia, pada Januari 2020, grup energi terbarukan yang berbasis di Abu Dhabi, Eni Emirat Arab, Masdar dan perusahaan energi Indonesia PT PJB telah mencapai kesepakatan keuangan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Fotovoltaik Terapung Cirata. Energi yang akan dihasilkan mencapai 145 MW dari ladang energi surya di bagian 225 ha dari Waduk Cirata di Jawa Barat.

Masdar dan PJB akan memasok

energi berkontribusi pada dua pertiga emisi global, dan 81 persen dari sistem energi global masih didasarkan pada bahan bakar fosil, persentase yang sama seperti 30 tahun lalu.

Tambahan pula, peningkatan intensitas energi ekonomi global (jumlah energi yang digunakan per unit kegiatan ekonomi) melambat. Pada 2018 intensitas energi meningkat sebesar 1,2 persen, laju paling lambat sejak 2010.

Nah, ladang energi surya yang



kan bahwa sistem PV terapung juga mengurangi kehilangan air melalui penguapan dan mengekang pertumbuhan alga di waduk.

Namun, kolega Ngin, Profesor Subodh Mhaisalkar, direktur ERI@N, memperingatkan bahwa panel surya akan menghalangi sinar matahari mencapai kedalaman reservoir. Hal ini dapat mempengaruhi kandungan oksigen di dalam air dan mempengaruhi aktivitas biologis lainnya di reservoir. "Jadi penyebarannya harus berjalan beriringan dengan analisis dan pemantauan dampak lingkungan," katanya.

produknya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan konstruksi pembangkit tersebut kini telah dimulai dan penyelesaiannya dijadwalkan pada kuartal keempat tahun 2022. Setelah selesai, proyek tersebut akan menjadi pembangkit listrik PV terapung terbesar di negara itu dan Asia Tenggara.

Apapun, beralih ke energi bersih adalah kunci untuk memerangi perubahan iklim. Namun World Economic Forum menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, transisi energi mengalami stagnasi. Konsumsi dan produksi en-

menjadi alternatif energi fosil, tumbuh di seluruh dunia dengan kecepatan yang cukup cepat. Namun, seperti halnya hampir semua hal, ada batasan-batasannya. Ada keterbatasan dengan sumber daya, pekerja terlatih, modal, dan waktu. Jelas, Singapura telah memutuskan bahwa proyek ladang energi surya terapung sangat masuk akal untuk kebutuhan dan sumber dayanya.

Batam, tetangga Singapura, ternyata mendapat imbas positifnya juga. Tak perlu minder dengan Singapura rupanya. Atau malah semakin sebaliknya? •



Greysia Polii dan Apriyani Rahayu

MANISNYA EMAS OLIMPIADE

Satu-satunya medali emas di Olimpiade Tokyo untuk Indonesia diraih dari cabang bulu tangkis untuk nomor ganda putri.

Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, yang tetap menjaga tradisi bulu tangkis Indonesia, berjaya di pesta olahraga di dunia tersebut. Namun, perjalanan keduanya tidak semulus yang dibayangkan.

Pasangan nomor enam dunia, bah-

kan nyaris tak lolos Olimpiade. Serta tampil sebagai pasangan yang tak diunggul atau unseeded players.

Tapi keduanya akhirnya berhasil medali emas, yang membuat nama Indonesia pun bersanding dengan China. Sebagai negara yang pernah memenangkan setiap nomor pada cabang bulu tangkis.

Keberhasilan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu tentu disambut suka cita oleh seluruh masyarakat. Bonus dari pemerintah sebesar Rp5,5 miliar dari pemerintah langsung dikasih kepada keduanya. Tapi tidak sampai di situ, keduanya juga diganjar hadiah yang luar biasa dari banyak pihak.





Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali pun sampai tak bisa berkata apa-apa, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberi perhatian kepada atlet Indonesia.

Karena tidak hanya Greysia dan Apriyani saja yang merasakan manisnya medali emas itu, sang pelatih, Eng Hian pun ikut mendapat hadiah. Mereka mendapatkan rumah di kawasan elite Pantai Indah Kapuk II dengan nilai masing-masing Rp3,55 miliar untuk atlet. Sementara Eng Hian senilai Rp1,4 miliar.

"Saya kira ini satu hal yang sangat positif dan sangat bagus apresiasi dari masyarakat terhadap prestasi di bidang olahraga khususnya bulu tangkis," kata Amali.

"Jadi makin banyak masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi putra putri terbaik bangsa ini, semoga menjadi pemicu anak-anak kita untuk jadi atlet," dia menambahkan.

Tidak hanya rumah, uang tunai hingga mobil, hingga sebidang tanah juga

didapatkan oleh kedua atlet ini dari banyak pihak.

Greysia Siap Pensiun

Namun hadiah sesungguhnya, terutama untuk Greysia Polii adalah ketika dirinya berhasil menjual sepasang sepatu kepada Presiden Joko Widodo. Ketika bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada 13 Agus-

tus lalu, Greysia menawarkan sepatu produk UMKM miliknya.

Greysia menerangkan, bahwa usaha itu dilakukan untuk mempersiapkan diri jika pensiun sebagai atlet dalam waktu dekat. Sebab dirinya telah berumur 34 tahun.

"Pak, saya sudah siap kalau gantung raket mau jadi pengusaha. Saya sudah punya produknya dan usaha saya su-



dah jalan,” tutur Greysia. Kemudian, dia menunjukkan produk usahanya berupa sepatu kulit kepada Jokowi.

“Ini produknya, pak,” kata Greysia sambil menunjukkan sepatu kulit berwarna hitam kepada Jokowi.

“Beli satu ya, Pak, harganya Rp 1.100.000. Saya enggak ngasih loh ya, Pak. Ini Bapak beli produk saya. Ini UMKM soalnya. Produksinya di Malang,”

“Kok mahal? Ini sepatu yang saya pakai saja harganya cuma Rp 300.000,” tutur Jokowi.

Greysia lantas menjelaskan, sepatu produksi UMKM miliknya itu merupakan produk fashion dan menggunakan bahan kulit. Dia juga menyebutkan bahwa semua kru pembuatan sepatu adalah orang Indonesia.

Adapun dari tahapan desain produk,

but sesuai dengan ukuran yang biasa dipakainya.

Hal itu menurut Jokowi adalah hal yang baik, dan patut didukung. Karena tak semua atlet berpikir untuk memikirkan masa pensiun semasa masih dalam kondisi prima.

“Peraih medali emas di Olimpiade Tokyo ini diam-diam rupanya telah menyiapkan rencana masa depannya setelah tak lagi mengayun raket. Ia sudah punya usaha sepatu dan pakaian yang produksinya di Malang,” tutur dia.

Menurut Jokowi, tawaran itu menjadi kebetulan karena dirinya sedang ingin menambah koleksi sepatu. “Kebetulan juga, sudah saatnya saya menambah sepatu sneakers,” tuturnya.

Target Juara Dunia

Namun, sebelum gantung raket, ada satu target besar yang harus dicapai Greysia. Yakni Kejuaraan Dunia BWF yang dijadwalkan digelar di Huelva, Spanyol pada 12-19 Desember.

“Greysia kemungkinan masih main sampai akhir tahun karena di situ masih ada satu keinginan Greysia untuk Kejuaraan Dunia,” ungkap pelatih Greysia, Eng Hian.

“Semoga dikasih kesempatan, tidak ada cedera sehingga bisa melanjutkan prestasi selanjutnya di kejuaraan dunia,” tambah dia.

Dalam perjalanan kariernya sebagai pebulu tangkis, Greysia Polii telah merasakan berbagai gelar juara bergengsi, mulai dari emas SEA Games 2019 bersama Apriyani Rahayu, emas Asian Games 2014 dengan Nitya Krishinda Maheswari, dan beberapa gelar juara BWF World Tour maupun Superseries.

Namun dari sekian banyak gelar yang diraih, Greysia belum pernah sekali pun mencicipi manisnya podium utama Kejuaraan Dunia. Pencapaian terbaiknya adalah raihan tiga medali perunggu pada edisi 2015, 2018, dan 2019.

Sebelum ke Kejuaraan Dunia, Eng Hian menyebut Greysia/Apriyani bakal turun di dua kejuaraan beregu, yakni Piala Sudirman 2021 dan Piala Uber 2020.

Piala Sudirman dijadwalkan berlangsung di Vantaa, Finlandia pada 26 September-3 Oktober, diikuti Piala Thomas dan Uber 2020 pada 9-17 Oktober di Aarhus, Denmark. ●



Greysia Polii memperlihatkan produk usahanya berupa sepatu kulit kepada Jokowi.

kata perempuan berdarah Manado itu.

Mendengar hal tersebut, Jokowi terkejut dan bertanya mengapa harga sepatu itu cukup mahal. Bahkan Presiden membandingkan sepatu yang ia pakai, harganya jauh berbeda.

merakit sepatu, sampai final pascaproduksi 100 persen dikerjakan di Indonesia. Jokowi pun memahami penjelasan tersebut.

“Oh iya, iya,” ucap Jokowi. Akhirnya, Jokowi membeli sepasang sepatu terse-

Gubernur Untuk Negeri



untuk memilih klik www.infoindonesia.id

Polling Gubernur Untuk Negeri memasuki tahap final
Mulai sekarang, kami menampilkan nama-nama yang berhasil
menduduki 10 besar pada hasil polling kedua.



Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta



Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan



Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat



Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah



Wahidin Halim
Gubernur Banten



Zulkieflimansyah
Gubernur Nusa Tenggara Barat



Isran Noor
Gubernur Kalimantan Timur



Sri Sultan Hamengkubuwana X
Gubernur D.I. Yogyakarta



Erzaldi Rosman Djohan
Gubernur Kepulauan Babel



Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat



SIAPKAN APLIKASI DI TELEPON GENGAM JIKA BERWISATA

Sambil mengupayakan pembukaan destinasi wisata di wilayah PPKM Level 1 sampai dengan 3, muncul rencana penerapan wajib vaksin bagi pengunjungnya yang dapat disensor melalui aplikasi di telepon genggam. Bagaimana ceritanya?

Menggerakkan sektor pariwisata dengan sekitar 34 juta pelaku usaha, namun tetap aman dari Covid-19 dapat menjadi peluang dan tantangan. Peluang bagi sektor pariwisata untuk tetap berkelanjutan dan tantangan

untuk mengatasi hambatannya.

Nah, upaya untuk tetap aman dari Covid-19 antara lain adalah menerapkan wajib vaksinasi bagi para pengunjung destinasi wisata. Memang baru rencana sebenarnya.

Namun, Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sudah mengemukakan niat pemerintah akan menerapkan aplikasi PeduliLindungi di restoran, kafe, dan destinasi wisata. Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi pangkalan data (data-



base) warga yang sudah mendapat suntikan vaksin Covid-19 itu dapat menunjukkan apakah seseorang sudah atau belum mendapat vaksin.

Dengan penggunaan aplikasi ini, kemungkinannya para warga yang belum mendapat suntikan vaksin Covid-19 akan terhambat masuk ke destinasi wisata. "Masih dibahas," ujar Menteri Sandi mengenai penerapan aplikasi ini.

Berbicara dalam Weekly Press Briefing, Senin, 23 Agustus 2021 yang berlangsung dalam kunjungannya ke Bandung, Jawa Barat, Sandi menyebut penggunaan aplikasi PeduliLindungi di berbagai destinasi wisata ataupun sentra ekonomi kreatif bisa menjadi solusi. Jadi, bukan sekadar tantangan dan peluang rupanya.

Tujuannya agar pelaku parekras bisa tetap bertahan di tengah pandemi dan tetap terlindung dari wisatawan yang belum mendapat vaksinasi. Sandi mengakui pemerintah tengah menyiapkan integrasi aplikasi PeduliLindungi dengan data vaksinasi

dari semua daerah.

Nantinya, mobilitas penduduk seperti ke restoran, tempat wisata, dan tempat publik lainnya akan bergantung pada status vaksinasinya dan wajib menunjukkan sertifikat vaksin. "PeduliLindungi ini akan menjadi gold standard kita dalam berkegiatan. Untuk penggunaan sertifikat vaksin di berbagai destinasi dan sentra ekraf (ekonomi kreatif) masih kita diskusikan dengan Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)," ungkapnya.

Untuk itu, yang perlu disiapkan oleh pelaku parekras adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin di tiap destinasi dan sentra ekonomi kreatif. Selain itu, ujarnya, Kemparekras juga memicu penerapan sertifikat CHSE atau standars yang berbasis Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

Penerapan PeduliLindungi akan dipelopori oleh destinasi wisata yang

telah meraih sertifikat CHSE. Sebagai gambaran, hingga pertengahan Agustus 2021, pendaftaran yang masuk sebanyak 5.497 usaha. Tercatat 829 usaha yang belum terverifikasi dan 4.668 usaha yang sudah diverifikasi.

Yang sudah diverifikasi selanjutnya akan mendapat sertifikat Indonesia Care. Syaratnya, pada checklist atau verifikasi CHSE memperoleh nilai 85–100.

Sandi merasa angka tersebut masih cukup kecil dan terbatas. Oleh karena itu ia perlu meningkatkan cakupan dari sertifikasi CHSE dan mensosialisasikan tentang aplikasi peduli lindungi kepada para pelaku ekraf dan pariwisata.

Ia ingin, ke depan, jika program ini sudah terintegrasi para pelaku ekraf sudah siap dan tidak gagap dalam membaca data yang ada di dalam aplikasi. Saat ini, ia terus menyiapkan para pengelola hotel, restoran, pariwisata agar paham bahwa integrasi ini menjadi standar baru dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Aplikasi PeduliLindungi ini sudah

di download 38 juta kali. Sekarang kita lakukan integrasi dengan kartu vaksinasi dan juga dengan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability)," ungkapnya.

Sejauh ini, penerapan aplikasi PeduliLindungi sudah diuji coba di sejumlah hotel berbagai tingkatan. Mulai dari kawasan Nusa Dua, Bali hingga hotel-hotel kecil di Sumedang, Jawa Barat.

Di sisi lain, kementerian yang dipimpin Sandi juga menggenjot vaksinasi di enam perguruan tinggi di bawah Kemenparekraf mulai dari Medan, Palembang, Bandung, Bali, Lombok, Makassar menjadi sentra vak-

dipakai dalam hal skrining masyarakat saat bekerja di kantor selama perpanjangan PPKM dan syarat masuk mal.

Malah Sandiaga berencana mengkolaborasikan aplikasi PeduliLindungi dengan AntriQue untuk mencapai standar protokol kesehatan yang dapat dipatuhi pelaku usaha parekraf. Kolaborasi antara aplikasi PeduliLindungi dengan AntriQue ini dinilai efektif untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat.

Menteri Sandi menyebutkan kolaborasi ini mempermudah pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan aplikasi semacam AntriQue sebagai reader bagi pengunjung. Misalnya saja

digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi kolaborasi Kemenparekraf, Ikatan Alumni ITB, Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat, dan sejumlah pelaku usaha tersebut. Menurut dia kolaborasi semacam ini penting untuk mencapai standar protokol kesehatan yang dapat dipatuhi pelaku usaha pariwisata, ekonomi kreatif, dan masyarakat di era pariwisata baru.

"Bahwa pasca vaksinasi, tahapan berikutnya adalah protokol kesehatan. Kita ada CHSE, kita ada beberapa panduan dalam berkegiatan yang mudah-mudahan bisa terintegrasi dengan Aplikasi Peduli Lindungi maupun aplikasi lainnya," ungkap Sandiaga Uno.



sinasi. Juga ada badan otorita seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo yang ikut untuk mendorong dan mengkonversikan sebagian fasilitasnya menjadi sentra vaksinasi.

"Selanjutnya, memperhatikan kondisi Covid-19 di wilayah masing-masing, apabila situasinya sudah melandai, maka destinasi wisata dan sentra ekraf dapat dibuka bertahap," ujarnya.

Sandiaga menjelaskan, penggunaan kartu vaksin wisata melalui PeduliLindungi bertujuan memudahkan masyarakat saat berkunjung ke tempat wisata. Terlebih aplikasi juga

mengelola pengunjung restoran di luar mal.

"Saya menemukan beberapa inovasi, ada AntriQue, jadi bagaimana antrean itu bisa dikelola dengan baik dan ini sesuai dengan rencana kita dalam rangka menggerakkan ekonomi, bahwa restoran-restoran yang di luar mal juga akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang membutuhkan banyak reader (alat pemindai)," jelas Sandi ketika meninjau Sentra Vaksinasi Ganesha, Bandung, Jawa Barat, Senin, 23 Agustus 2021.

Aplikasi AntriQue merupakan buatan anak bangsa. Aplikasi ini akan

Namun, Sandi mengaku juga bahwa penerapan aplikasi PeduliLindungi untuk destinasi wisata masih menghadapi tantangan terkait penyebaran jumlah penerima vaksin covid-19 yang belum merata antardaerah. "Karena ada daerah yang belum terdistribusi (vaksin) dengan baik. Ada daerah yang baik seperti Jakarta, tapi di Jawa Barat saja masih cukup tertinggal," sebutnya.

Sandi sudah mendengar langsung dari Jawa Barat --provinsi dengan ribuan destinasi parekraf termasuk desa-desa wisata--bahwa distribusi vaksin memang belum memadai meskipun berjarak dekat dengan

pemerintah pusat di Jakarta. Adalah Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengemukakannya.

"Saya titip Pak Menteri di level pemerintah pusat, tolong saling ingatkan, bahwa penduduk Jabar 50 juta jiwa, suplai 15 juta dosis per bulan harus lancar biar teknis penyuntikan dan lain-lain urusan di pemerintah daerah," kata Kang Emil, panggilan akrab Gubernur Jabar.

Terkait 15 juta vaksin untuk Jabar per bulan, Sandiaga mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian Kesehatan. "Tadi targetnya 15 juta dosis per bulan akan kita aman-kan untuk Jabar," kata dia.

Sedangkan Kang Emil menambahkan, seiring dengan menurunnya zona resiko di Jawa Barat maka destinasi wisata sudah boleh dibuka secara gradual. Namun ia mengingatkan bahwa pembukaan objek wisata tersebut harus memperhatikan berbagai aspek aturan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Manusia (PPKM). "Batasin dulu (kapasitas) 25 persen, cek dulu pengunjungnya. Kalau evaluasinya bagus, nanti dinaikan (kapasitas)," ujarnya.

Toh Kang Emil meminta pula supaya semua pihak bersabar. "Tapi tetap, sukseskan dulu PPKM ini, sebuah pengorbanan dari warga. Sambil dibuka juga pelan-pelan, kami salurkan juga bansos tunai kepada puluhan ribu pelaku ekonomi kreatif di Jabar," tandasnya.

Dia mengatakan jika upaya pengendalian berjalan konstan, berdasarkan modeling yang disusun oleh ahli matematika dan epidemiolog, Indonesia akan pulih dari pandemi saat kuartal IV tahun 2021 seiring dengan penanganan COVID-19 yang konsisten.

Bukan hanya di Bandung, saat berkunjung ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu, 22 Agustus 2021, Sandi lagi-lagi mendorong daerah-daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 hingga Level 3 bisa membuka tempat wisata secara terbatas.

"Keputusannya ada di pemerintah kabupaten, kami memberikan arahan bahwa jika level satu sampai tiga bisa

(membuka tempat wisata) secara terbatas," ungkap Sandi kepada wartawan di sela kunjungannya ke obyek wisata Situ Cangkung, Desa Cangkung, Kecamatan Leles, Garut, Minggu, 22 Agustus 2021.

Di kabupaten yang pernah terkenal dengan jeruk dan dodol ini Sandi mengemukakan, penerapan PPKM oleh pemerintah saat ini telah menunjukkan hasil awal yang baik karena ada penurunan kasus positif Covid-19. Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pun saat ini sudah mulai kembali bangkit.

"Dampak yang dirasakan oleh pelaku wisata dan ekonomi kreatif

Menparekraf pun mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan untuk dapat terus ditingkatkan secara ketat dan disiplin.

"Presiden Jokowi telah mengumumkan ada roadmap bagaimana kita harus dapat meningkatkan protokol kesehatan dan juga testing, tracing, dan treatment. (Vaksinasi) ini bagian dari pilar ketiga itu, terutama bagi sektor parekraf dengan 34 juta masyarakat," ucapnya.

Soal vaksinasi ini, Sandiaga pun mengakui masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ada 34 juta pelaku industri pariwisata dan ekraf yang menjadi sasaran.



yang 80 persen omzetnya turun saat ini mulai meningkat," katanya.

Toh Menteri Sandi mengemukakan Menteriannya sudah mulai mensosialisasikan kepada pengelola destinasi wisata terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi. "Masyarakat nantinya juga tidak perlu repot bawa kartu vaksin. Karena semuanya akan terintegrasi," kata Sandi.

Di beberapa daerah, Sandiaga mengatakan, angka vaksinasi Covid-19 sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Seperti DKI Jakarta untuk dosis pertama telah mencapai 104 persen dan 61 persen untuk dosis kedua.

Selain itu, ia berupaya mempercepat realisasi bantuan dengan anggaran Rp 300 miliar.

"Masih panjang perjalanan seiring dengan serbuan vaksin di destinasi wisata dan sentra ekraf. Beberapa program sudah diluncurkan seperti bantuan," kata Sandiaga.

Termasuk sosialisasi paket membantu hotel menyediakan tempat istirahat para nakes di sekitar Rumah Sakit. "Jumlah (anggarannya) Rp 300 miliar. Kita pastikan tersedia untuk bulan-bulan ke depan," tandasnya.

Panjang umur perjalanan, panjang usia parekraf Indonesia. •



BEGINI PENERAPAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Seperti apa penerapan aplikasi PeduliLindungi? Ada kekuatan dan kelemahannya.

Aplikasi PeduliLindungi sudah muncul sejak Juni 2021. Pada mulanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama platform layanan kesehatan Halodoc menghadirkan layanan pengobatan jarak jauh (telemedicine) di dalam PeduliLindungi. Aplikasi ini juga dapat melacak persebaran COVID-19.

Sosialisasi pun berlangsung sejak saat itu. Antara lain Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 6 Juni 2020 dan Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 14 Juni 2020, ada penambahan layanan.

Aplikasi PeduliLindungi menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi surveillance atau pengawasan untuk pemerin-

tah dengan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar COVID-19 selama 14 hari ke belakang. Kedua, aplikasi tersebut juga terhubung dengan berbagai operator seluler. Dengan demikian, hasil tracking dan tracing aplikasi ini

dapat memberikan peringatan kepada nomor pengguna yang berjarak 2—5 meter dari orang yang didiagnosis pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pantauan (ODP) untuk segera menjalankan protokol kesehatan COVID-19 melalui layanan konsultasi dokter.

Jadi, aplikasi ini juga sangat berguna bagi petugas di bandara, pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan, atau di tempat lainnya untuk mengetahui apakah seseorang sudah menjalani program Vaksinasi atau belum. Toh muncul pro dan kontra soal siapa yang berwenang melakukan scan pada QR code ketika masyarakat akan masuk pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan. Malah, kini aplikasi ini akan diterapkan untuk kawasan destinasi wisata.

Dalam praktiknya, aplikasi ini akan otomatis memberikan info dengan warna merah (belum divaksin), kuning (vaksin 1 kali tetapi tidak kontak



erat dengan pasien COVID-19), hijau (vaksin dua kali dan tidak kontak erat dengan pasien positif COVID-19). Aplikasi ini akan langsung terkoneksi ke pangkalan data (database) PeduliLindungi dan hanya memberikan data agregat jumlah pengunjung saja ke sistem di mal sehingga pengelola bisa mengetahui kapasitas tempatnya untuk membatasi pengunjung yang masuk. Begitu juga agaknya untuk kawasan destinasi wisata seperti hotel dan juga desa-desa wisata dan pusat pemasaran produk ekonomi kreatif.

Dalam hal ini, pengelola lokasi kunjungan tidak mengambil data pribadi pengunjungnya. Jadi aplikasi PeduliLindungi tinggal menjaga keamanan server-nya atau peladen saja karena berpotensi menjadi target peretasan.

Sebenarnya, menurut pakar siber keamanan Dr Pratama Persadha, kalau sistem ini diterapkan, bagus untuk security. Namun, jadi tidak adil untuk masyarakat yang tidak memiliki smartphone karena mereka tidak akan bisa masuk mal dan destinasi wisata.

Sebaiknya Pemerintah membuat sistem khusus untuk pengunjung dan wisatawan ini. Misalnya, ada sistem barcode scanner yang langsung terkoneksi ke aplikasi PeduliLindungi.id. Pengunjung cukup menunjukkan kartu vaksin yang sudah di-print, lalu sistem bisa otomatis memverifikasinya.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha memandang perlu ada aplikasi khusus pada PeduliLindungi.id untuk mengecek kebenaran quick response (QR) Code atau QR Code vaksin milik calon pengunjung. Hal ini penting untuk mencegah pengumpulan data pribadi secara ilegal.

"Dengan adanya scan QR Code PeduliLindungi.id, aplikasi tersebut tidak mengumpulkan data, atau hanya bisa memunculkan nama sesuai dengan KTP, misalnya, sehingga mengurangi berbagai kemungkinan pengumpulan data secara ilegal," kata Pratama Persadha yang dikutip Kantor Berita Antara, Sabtu, 14 Agustus 2021.

Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC menyambut baik aturan masuk mal dengan syarat sertifikat vaksin Covid-19 karena

membuka kembali kesempatan roda ekonomi berjalan. Namun, di sisi lain, Pratama memandang perlu aturan yang jelas agar tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Misalnya, terkait dengan scan pada QR Code saat masuk mal, apakah setiap orang berhak melakukan scan tersebut.

"Hal ini menjadi penting karena begitu QR Code dilakukan scan, akan muncul data pribadi masyarakat, seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor telepon. Hal ini yang dikhawatirkan menjadi pintu

scan pihak lain, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya mengumpulkan nomor seluler dan data dari berbagai pihak," kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.

Hanya nama, NIK, dan nomor seluler, menurut Pratama, pencarian data selanjutnya bisa ditambahkan dari beberapa sumber kebocoran data, seperti kebocoran data Tokopedia yang ada lebih dari 91 juta data penduduk yang valid beserta alamat. Di sini bisa menjadi pintu masuk kejahatan



masuk kejahatan," kata dosen pas-casarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.

Oleh sebab itu, perlu arahan lebih rinci dari pemerintah dan Satgas Covid-19. Hal ini, kata Pratama, bisa dimengerti bila yang melakukan scan adalah aparat dan petugas, seperti polisi, tentara, Satgas Covid-19, maupun tenaga kesehatan (nakes) yang membantu vaksinasi maupun tracing. "Akan tetapi, bila yang melakukan

tan perbankan, seperti yang menimpa wartawan senior Ilham Bintang.

Menurut Pratama, yang paling bisa dilakukan salah satunya adalah pengecekan keluar masuk mal, bandara, maupun stasiun langsung melihat pada aplikasi PeduliLindungi.id yang diinstal oleh masyarakat. "Bila perlu, disertai dengan menunjukkan KTP. Dari sini seharusnya petugas keamanan mal, misalnya, sudah bisa melakukan verifikasi," tandasnya. •



Jihane Almira Chedid

BERSINAR DI PANGGUNG DUNIA

Jihane Almira Chedid mengharumkan nama bangsa di ajang Miss Supranational 2021. Perempuan yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 4 Februari 2000 itu bahkan menyabet banyak penghargaan.

Salah satu penghargaan yang mendapat perhatian adalah keberhasilan meraih Best National Costume. Kecantikan putri dari

pasangan campuran darah Lebanon-Jawa, makin memuka dengan kostum yang terinspirasi dari kuda dari Nusa Tenggara Timur.

Yayasan Putri Indonesia menjelaskan, kostum nasional yang dikenakan pada malam final Miss Supranational 2021 yang diselenggarakan di Kota Nowy Sacz, Polandia, bertajuk "The Dashing of Equus Caballus".

Kostum nasional ini merupakan karya Levico Butik yang berkolaborasi dengan desainer Eggie Jasmin. Sinergi ini menciptakan busana glamor dan bermakna kuat dari warisan NTT.

"Terinspirasi dari kuda gagah berani asli Nusa Tenggara Timur, Equus Caballus memiliki kekuatan dan kecepatan balap yang kuat di antara banyak jenis kuda Indonesia lainnya," demikian bunyi keterangan dalam unggahan tersebut.

Kostum nasional resmi di pentas Miss Supranational 2021 ini dibuat dalam fabrikasi berlapis emas pada bustier, topi baja, dan sepatu bot untuk memancarkan aura elegan. Ada pula penggunaan material rantai emas dan ukiran hiasan emas sebagai pelindung pada headpiece.

Perpaduan kain brokat dan payet pada bagian dalam kostum memberikan sentuhan feminin.

Untuk mempercantik dan memberikan kesan mewah, terdapat ekstra pearl dan crystal drop yang diaplikasikan pada kostum tersebut, serta taburan 10 ribu berlian rhinestones.

Selain mendapat penghargaan Best National Costume, secara pribadi, Jihane juga masuk dalam 12 besar dari 40





perwakilan perempuan yang berlaga di ajang tersebut. Dia mengaku bahagia, karena dapat mengharumkan nama Indonesia, di pentas internasional.

"Saya senang sekali bisa mendapatkan prestasi ini. Mohon doanya agar saya bisa meraih yang terbaik dan membawa mahkota Miss Supranational untuk pertama kalinya," ujar Jihane.

Kuasa Usaha Ad-Interim RI di Warsawa, Taufiq Lamsuhur, mengatakan pagelaran Miss Supranational tahun ini tak seperti biasanya. Karena ada tantangan tambahan bagi para peserta akibat situasi pandemi global, sehingga tak bisa membawa tim yang lengkap.

Oleh karena itu, perwakilan RI berupaya memberikan dukungan seoptimal mungkin bagi perwakilan Indonesia di perhelatan tersebut.

Pasalnya, ajang Miss Supranational memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan budaya Tanah Air ke publik internasional, terutama di Polandia.

"Secara tidak langsung kesempatan untuk promosi pariwisata Indonesia, karena wakil Indonesia yang dikirim ke ajang tersebut adalah Putri Pariwisata Indonesia. Promosi Indonesia lainnya yang juga tidak dapat dipisahkan adalah promosi kosmetika, promosi industri mode, dan promosi industri kreatif serta keragaman dan kekayaan kebudayaan Indonesia," ujar Taufiq.

Aktif di Gerakan Sosial

Keberhasilan Jihane tentu mendapat sorotan dari publik di Tanah Air. Putri Jihad Chedid yang berdarah Lebanon dan sang ibu, Neneng Wulandari itu disebut mirip artis papan atas Hollywood, Kylie Jenner.

Jika dilihat sekilas, rambut dan mata coklat yang indah, sangat mendukung dari kecantikannya sebagai per panduan Indonesia-Lebanon.

Namun, dengan rendah hati Jihane menolak disandingkan dengan Kylie Jenner. Sebab, selain aktif sebagai duta untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia, kini Jihane sedang aktif



PROFIL

NAMA LENGKAP:

Jihane Almira Chedid

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR:

Semarang, 4 Februari 2000

NAMA AYAH:

Jihad Chedid

NAMA IBU:

Neneng Wulandari

AGAMA:

Islam

PROFESI:

Model, Aktris

HOBI:

Olahraga

PENDIDIKAN:

Universitas Bina Nusantara

KEWARGANEGARAAN:

Indonesia

PRESTASI:

- Top 10 Miss Elegance Supranational 2021
- Best National Costume Miss Supranational 2021
- Wineer Supra Fan Vote Miss Supranational 2021
- Top 12 Miss Supranational 2021

di dunia seni peran, dan memainkan sejumlah mini series berjudul "Sianida".

Salin menapaki karir di dunia seni peran, dan model, dalam beberapa unggahan di Instagram, Jihane juga aktif dalam sejumlah kegiatan sosial. Bahkan ikut aktif dalam sejumlah kegiatan dan mendirikan yayasan bernama Act Your Thoughts Movement (AYT).

"Campaign AYT merupakan gerakan aktualisasi diri untuk berani merealisasikan pikiran serta ide baik menjadi kenyataan," tulis keterangan dari yayasan ini.

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Jihane bersama AYT, melakukan sejumlah gerakan sosial, yakni memberikan akses listrik, ke Dusun Cilele, Karawang.

"Misi kami untuk menerangi desa itu yang dalam beberapa dekade terakhir tidak memiliki listrik. Targetnya setiap dusun dapat merasakan kesetaraan, saat rumah mereka terang-benderang seperti di daerah perkotaan. Anak-anak bisa belajar dengan baik, dan ekonomi bisa berjalan optimal," harap dia. ●



Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

YANG BIKIN GREGETAN DI TENGAH PANDEMI

Imunisasi atau vaksinasi Covid-19, selain uji usap atau swab test PCR (Polymerase Chain Reaction, reaksi rantai polimer), adalah dua hal penting dalam pengendalian pandemi Covid-19. Namun, implikasinya sangat luas termasuk dalam aspek bisnis dan moralitas.

Aspek bisnis dan moralitas menjadi sorotan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang tampak geregetan, kesal dan jengkel soal penanganan Covid-19. Malah ia menyebut penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah gagal.

Kegagalan itu, ungkapnya, terlihat dari tiga indikator. Pertama, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kurang selaras dengan laju vaksinasi. Di lapangan, PSBB berlanjut dengan PPKM berlangsung intensif, namun

pelaksanaan vaksinasi tersendat-sendat.

"Tanpa vaksin PSBB gagal," kata Zulkhas (nama ringkasnya) dalam pidato di peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS), Kamis, 19 Agustus 2021. Ketua Umum PAN ini menambahkan, faktor kedua, kegagalan itu kian parah dengan kemunculan varian delta virus corona.

Khusus mengenai tersendatnya program vaksinasi, kegagalan tersebut menurutnya disebabkan adanya

kepentingan sejumlah pihak. "Kenapa vaksin gagal, saya tahu Pak Luhut, Pak Erick sudah kontrak harusnya kita Desember sudah 10 juta, Juni harusnya sudah vaksin 80 juta, 90 juta Juni. Karena apa? Ada kepentingan-kepentingan yang bermain. Ini menyangkut anak, menyangkut cucu, menyangkut nyawa, menyangkut rakyat. Kok masih main-main? Amoral Pak yang begitu," ujarnya.

Yang ketiga, Zulkifli berharap pemerintah dapat menyampaikan bantuan secara cepat kepada masyarakat yang

terdampak pandemi Covid-19. Namun dirinya menyayangkan masih adanya yang menyalahgunakan bantuan kepada masyarakat.

"Orang susah Pak, nggak boleh kerja, warung tutup, semua nganggur, perlu duit, perlu bantuan Pak, kan ada uangnya Rp 1.000 triliun lebih bisa dikirim bisa dibantu, tapi apa Pak? Masih ada yang bermain, jadikan sembako 300 ribu cuma dibeli 150 ribu, 150 bisa dibagi-bagi, ini moral hazard Pak," ucapnya.

"Jadi saya bilang, Bapak sudah kerja keras Pak Presiden. Tapi ini harus ditertibkan, PPKM, vaksin, bantuan cepat dan jangan ada yang bikin cari bisnis, Pak," tandasnya.

Sejauh ini pemerintah menargetkan sekitar 208,26 juta lebih orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 sebanyak dua dosis. Namun, cakupan vaksin dosis pertama hingga 18 Agustus 2021 baru mencapai 55,19 juta lebih atau 26,50 persen dari sasaran vaksinasi. Pada tanggal yang sama, yang telah menerima suntikan vaksinasi dosis kedua tercatat 29,40 juta orang lebih atau 14,12 persen dari target.

Soal centang perenang vaksinasi sebenarnya tak luput dari perhatian organisasi kesehatan dunia (WHO, World Health Organization). Penasihat Senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Satyani Saminarsih melihat kelemahan pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia adalah ketimpangan vaksin Covid-19 yang lebih banyak tersedia di kota besar di Pulau Jawa.

Diah menjelaskan, WHO sudah sering berbicara mengenai keadilan vaksin Covid-19 atau vaccine equity di tingkat global dan tingkat nasional. Di tingkat global, Indonesia disebut berhasil mencapai keadilan vaksin karena memiliki stok vaksin Covid-19 untuk masyarakat.

Penasihat Senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Diah Satyani Saminarsih

"Indonesia ada di posisi tengah, di mana dia punya vaksin dari program bilateral antar negara atau langsung dengan perusahaan vaksin. Masalahnya ada di tingkat nasional, masih ada barrier (hambatan) vaksinasi di daerah," kata Diah dalam webinar bersama AJI, Rabu, 18 Agustus 2021.

Menurut dia hambatan vaksinasi Covid-19 di daerah mestinya bisa ditangani agar tak timbul ketimpangan

but olehnya harus bisa teratasi oleh pemerintah pusat.

Capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih terbatas di kota-kota besar di Jawa-Bali. Ketimpangan capaian vaksinasi ini tampak jelas di provinsi luar Jawa-Bali.

Contoh mencolok adalah DKI Jakarta yang telah mencapai 102,8 persen dari target sasaran. Sedangkan vaksinasi dosis kedua di DKI Jakarta sudah



Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi

capaian vaksinasi. Hambatan seperti kesulitan akses ke layanan kesehatan, kesulitan administrasi saat hendak melakukan vaksinasi, bahkan sampai hambatan keter-

sediaan vaksin Covid-19 disediakan.

mencapai 57,41 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 14,19 persen.

Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Maluku Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Maluku. Bersama lima provinsi lainnya, capaian mereka masih di bawah 10 persen.

Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengatakan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta lebih tinggi karena kondisi penularan di Ibu Kota cukup masif. Dia juga menyinggung lambatnya penyuntikan vaksin di daerah jadi sebab capaian vaksinasi Covid-19 rendah.

Sempat muncul vaksin berbayar yang akhirnya dibatalkan, begitulah gambaran vaksinasi yang membuat Zul Hasan tampak geregetan. Belum lagi soal test PCR

Apakah soal PCR juga bikin geregetan? Kita telusur saja. •





MASALAH DI SEKITAR VAKSINASI

Masalah vaksinasi setidaknya mencakup tiga bagian besar: Pengadaan dan distribusi vaksin, serta pelaksanaan vaksinasi. Juga celah-celah di antara ketiganya.

Dari sisi pengadaan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan sekitar 400 juta dosis lebih vaksin Covid-19 hingga akhir tahun 2021. Skema pengadaannya melalui transaksi bisnis, hibah serta kerja sama multilateral.

Tentang jumlah 400 juta dosis itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan peruntukannya bagi 200 juta rakyat Indonesia hingga akhir 2021. "Kalau masing-masing membutuhkan dua dosis,

dibutuhkan sekitar 400 juta dosis," kata Menteri Budi dalam keterangan pers kedatangan vaksin Pfizer yang dipantau dari Jakarta, Kamis petang, 19 Agustus 2021.

Sebelumnya, pada akhir 2020, Menkes mengungkapkan, pemerintah sudah meneken kontrak dengan Sinovac dari Tiongkok untuk pengadaan 125 juta dosis vaksin dan opsi (pilihan) dapat menambah. Kemudian kontrak pengadaan dengan Novavax Amerika Serikat sebanyak 130 juta dosis dengan opsi tambahan.

Selanjutnya pemerintah juga segera memfinalisasi kontrak pengadaan vaksin dengan AstraZeneca sebanyak 100 juta. Sebagian firm (pasti) dan sebagian opsi. Terakhir, dengan Pfizer juga sebanyak 100 juta dimana sebanyak 50 juta firm dan sisanya opsi. "Total 400 juta dosis vaksin yang diupayakan. 100 juta dari China, Sisanya dari Inggris, AS, Kanada, dan Jerman," ujar Menkes.

Namun, hingga memasuki semester II, sampai Juli 2021 Menkes mengungkapkan Indonesia baru berhasil mem-

peroleh 90 juta dosis vaksin Covid-19. Pengadaan sisanya akan berlangsung tahap demi tahap hingga akhir 2021.

Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah memiliki perjanjian memperoleh sekitar 370 juta dosis vaksin tambahan. "Sedangkan sisanya untuk kontrak yang sudah ditandatangani mudah-mudahan tanggalnya masih bisa kita pastikan agar kita bisa memperoleh 430 juta dosis sampai akhir tahun," katanya.

Menurut Budi pengadaan vaksin tersebut terdiri atas beberapa perjanjian yang sifatnya 'business to business' (B to B) atau transaksi bisnis, kerja sama multilateral dan juga hibah dari negara-negara tetangga.

"Kedatangan vaksin Pfizer ini adalah bagian dari business to business antara pemerintah Indonesia dengan Pfizer dari Amerika. Ada empat jenis vaksin yang kita lakukan business to business yaitu Sinovac, Astrazeneca, Pfizer dan Novavax," katanya.

Dari empat jenis vaksin yang pengadaannya dilakukan secara business to business, kata Budi, tiga antaranya

sudah diterima di Indonesia, yakni Sinovac sejak 13 Januari 2021, AstraZeneca pada Agustus 2021. "Jadi kedatangan Pfizer sebesar 1,5 juta dosis dan AstraZeneca sebesar 567 ribu dosis ini adalah kedatangan pertama dari vaksin business to business kita," katanya.

Budi mengharapkan sampai akhir tahun Indonesia bisa memperoleh 50 juta dosis tambahan dari Pfizer secara business to business. "Sekitar 20 juta hingga 30 juta vaksin business to business dari Astrazeneca untuk melengkapi 175 juta dosis vaksin Sinovac," sambungnya.

Ia menjelaskan, pemerintah hingga saat ini masih menunggu persetujuan dari Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan akan keluar persetujuannya.

"Di luar vaksin yang business to business ini, kita juga mengikuti kerja sama multilateral dengan GAVI WHO untuk memperoleh 180 juta dosis lagi. Dari GAVI kita sudah menerima vaksin Astrazeneca di awal dan kita akan juga menerima vaksin Pfizer dan Sinovac

yang rencananya akan diterima mulai bulan ini juga," katanya.

Jadi, pada Agustus 2021 kata Budi, Indonesia akan menerima vaksin Pfizer dari business to business sebesar 1,56 juta dosis. Juga Sinovac sekitar 4,6 juta dosis. Ia menambahkan di luar dari skema transaksi bisnis dan multilateral, Indonesia juga menerima bantuan atau hibah dari beberapa negara sahabat salah, satunya sebanyak 450 ribu dosis dari Belanda yang datang pada menyusul kedatangan pada malam ini sebesar 450 ribu dosis.

"Apa yang dilakukan pemerintah Belanda itu akan sangat bermanfaat bagi akselerasi program vaksinasi Indonesia dan akan memberikan contoh bahwa untuk menyelesaikan pandemi ini semua bangsa, semua rakyat di dunia harus memperoleh akses ke vaksinasi," kata Menkes Budi.

Kerja sama multilateral dengan GAVI bagian dari program organisasi kesehatan dunia (WHO) kisaran jumlah dosis antara 3-20 persen populasi penduduk. "Itu sebabnya kenapa kita perlu membuat kontrak dengan opsi



• INFO KHUSUS

dari beberapa supplier vaksin yang ada tadi supaya kalau ada kepastian dari pengadaan vaksin yang sifatnya gratis, kita tidak usah ambil dari mereka (antara empat perusahaan.”

“Tetapi kalau misalnya vaksin dari GAVI ini belum bisa terdeliver sesuai dengan jadwal yang kita inginkan, kita sudah mengamankan pasokan dari perusahaan-perusahaan tersebut se-

pkannya Menko Luhut berperan dalam pengadaan vaksin Moderna dari Amerika Serikat. “Kita juga akan dapat dari Amerika Serikat atas bantuan Pak Menko (Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan), empat juta dosis (vaksin COVID-19) Moderna yang juga kita akan dapat dalam waktu singkat,” kata Budi, Kamis, 1 Juli 2021 lalu.

Sedangkan Menlu Retno lebih ser-

gadaan hingga distribusi dikoordinir oleh pemerintah dalam hal ini melalui BUMN terutama PT Biofarma.

Menteri Erick pernah mengemukakan langkah pengadaan terpusat bukanlah bentuk monopoli, melainkan sebagai upaya pemerintah menjaga proses vaksinasi dapat terawasi dengan baik. “Pada tahap awal pengadaan vaksin memang terkonsolidasi, jadi



cara bilateral,” ungkapnya.

Dalam praktiknya, pengadaan vaksin itu melibatkan bukan hanya Menkes, melainkan juga beberapa menteri lainnya. Sebut saja antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, malah Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menkes Budi pernah mengungkap-

ing berperan dalam pengadaan vaksin hibah dan kerja sama multilateral. Termasuk dalam kerangka kerja sama ekonomi negara-negara kawasan Asia Pasifik (APEC).

Nah, peran Menteri BUMN Erick Thohir memang tampak paling intensif. Hal itu tak lepas dari proses pengadaan vaksin Covid-19 yang diatur ketat oleh pemerintah. Bahkan dari jumlah, pen-

jangan ada kata kami tidak mau melibatkan swasta. Kami melibatkan dalam vaksinasi dan distribusi,” jelasnya.

Dia menjelaskan pengontrolan vaksin datang ke Indonesia atau diproduksi hanya oleh pemerintah. Ini adalah upaya menjaga agar vaksinasi benar-benar dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

Toh Erick menjanjikan jika tahap awal vaksinasi Covid-19 sudah berjaja-

lan, pemerintah akan membuka pengadaan vaksin yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. "Kami harus menjaga, nanti tahap berikutnya lebih berbeda," ungkap Erick.

Selain itu, Menteri BUMN menuturkan bahwa pengiriman vaksin pun menggunakan teknologi QR Code dan pelacakan. Dengan demikian, setiap vaksin dapat terlacak didistribusi ke-

vaksin hanya berapa ratus ribu rupiah dijual hingga 2.000 dolar AS," ujarnya.

Dalam proses pendistribusian, Bio Farma memiliki tanggung jawab untuk pelaksanaan distribusi vaksin sejak dari Bio Farma hingga kabupaten/kota. Pelaksanaan distribusi tersebut juga berdasarkan pada alokasi dan permintaan dari Kementerian Kesehatan.

Selain itu, distribusi vaksin Covid-19 juga tetap memperhatikan ketersediaan atau stok vaksin yang siap didistribusikan atau sudah mendapatkan lot rilis dari Badan POM. Bio Farma pun mempertimbangkan kapasitas penyimpanan di Dinas Kesehatan tempat tujuan.

Untuk produksi, per 9 Agustus 2021,

nya sudah didistribusikan ke seluruh daerah. Sekitar 50 persen dosis vaksin didistribusikan ke tujuh provinsi di Pulau Jawa serta Bali. Hal itu dikarenakan, angka kasus di wilayah tersebut yang cukup tinggi.

Sementara sisanya, disebar ke 27 provinsi di luar Jawa dan Bali. "Otomatis pembagiannya akan berbeda-beda. Mengingat jumlah vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena vaksin datangnya bertahap," sebutnya.

Kata Nadia, jumlah vaksin yang didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan di daerah juga disesuaikan dengan perhitungan. Seperti laporan stok vaksin hingga kecepatan laju penyuntikan.



mana dan digunakan kepada siapa.

Lebih lanjut, Erick menegaskan upaya pelacakan hingga setiap vaksin tersebut guna supaya tidak ada area abu-abu dan ketidakjelasan. Dia juga ingin menghindari penjualan vaksin secara bebas dengan harga yang melambung tinggi.

"Kami menghindari grey area atau black market yang akhirnya harga

total vaksin Covid-19 yang diolah di Bio Farma sebanyak 101,2 juta dosis, dengan 81,4 juta di antaranya sudah mendapatkan lot rilis dari Badan POM, dan 19,8 juta dosis masih dalam proses karantina menunggu lot rilis dari Badan POM.

Toh Kementerian Kesehatan mengakui keterbatasan stok dan teknis produksi dalam negeri menjadi kendala dalam proses pendistribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata ke sejumlah daerah. "Permasalahan sebenarnya adalah karena memang vaksinnya belum datang semua. Kita butuh vaksin 426 juta dosis. Yang kita terima sampai saat ini 130 juta dosis," kata Siti Nadia Tarmizi, Senin, 26 Juli 2021.

Menurut Nadia, dari total sekitar 130 juta dosis vaksin Covid-19 yang tersedia, sebanyak 68 juta dosis diantara-

la mengatakan, Bio Farma masih menyimpan sekitar 65 juta dosis vaksin. Sekitar 30 juta di antaranya berbentuk bahan baku yang sedang dalam proses produksi. "Sebanyak 30 juta dosis lagi dalam proses pengujian mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujarnya.

Masih akan ada tambahan pasokan vaksin dengan jumlah lebih dari 50 juta dosis, baik melalui skema bilateral, maupun multilateral, termasuk melalui Covax Facility GAVI dari berbagai merk seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna dan dari Pfizer. Kita akan lihat hingga akhir 2021.

Dari gambaran sejauh ini, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia memang rumit. Tapi, tetap saja harus terbuka terhadap evaluasi dan audit. Menghadapi Covid-19, kondisi kita memang begini adanya. •



Test PCR

RT PCR

MASIH LANDAI SEIRING PENURUNAN TARIF

Pemerintah sudah menurunkan tarif uji cepat reaksi rantai polimer (rapid test polymerase chain reaction, RT-PCR). Namun, pada pekan pertama setelah penurunan tarif, jumlah RT PCR belum melonjak.

Masih terasa mahal juga?

Bahkan kalangan pengusaha pun sempat mengeluhkan tarif RT PCR. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, misalnya pernah pemerintah menurunkan tarif Tes RT PCR.

Hariyadi juga membandingkan harga tes PCR Indonesia dengan India. Rupanya India dapat menurunkan tarif RT PCR yang dianggap lebih efektif dan akurat dari RT antigen. "Pakai PCR kan tarifnya masih Rp700 ribuan di sini. Di India sudah mengeluarkan kebijakan di Agustus itu cuma 500 rupee atau Rp97 ribu saja," ujarnya, Rabu, 11 Agustus 2021.

Beberapa hari kemudian, Presiden

Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan harga tes PCR untuk Covid-19. "Saya berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000," kata Jokowi dalam siaran yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 15 Agustus 2021.

Selain itu, Presiden juga meminta, dengan harga tersebut, hasil tes PCR bisa keluar selambat-lambatnya dalam 1x24 jam. Jokowi menegaskan, penanganan pandemi membutuhkan kecepatan.

"Saya juga minta tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksi-

mal 1x24 jam. Kita butuh kecepatan," ucapnya.

Alhasil, Kementerian Kesehatan RI resmi menurunkan harga tes swab PCR di Jawa Bali menjadi Rp 495 ribu dan di luar Jawa dan Bali menjadi Rp 550 Ribu. Selanjutnya, BUMN PT Kimia Farma melalui pengumumannya menyampaikan bahwa harga efektif tes PCR sebesar Rp 500 ribu tersebut berlaku mulai 16 Agustus 2021.

Dengan hasil 16 jam, harga ini berlaku di Jakarta, Semarang, Bandung, Medan dan Makassar. Sementara untuk swab antigen, untuk reguler dipatok Rp 85 ribu dan untuk Abbott Panbio dikenakan biaya sebesar Rp 125 ribu.



Test Antigen

Selanjutnya tak hanya BUMN, kalangan swasta seperti Bumame Farmasi mengutip akun instagram resminya @ bumame_farmasi juga mengumumkan penurunan harga tersebut. Dalam keterangannya, Bumame mengumumkan harga baru yang berlaku mulai 17 Agustus pukul 00.00 WIB di 29 cabang Bumame.

Harganya antara lain hasil 24 jam Rp 495 ribu nett, hasil 16 jam Rp 750 ribu nett, hasil 10 jam Rp 900 ribu nett. Ke-29 cabang Bumame berlokasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok Bekasi hingga Bandung.

Berikutnya Mylab Indonesia juga menyebut "harga bersahabat" untuk harga terbarunya ini. "MyLab Indonesia menurunkan harga SWAB PCR menjadi 495 ribu di seluruh lokasi MyLab (Tebet, Duren Sawit, dan Kelapa Gading)" demikian tertulis pada akun Instagram resminya @maylabIndonesia.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan berdasarkan surat edaran tahun lalu, pemerintah menerapkan batas tertinggi harga tes swab PCR maksimal Rp 900 ribu. Bila dibandingkan harga sekarang sudah terjadi penurunan harga sebesar 45 persen.

"Kenapa baru sekarang turun? Itu disebabkan karena penurunan harga

reagen dan bahan habis pakai. Pada awalnya harga reagen masih tinggi, bukan hanya itu harga barang habis pakai masing tinggi. Contohnya masker, hazmat dan sarung tangan sehingga harganya tinggi," ujarnya.

Berdasarkan evaluasi, kata Kadir, terjadi penurunan harga sehingga dilakukan penghitungan ulang unit cost dan dapat harga tertinggi Rp 495 ribu. Namun, di lapangan, sejumlah rumah

sakit dan laboratorium klinik masih bisa mengenakan biaya tambahan sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh warga yang menjalani RT PCR tetap lebih tinggi dari batas Rp495 ribu.

Tambahan biaya itu beraneka ragam, mulai dari biaya administrasi, biaya konsultasi dokter untuk menafsirkan hasil test. Ada pula rumah sakit dan laboratorium klinik yang menawarkan harga lebih tinggi untuk memperoleh



Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir .

• INFO KHUSUS

hasil yang lebih cepat.

Namun, dengan standard harga RT PCR yang ditetapkan pemerintah, hasil RT PCR akan keluar umumnya dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemeriksaan berlangsung. Alhasil, meskipun tarif resmi sudah diturunkan, belum tampak lonjakan test PCR dalam pekan pertama setelah penurunan harga.

Berdasarkan data harian Satgas

setiap juta penduduk dalam sepekan.

Dari sisi ekonomi, mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri menilai harga tes polymerase chain reaction atau PCR yang berlaku di Indonesia sebelumnya masih terlalu mahal. Harga tes dengan kisaran Rp900 ribu itu dianggap tidak dapat terjangkau untuk masyarakat dengan upah Rp3 juta per bulan.



Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani (tengah).



PCR lokal.

Covid-19 total jumlah tes PCR di Indonesia pada periode 15 Agustus-21 Agustus, total tes PCR tercatat sebanyak 233.560 tes PCR. Rata-rata harian mencapai sekitar 33 ribuan orang.

Antara 17-21 Agustus, tercatat test PCR harian secara berturut-turut adalah 35.744, 24.756, 39.353, 37.753, dan 36.825 test. Masih landai, dan jauh dari standard WHO: seribu test PCR

"Saya mengatakan misalnya kalau kita fokus ke kesehatan, PCR tidak bisa semahal sekarang. Harganya sekitar Rp 900 ribu, kalau upah minimum Rp 3 juta, enggak mungkin itu. Sangat expensive. Negara harus masuk," ujar Chatib dalam webinar bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, Ahad, 15 Agustus 2021.

Tes PCR merupakan salah satu

upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Pemerintah dianggap perlu mengejar peningkatan pengetesan dengan menjamin harga tes PCR yang terjangkau untuk semua kalangan. Chatib mengatakan percepatan vaksinasi juga penting agar negara segera lepas dari masalah Covid-19. Vaksinasi, pengetesan, hingga pelaksanaan protokol kesehatan ini berdampak terhadap pola pemulihan ekonomi.

Namun, campur tangan negara tampaknya memang selama ini belum berimbang antara anggaran untuk vaksin dan test RT PCR. Merujuk data dari Kementerian Keuangan, Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta memperlihatkan masih lemahnya perhatian terhadap testing dan tracing.

Dari total anggaran penanganan Covid-19 tahun ini sebesar Rp185,9 triliun, hanya Rp4 triliun yang digunakan untuk diagnostik yakni testing dan tracing. Jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi vaksinasi sebesar Rp58 triliun dan Rp59,1 triliun untuk pengobatan.

Menurut Andree permintaan untuk tes PCR kini sudah pasti tinggi, jadi jalan menekan harga adalah dengan memastikan berlimpahnya pasokan. Namun, Indonesia tidak memproduksi PCR dan sepenuhnya bergantung pada impor.

Jadi, kata dia, perlu peninjauan terhadap kondisi bottleneck karena jumlah importir yang terlalu sedikit. "Dengan impor PCR didominasi oleh pihak swasta, solusi jangka pendek dengan melibatkan BUMN bisa saja mengendalikan harga, tetapi ini bukan solusi terbaik karena mengikuti harga patokan pemerintah tidak serta merta membuat mereka tidak merugikan," ujarnya.

Andree menyebut pengambilalihan oleh BUMN juga dapat meningkatkan risiko disrupsi dan bottleneck karena jalur masuk pasokan menjadi sempit. "Harga bisa saja kelihatan murah, tetapi tiba-tiba tidak ada stok jalur yang cuma satu itu terdisrupsi. Malah kita perlu lebih banyak importir untuk mengurangi risiko disrupsi dan menekan harga," katanya.

Meski begitu, Andree menyebut

tidak mudah untuk menilai efektivitas kebijakan ini tanpa informasi lengkap mengenai komponen biaya. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk memperhatikan reaksi pasar. Jika setelah harga dipatok malah banyak lab yang tidak menawarkan PCR lagi atau terjadi kelangkaan PCR, berarti harga tersebut tidak bisa menutupi biaya lab.

“Solusi paling aman adalah menambah pasokan dengan memperbanyak jalur impor. Untuk jangka menengah dan panjang, solusi yang dibutuhkan adalah menarik investasi pada manufaktur alat kesehatan dalam negeri,” ujar Andree.

Sejauh ini, importir alat deteksi Covid-19 seperti PCR dan Rapid Test Antigen didominasi sepenuhnya oleh kelompok perseorangan atau korporasi non-pemerintah. Sejumlah media melaporkan, kelompok korporasi non-pemerintah memegang 77,16 persen aktivitas impor alat kesehatan yang diperuntukkan untuk penanganan Pandemi Corona di Tanah Air.

Porsi lembaga pemerintah hanya sekitar 16,67 persen dari keseluruhan aktivitas impor alat kesehatan penanganan Covid-19 itu. Sisanya, 6,18 persen pengadaan barang dari luar negeri dilakukan oleh lembaga non-profit.

Namun, korporasi non-pemerintah itu tidak sepenuhnya memiliki latar belakang bisnis di bidang urusan kesehatan masyarakat. Dokumen importasi itu menunjukkan ada perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, tekstil hingga ketel uap.

Berikut 10 importir terbesar untuk alat-alat kesehatan termasuk di dalamnya PCR dan Rapid Test hingga akhir Juli 2021:

- 1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebesar US\$68,6 juta atau 6,29 persen
- 2) PT Jenny Cosmetics dengan nilai impor sebesar US\$43,6 juta atau 4 persen
- 3) Kelompok usaha Dexa Group PT. Beta Pharmacon sebesar US\$36,4 juta atau 3,34 persen. Kelompok usaha Dexa Group khusus melakukan importasi obat terapi Covid-19, tak terkait importasi rapid test maupun PCR.

- 4) Perusahaan teknologi medis asal Jerman Dräger Medical Indonesia sebesar US\$21,5 juta atau 1,98 persen
- 5) Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dengan nilai US\$21,07 juta atau 1,93 persen
- 6) Perusahaan tekstil multi nasional PT Pan Brothers US\$21,07 juta atau 1,93 persen
- 7) Perusahaan ketel uap PT Trimitra Wisesa Abadi sebesar US\$20,8 juta atau 1,91 persen

US\$18,7 juta atau 1,72 persen.

Sedangkan alat deteksi Covid-19 seperti PCR dan Rapid Test Antigen diimpor dengan nilai mencapai US\$530,6 juta atau menyentuh di angka 52,2 persen dari keseluruhan pengadaan alat kesehatan yang didatangkan dari sejumlah negara pemasok. Rinciannya, impor alat PCR Test menembus angka US\$340,5 juta atau sekitar 31,20 persen dari keseluruhan alat kesehatan yang dibeli dari luar negeri.

Ihwal rapid test, importir dalam neg-



Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surlanta.

- 8) Perusahaan laboratorium diagnostik molekular PT Sinergi Utama Sejahtera sebesar US\$20,8 juta atau 1,91 persen
- 9) Perusahaan alat kesehatan Cahaya Medical Indonesia sebesar US\$20,7 juta atau 1,90 persen.
- 10) Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan juga melakukan impor dengan nilai mencapai

eri membeli dengan nilai US\$190,1 juta atau 17,42 persen. Produk impor alat kesehatan itu kebanyakan didatangkan dari Tiongkok dengan nilai transaksi mencapai US\$541,3 juta atau 49,61 persen dari seluruh negara asal. Selanjutnya diikuti Korea Selatan dengan nilai transaksi mencapai US\$150,5 juta atau 13,5 persen dari keseluruhan negara mitra. ●

ANGKA

Gunawan Effendi

Ekonomi kuartal atau triwulan II (April-Juni) 2021 sudah menunjukkan angka pertumbuhan positif. Indonesia keluar dari resesi.

Tapi, itu sudah berlalu. Resesi, penyusutan atau pertumbuhan negatif ekonomi selama dua kuartal berturut-turut, dapat datang lagi dan lagi. Terlebih pada masa pandemi. Kita memang belum lepas dari tarik-menarik antara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan pandemi.

Yang menjadi dilema, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berarti laju pergerakan atau mobilitas manusia dan barang melonjak memicu wabah makin parah. Sedangkan mengendalikan wabah habis-habisan justru sangat mungkin menyusutkan ekonomi, menambah jumlah orang susah dan frustrasi.

Tanda-tanda dilema itu sudah tampak sejak Indonesia memasuki awal kuartal atau triwulan III (Juli-September) 2021. Pada Senin, 9 Agustus 2021 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan hasil survei konsumen bulanan untuk periode Juli 2021. Alhasil, indeks keyakinan konsumen (kita berada di dalamnya) terhadap kondisi ekonomi tertahan.

BI menyebut indeks atau petunjuk mengenai keyakinan konsumen itu tertahan ketimbang turun. Beda istilah saja, namun maknanya sama: Sepanjang April Juni 2021, indeks keyakinan konsumen senantiasa berada di area optimistik, di atas patokan 100. Pada Juni 2021 saja indeks masih berada di angka 107,4. Namun, pada Juli 2021 angkanya merosot hingga 80,2. Turun 27,2 poin.

Indeks keyakinan konsumen diukur dari penilaian tentang kondisi ekonominya saat ini dan perkiraannya terhadap kondisi ekonominya pada enam bulan ke depan. Penilaian tentang kondisi sekarang akan menghasilkan petunjuk berupa indeks kondisi ekonomi (IKE). Sedangkan perkiraan enam bulan ke depan menghasilkan indeks ekspektasi konsumen (IEK). Alat ukurnya: aktivitas di lapangan kerja, penghasilan, dan pengeluaran belanja dibandingkan dengan angka enam bulan sebelumnya dan perkiraan enam bulan ke depan.

Dari rata-rata IKE dan IEK ini muncul indeks keyakinan konsumen (IKK). Survei BI menunjukkan IKK pada Juli 2021 berada di tingkat 80,2 jauh di bawah catatan se-

bulan sebelumnya yang masih berada di tingkat 107,4. Angka IKK 80,2 pada Juli 2021 berasal dari rata-rata IKE dan IEK pada bulan yang sama, masing-masing tercatat 67,1 dan 93,2.

Menurunnya IKK pada Juli 2021 terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran. Namun, yang paling merasakannya, memang kelompok dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan. Dari sisi usia, penurunan IKK juga terjadi pada seluruh kelompok usia responden. Toh yang paling merasakannya ternyata kelompok berusia 41 tahun hingga 50 tahun karena banyak menanggung beban pengeluaran termasuk untuk usia di bawah dan di atasnya.

BI menjelaskan, penurunan keyakinan konsumen pada Juli 2021 disebabkan oleh perkiraan ekspansi

kondisi perekonomian pada enam bulan ke depan masih terbatas, baik dari aspek kegiatan usaha maupun ketersediaan lapangan kerja. Meski demikian, ekspektasi konsumen terhadap penghasilan ke depan tetap terjaga pada area optimis. "Pada saat yang sama, konsumen mempersepsikan kondisi ekonomi sekarang belum sesuai dengan harapan, ditengarai sejalan dengan penurunan aktivitas ekonomi dan penghasilan

masyarakat yang lebih terbatas oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai wilayah di Indonesia."

Lebih rinci, laporan BI mengungkapkan, secara spasial, penurunan keyakinan konsumen pada Juli 2021 terjadi di 17 kota yang disurvei, dengan penurunan terdalam terjadi di Surabaya, Jawa Timur, sebesar 36,0 poin, diikuti Bandung, Jawa Barat, sebesar 35,0 poin, dan Bandar Lampung, Lampung, turun 32,7 poin.

Di sinilah dilema kian terlihat. Keyakinan konsumen lebih menurun di wilayah dengan angka kasus aktif yang tinggi. Juga case fatality rate-nya. Satu hal yang perlu menjadi catatan, setiap berita duka akan mengurangi produktivitas dan optimisme. Oleh sebab itu, jumlah kematian dalam pandemi Covid-19 seharusnya menjadi prioritas untuk mengatasinya, dengan menekan sekecil mungkin jumlahnya.

Semoga angka duka cita berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan ekonomi. Semakin turun duka cita, semakin bergairah ekonomi. ●





www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

info indonesia

Network

**INFO
PASANG
IKLAN**
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562



Lautan
informasi
di dunia maya
melalui jaringan
internet
memberikan
banyak
referensi
iNFO
kepada
masyarakat

JALAN MPR III NO. 5B
KELURAHAN CILANDAK
BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, JAKARTA
SELATAN (12430)
TELP 021-27812397



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #11 AGUSTUS 2021



**MASALAH DI
SEKITAR
VAKSINASI**

**RT PCR MASIH
LANDAI SEIRING
PENURUNAN
TARIF**

**DARI HAMPIR
RP72,45
JADI RP86,4T**

**SEMANGAT HARI
KEMERDEKAAN
MENJADI MOTIVASI
BANGKITNYA SUMSEL
DARI PANDEMI**

LADANG CUAN DI BIDANG KESEHATAN